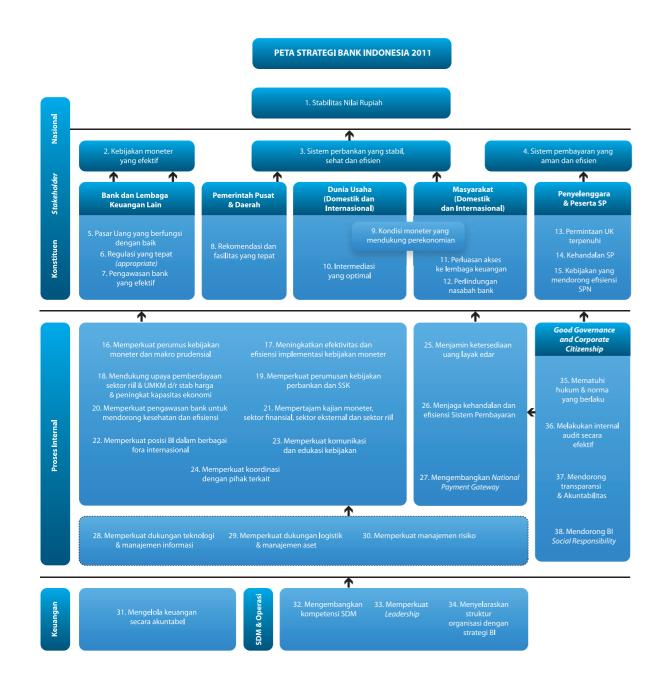
Peta Strategi Bank Indonesia 2011

Strategy Map Bank Indonesia 2011

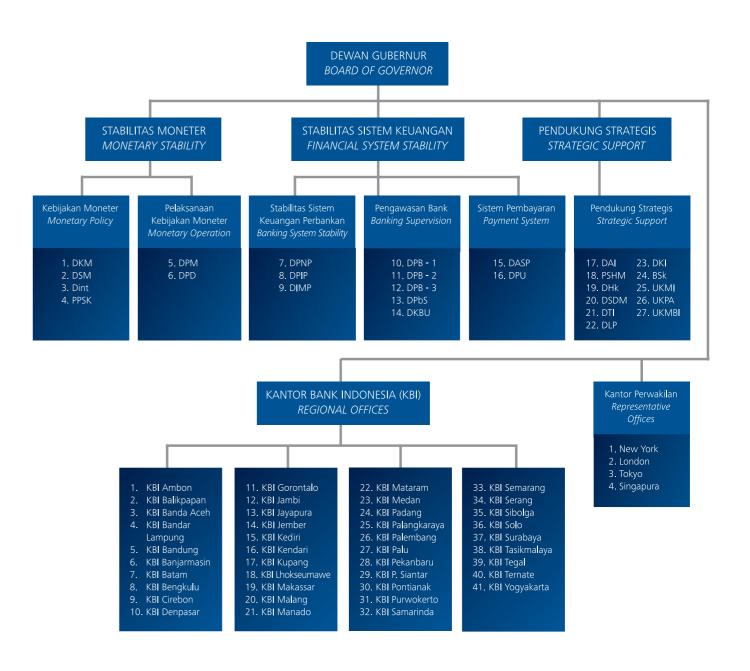


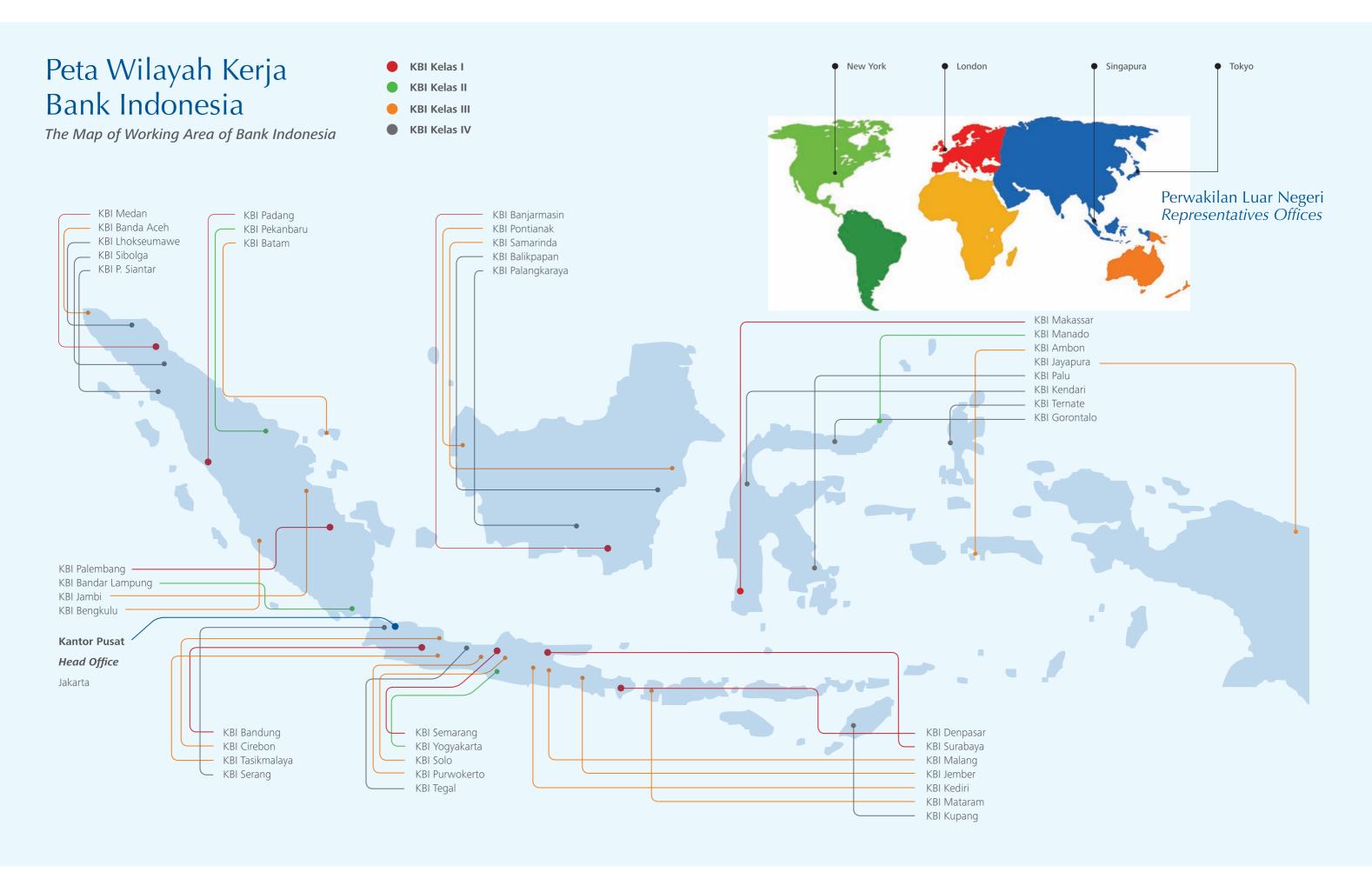
Informasi Tambahan *Additional Information*

- 1. Struktur Organisasi / Organizational Structure
- 2. Peta Wilayah Kerja Bank Indonesia / The Map of Working Area of Bank Indonesia
- 3. Daftar singkatan / Abbreviation
- 4. Daftar Istilah / Glossary
- 5. Daftar kontak / Contact List

Struktur Organisasi Bank Indonesia

The Organizational Structure of Bank Indonesia





Daftar Singkatan

Abbreviations

ALM	:	Asset Liabilities Management	DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat /
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Planned State Budget	EMEAP	:	The House of Representatives Executives' Meeting of East Asia Pacific
APEC	:	Asia-Pacific Economic Cooperation	LIVILAF		Central Banks
API	:	Arsitektur Perbankan Indonesia / Indonesian Banking Architecture	FORSTR	Α:	Forum Strategis / Strategic Forum
APMK	:	Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu / Card-based Payments	GWM	:	Giro Wajib Minimum / The Statutory Reserve Requirement
APRINDO) :	Asosiasi Peritel Indonesia / Indonesian Retailers Association	GWM LD	R:	Giro Wajib Minimum Loan to Deposit Ratio / The Statutory Reserve Requirement Based on The Loan to Deposit Ratio
ASEAN	:	The Association of Southeast Asian Nations	HIMBAR	Δ.	The Loan to Deposit Ratio Himpunan Bank-Bank Negara /
ATM	:	Anjungan Tunai Mandiri / Automatic Teller Machines	TIIIVIDAI	Λ.	Association of National Commercial Banks
ATMR	:	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko / Risk-Weighted Assets	IILM	:	International Islamic Liquidity Management Corporation
BI-RTGS	:	Bank Indonesia- <i>Real Time Gross Settlement</i>	IHK	:	Indeks Harga Konsumen / Headline Inflation
BIS	:	Bank of International Settlements	IKI	:	Indikator Kinerja Individu /
BI-SSSS	:	Bank Indonesia-Scripless Security Settlement System			Individual Performance Indicators
BLINK	:	Bank Indonesia Layanan Intranet Kita /	IKU	:	Indikator Kinerja Utama / Key Performance Indicators
		Intranet Service - Bank Indonesia	IMF	:	International Monetary Fund /
ВМРК	:	Batas Maksimum Pemberian Kredit / The Legal Lending Limit for Credit			International Monetary Fund
BPD	:	Bank Pembangunan Daerah /	IRU	:	Investor Relations Unit / Investor Relations Unit
		Regional Development Banks	ITE	:	Informasi dan Transaksi Elektronik /
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan / The State Audit Board			Information and Electronic Transaction
BPR		Bank Perkreditan Rakyat /	KAP	:	Kualitas Aktiva Produktif /
51 11	•	Rural Banks	KBI		Earning Assets Kantor Bank Indonesia /
BPS	:	Badan Pusat Statistik /	KDI		Bank Indonesia Branch Offices
DCDI		BPS-Statistics Indonesia	KKBI	:	Kantor Koordinator Bank Indonesia /
BSBI		Badan Supervisi Bank Indonesia / Bank Indonesia Supervisory Board	KDK		Bank Indonesia Coordinator Offices
BSR	:	Bank Indonesia <i>Social Responsibility</i>	KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi / Corruption Eradication Commission
DPK	:	Dana Pihak Ketiga / Deposits	KPR	:	Kredit Pemilikan Rumah / Mortgages

Bank Indonesia Representative Offices LDR : Loan to Deposit Ratio : Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia / Annual Financial Statement of Bank Indonesia LTV : Loan to Value MoU : Memorandum of Understanding NPG : National Payment Gateway OECD : The Organisation for Economic Co-Operation and Development O/N Overnight OPT : Operasi Pasar Terbuka / Open Market Operations : Produk Domestik Bruto / PDB **Gross National Product** PDN : Posisi Devisa Netto / Net Open Position (NOP) **PERBANAS**: Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional / Association of State Banks PLN : Pinjaman Luar Negeri / Foreign Loans PUAB : Pasar Uang Antar Bank / Interbank Rate PVP : Payment-Versus-Payment RDG : Rapat Dewan Gubernur / Board of Governors' Meeting RPP : Rancangan Peraturan Pemerintah / Draft Regulations RUU : Rancangan Undang-Undang / Proposed Laws or Bills RPTI : Rencana Pemulihan Teknologi Informasi / Information Technology Recovery Plan **SBDK** : Suku Bunga Dasar Kredit / Prime Lending Rate Sertifikat Bank Indonesia / SBI

Bank Indonesia Certificates

KPw

: Kantor Perwakilan / : Surat Berharga Negara / SBN Government Securities **SEACEN** : The South East Asian Central Banks **SEAVG** : South East Asia Voting Group SDM : Sumber Daya Manusia / Human Resources Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia / **SKNBI** The National Clearing System TPI : Tim Pengendalian Inflasi / Inflation Control Team **TPID** : Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah / Regional Inflation Monitoring and Control UMKM Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah / Micro, Small and Medium Enterprises

Bank Indonesia 2010 Annual Report 109 108 Bank Indonesia Laporan Tahunan 2010

Daftar Istilah Glosssarv

Administered prices

Harga barang/jasa yang diatur oleh Pemerintah, misalnya harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik.

BI-RTGS

Bank Indonesia *Real-Time Gross Settlement*, merupakan sistem transfer dana secara elektronik antar peserta sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

BI-SSSS

Bank Indonesia – *Scripless Securites Settlement System*, merupakan sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaanya dan penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan Sistem BI-RTGS.

Chanelling

Pemberian kredit kepada debitur yang dananya disalurkan melalui bank lain, perusahaan pembiayaan atau pihak lain. Atas penyaluran kredit tersebut bank pelapor sebagai pemilik dana menanggung risiko.

Cross Border Supervision

Pengawasan perbankan lintas negara.

Disaster Recovery Center

Fasilitas pengganti pada saat Pusat Data (*Data Center*) mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi antara lain karena tidak adanya aliran listrik ke ruang komputer, kebakaran, ledakan atau kerusakan pada komputer, yang digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan Pusat Data Bank untuk menjaga kelangsungan kegiatan usaha (*business continuity*).

Emerging Markets

Pasar modal dari negara-negara berkembang yang telah meliberalisasi sistem keuangannya untuk mendukung aliran modal dari non residen dan dapat dijangkau oleh investor asing.

Financial Inclusion

Suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan baik yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam menggunakan dan/atau memanfaatkan layanan jasa keuangan

Administered prices

The prices of goods/services that are controlled by the government, for instance fuel prices and the basic electricity tariff.

BI-RTGS

Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement, is an electronic fund transfer system among participants of the BI-RTGS system in rupiah. Transactions are settled individually in real-time.

BI-SSSS

Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System, is an electronic system for conducting transactions with Bank Indonesia, including the administration of these transactions as well as securities administration, seamlessly connected to participants, the operator and the BI- RTGS System.

Channelling

The provision of credit to a debtor for which the funds are allocated through a separate bank, finance company or third party. The reporting bank, as owner of the funds, assumes the risk.

Cross-Border Supervision

Transnational banking supervision.

Disaster Recovery Center

A temporary backup facility to maintain business continuity when the Data Center experiences disruptions or cannot function as normal, among others, due to power failure in the computer room, fire damage, explosions or damaged computer equipment.

Emerging Markets

Capital markets in developing countries that have liberalised their financial systems to support the flow of capital from non-residents and are accessible to foreign investors.

Financial Inclusion

A comprehensive activity that aims to remove all price and nonprice constraints to disadvantaged and low-income segments of society in accessing financial services.

Financing to deposit ratio (FDR) atau Loan to deposit ratio (LDR)

Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. FDR digunakan untuk bank syariah, sedangkan LDR untuk bank umum.

Foreign Exchange Settlement Risk

Risiko kegagalan setelmen pada salah satu mata uang.

Good Governance

Tata kelola organisasi yang baik dan sehat.

Giro Wajib Minimum (GWM)

Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar Persentase tertentu dari DPK.

GWM LDR

Simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia sebesar persentase dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih antara LDR yang dimiliki oleh bank dengan LDR target.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK)

Kenaikan harga barang yang diukur dari perubahan indeks konsumen, yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat luas.

Inflasi inti

Inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen volatile foods dan administered prices.

Investment Grade

Peringkat yang menunjukkan bahwa obligasi negara atau korporasi memiliki risiko *default* yang relatif rendah.

Kliring

Perhitungan utang piutang antara para peserta kliring secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan suat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan (clearing).

Likuiditas

Kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat; sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya (*liquidity*)

Financing to deposit ratio (FDR) or Loan to deposit ratio (LDR)

The ratio of financing to deposits received by a bank. Islamic banks use FDR while LDR is used by commercial banks

Foreign Exchange Settlement Risk

Default risk on a currency.

Good Governance

Sound organisational governance.

Statutory reserve requirement (GWM)

The minimum amount of funds required to be maintained by a bank determined by Bank Indonesia and expressed as a percentage of deposits.

GWM LDR

The minimum amount of deposits required to be maintained by a bank in the form of the checking account held at Bank Indonesia and expressed as a percentage of deposits and calculated based on the difference between the respective bank's LDR and the target LDR.

Consumer Price Index

The increase in the prices of goods measured by changes in the consumer index, reflecting changes in the prices of common goods and services.

Core Inflation

Headline inflation excluding volatile foods and administered prices.

Investment Grade

A rating that indicates a relatively low risk of default for government or corporate bonds.

Clearing

The centralised exchange of paper instruments among clearing participants, for which settlement takes place at a specified time.

Liquidity

The ability to meet all outstanding liabilities; a company is said to be liquid if its current assets exceed its liabilities.

Daftar Istilah

Glosssarv

Linkage Program

Kerjasama bank umum dan BPR yang dilandasi semangat kemitraan yang bersifat simbiosis mutualistik dengan tetap berorientasi pada aspek bisnis.

Makroprudensial

Kegiatan pemantauan dan analisis kinerja lembaga keuangan secara industri dalam kerangka pengawasan terhadap sistem keuangan.

Mediasi

Proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

National Payment Gateway

Kebijakan yang menitikberatkan pada upaya mengarahkan industri pembayaran untuk bekerjasama menciptakan platform standar sistem atau infrastruktur yang dapat digunakan secara bersama.

Neraca Pembayaran

Suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berialan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial.

One Month Holding Period

Kebijakan pembatasan transaksi SBI selama 1 (satu) bulan sejak kepemilikan SBI.

Operasi Moneter

Pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga (Standing Facilities).

Pasar Primer

Pasar emisi sekuritas baru; pasar ini dibedakan dari pasar sekunder yang mempenjualbelikan sekuritas yang telah diterbitkan dan dijual sebelumnya (primary market).

Pasar Sekunder

Bursa/pasar tempat surat berharga diperjual-belikan antar

Linkage Program

Cooperation between commercial banks and rural banks, which is a mutually symbiotic business-oriented partnership.

Macroprudential

Monitoring and analysis of financial institution performance for the industry as a wholeas part of financial system supervision.

Mediation

Dispute settlement through a process of negotiation and agreement, assisted by a mediator that does not have the authority to decide or impose a settlement.

National Payment Gateway

Policy that focuses on efforts to steer the payment industry towards cooperation to create a standard platform or infrastructure to be used jointly.

Balance of Payments

An accounting record of transactions between the citizens of one country and the rest of the world during a given period (usually one year). The balance of payments incorporates a country's exports and imports of goods and services, grants from individuals and foreign governments and financial transfers. In general the balance of payments includes the current account balance, capital and financial account and financial items.

One-Month Holding Period

Policy to limit SBI transactions to a minimum of one month after the initial purchase.

Monetary Operations

The implementation of monetary policy by Bank Indonesia through open market operations and the interest rate corridor (Standing Facilities).

Primary Market

The market that deals with the issuance of new securities; it differs from the secondary market, which trades securities previously issued and sold.

Secondary market

A market to trade securities among investors outside of the

investor di luar pasar perdana/primer (secondary market).

Payment Versus Payment (PVP)

Sistem pembayaran yang mengakomodir penyelesaian transaksi pembayaran yang bersifat cross border dan multi currency.

Pasar Uang Antar Bank (PUAB)

Kegiatan pinjam meminjam dalam rupiah dan/atau valuta asing antar Bank Konvensional dengan jangka waktu satu hari (overnight).

Posisi Devisa Netto (PDN)

Selisih bersih antara aktiva dan pasiva dalam valuta asing setelah memperhitungkan rekening administratif (net open position).

Rencana Bisnis Bank

Dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun), termasuk strategi untuk merealisasikan rencana tersebut, rencana untuk memperbaiki kinerja usaha, dan rencana pemenuhan ketentuan kehati-hatian sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan.

Risk Based Supervision

Pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan (forward looking) dimana pengawasan/pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat (inherent risk) pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko (risk control system).

Strategy Map

Interelasi antara pengukuran-pengukuran yang terkait satu sama lain dalam hubungan sebab-akibat, yang menggambarkan strategi organisasi Bank Indonesia.

Sekuritisasi

Pengonversian sekelompok piutang dan jenis yang sama (biasanya kredit) menjadi surat berharga yang dapat diperdagangkan, meliputi piutang pokok dan bunga; kredit yang disekuritisasikan biasanya ialah kredit yang berkualitas tinggi yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan tingkat risiko kredit; dengan konversi kredit dan piutang, bank dapat meningkatkan rasio modal dan menerbitkan kredit-kredit yang baru; surat berharga yang

primary market.

Payment Versus Payment (PVP)

A payment system that accommodates the settlement of cross-border, multi-currency payment transactions.

Interbank Money Market (PUAB)

Overnight lending and borrowing of rupiah and foreign exchange between conventional banks.

Net Open Position (NOP)

The net difference between assets and liabilities in foreign exchange after deducting the administrative account.

Bank Business Plan

A written document that illustrates the planned business activity of a bank in the short term (one year) and the medium term (three years), including a strategy to realise the business plan, a plan to improve business performance and a plan how to meet prudential regulations in line with the targets and timeframe set.

Risk-Based Supervision

A forward-looking approach to supervision where the supervision/inspection of a bank focuses on the inherent risks of the functional activities and the risk control system.

Strategy Map

The interrelation among connected measurements in a causal relationship, which illustrate the organisational strategy of Bank Indonesia.

Securitisation

The pooling of various similar debts (normally credit) into one security to be traded, including the principal and the interest. Loans that are securitised are usually high quality to increase income and lower credit risk; by converting credit a bank can boost its capital ratio and issue new credit. Securities sold by a bank to investors are guaranteed against assets that can be converted (assetbacked securities).

Maintaining Credibility, Strengthening the National Economic Recovery

akan dijual oleh bank kepada investor dijamin oleh aset yang akan dikonversikan sehingga sering disebut sebagai sekuritas terdukung aset (asset backed securities).

Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.

Single Presence Policy

Kebijakan kepemilikan tunggal bank.

Sistem Perencanaan dan Manajemen Kinerja (SPAMK)

Sistem yang diterapkan di Bank Indonesia yang mengintegrasikan sistem perencanaan dengan anggaran dan manajemen kinerja, dengan menggunakan konsep *Balanced Scorecard*.

Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)

Suku bunga terendah yang digunakan sebagai dasar bagi bank dalam penentuan suku bunga kredit yang dikenakan kepada nasabah bank.

Sovereign Rating

Peringkat hutang dari suatu lembaga negara yang berdaulat yaitu pemerintah. *Sovereign Rating* mengindikasikan tingkat resiko dari sebuah lingkungan investasi dari suatu negara dan digunakan oleh investor asing yang ingin berinvestasi di negara tersebut.

Term Deposit

Penempatan dana rupiah milik peserta Operasi Moneter secara berjangka di Bank Indonesia. *Term deposit* dapat dicairkan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) sepanjang memenuhi persyaratan tertentu dan atas pencairan tersebut dikenakan biaya.

Treasury Single Account

Pengelolaan kas yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi keuangan negara melalui sentralisasi saldo kas berdasarkan best practices.

Triparty Repurchase (repo) SBN

Kegiatan pengelolaan likuiditas oleh BI melalui transaksi *reverse repo* dengan *underlying asset* SBN yang diperoleh dari pihak lain yang ditetapkan, antara lain Dana Pensiun dan Asuransi.

Bank Indonesia Certificates (SBI)

A rupiah denominated security issued by Bank Indonesia as recognition of short-term debt.

Single Presence Policy

Sole bank ownership.

Planning and Management Performance System (SPAMK)

A system applied at Bank Indonesia that integrates the planning system with budget and management performance, using the Balanced Scorecard concept.

Base Lending Rate (SBDK)

The lowest interest rate used as a reference by banks to set their lending rates charged to the customer.

Sovereign Rating

The debt rating of a sovereign state institution, namely the government. The sovereign rating indicates the level of investment risk in a country used by foreign investors wishing to invest in that country.

Term Deposit

Rupiah based placements held at Bank Indonesia. Term deposits are eligible for early redemption if they adhere to specific requirements, for which a fee is incurred.

Treasury Single Account

A cash management system that creates state financial efficiency through a centralised account based on best practices.

Triparty Repurchase (repo) SBN

Liquidity management by BI through reverse repo transactions using SBN as the underlying asset obtained by a third party, for example pension funds and insurance.

Talent Management

Suatu proses manajemen sumber daya manusia terkait tiga proses. Pertama, mengembangkan dan memperkuat karyawan baru pada proses pertama kali masuk perusahaan (onboarding). Kedua, memelihara dan mengembangkan pegawai yang sudah ada di perusahaan. Ketiga, menarik sebanyak mungkin pegawai yang memiliki kompetensi, komitmen dan karakter bekerja pada perusahaan.

Uang Kartal

Uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia.

Volatile food

Komponen inflasi IHK yang mencakup beberapa bahan makanan yang harganya sangat berfluktuasi.

Talent Management

Human resources management that relies on three processes. First, develop and strengthen new employees as they join the company (onboarding). Second, nurture and develop existing employees. Third, attract as many potential employees that are competent and committed.

Currency

Banknotes and coins issued and circulated by Bank Indonesia that are used as legal tender throughout the Republic of Indonesia.

Volatile foods

A component of headline inflation that incorporates several food items whose prices often fluctuate.

Bank Indonesia 2010 Annual Report 115

Daftar Kontak

Contact List

Kantor Pusat Head Office

Jl. M. H. Thamrin No.2, Jakarta 10350

Website: www.bi.go.id : humasbi@bi.go.id : 381 7187, 381 7317 Telp.

: 350 1867 Fax.

Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter (DKM) Directorate of Economic Research and Monetary Policy

: 350 1869, 381 8190

: 380 0394

Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter (DSM) Directorate of Economic and Monetary Statistics

: 345 2913, 381 8633 Telp.

: 350 1952 Fax.

Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM) Directorate of Monetary Management

: 231 1956, 381 8332

Fax. : 231 1462

Direktorat Pengelolaan Devisa (DPD) Directorate of Reserve Management

Telp. : 231 0755, 381 8100

: 350 1871 Fax.

Direktorat Internasional (DInt) Directorate of International : 231 0195, 381 8261 Telp.

: 231 1529 Fax.

Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) Directorate of Banking Research and Regulation

Telp. : 231 0993, 381 7726

: 231 1672 Fax.

Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP) Directorate of Bank Licencing and Banking Information

: 350 2003, 381 8009 Telp.

: 386 6029 Fax.

Direktorat Pengawasan Bank 1 (DPB1) Directorate of Bank Supervision 1

: 348 30117, 381 8469 Telp.

Fax. : 350 1976 Direktorat Pengawasan Bank 2 (DPB2) Directorate of Bank Supervision 2

: 386 4970, 381 7372 Telp.

Fax. : 386 4971

Direktorat Pengawasan Bank 3 (DPB3) Directorate of Bank Supervision 3

: 350 1961, 381 7046 Telp.

: 350 1890

Direktorat Kredit, BPR dan UKM (DKBU) Directorate of Credit, Rural Bank and SMEs

: 381 7525, 231 1832

Fax. : 231 1237

Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan (DIMP) Directorate of Banking Investigation and Mediation

Telp. : 231 0419, 381 7170

Fax. : 350 1918

Direktorat Perbankan Syariah (DPbS) Directorate of Islamic Banking

: 344 0472, 381 7513 Telp.

: 350 1989 Fax.

Direktorat Pengedaran Uang (DPU) Directorate of Currency Circulation

: 231 0133, 381 7682 Telp.

: 386 6630 Fax.

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP) Directorate of Accounting and Payment System

Telp. : 386 4977, 381 7905 Fax. : 348 30156

Direktorat Logistik dan Pengamanan (DLP)

Directorate of Logistic and Security Telp. : 231 1872, 381 7706

Fax. : 231 1251 Direktorat Teknologi Informasi (DTI) Directorate of Information Technology

: 348 30161, 381 7619

Fax. : 386 6072

Direktorat Sumber Daya Manusia (DSDM)

Directorate of Human Resources : 231 1795, 381 7760 Telp.

: 231 0174 Fax.

Fax.

Direktorat Keuangan Intern (DKI)

Directorate of Internal Financial Management

: 348 30118, 381 7603 : 231 0662

Direktorat Hukum (DHk)

Directorate of Legal Affairs Telp. : 231 1423, 381 7861

Fax. : 350 1835

Direktorat Audit Intern (DAI) Directorate of Internal Audit

: 231 0163, 381 7472

: 384 1507 Fax.

Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat (PSHM)

Office of The Governor

: 386 4981, 381 7315

: 386 6281

Biro Sekretariat (BSk) Office of The Secretariat

: 350 1853, 381 7117 Telp.

Fax. : 231 0592

Unit Khusus Manajemen Informasi (UKMI) Special Unit for Information Management

: 350 1854, 381 7053

: 348 30166 Fax.

Unit Khusus Museum Bank Indonesia (UKMBI) Special Unit for Bank Indonesia Museum

: 231 1371, 381 7604

Fax. : 386 4935

Unit Khusus Penyelesaian Aset (UKPA) Special Unit for Asset Settlement

: 386 6348, 381 6957 Telp.

: 386 6546 Fax.

Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Centre of Education and Central Banking Studies

: 350 1911, 381 7321

Fax. : 350 1912

Kantor Bank Indonesia *Regional Office*

AMBON

Jl. Raya Pattimura No. 7, Ambon

Telp. : (0911) 352 761, 352 762, 352 763, 351 423,

352 695

Fax. : (0911) 356 517

BALIKPAPAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 20, Balikpapan 76111

Telp. : (0542) 411 350, 733 782, 411 355, 411 356

Fax. : (0542) 411 354

BANDA ACEH

Jl. Jenderal Sudirman No. 82, Banda Aceh

Telp. : (0651) 42981, 42961 Fax. : (0651) 41928, 45247

BANDAR LAMPUNG

Jl. Hasanuddin No. 38, Bandar Lampung 35211

Telp. : (0721) 486 355, 486 659, 489 611, 487 775,

488 303 Fax. : (0721) 481 131

BANDUNG

Jl. Braga No. 108, Bandung 40111

Telp. : (022) 423 5505, 423 0223, 423 0224, 423 0227

Fax. : (022) 423 7787

BANJARMASIN

Jl. Lambung Mangkurat No. 15, Banjarmasin 70111

: (0511) 335 2027, 436 8182, 436 6031,

436 8183

Fax. : (0511) 335 4678

BATAM

Jl. Engku Putri Batam Centre, Batam 29432

Telp. : (0778) 462 280, 462 253

Fax. : (0778) 462 254

BENGKULU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1, Bengkulu 38116

Telp. : (0736) 21734, 21735 Fax. : (0736) 21736

CIREBON

Jl. Yos Sudarso No. 5-7, Cirebon

Telp. : (0231) 202 684, 202 685, 202 689, 205 044

Fax. : (0231) 209 135

DENPASAR

Jl. Letda Tantular No. 4 Renon, Denpasar 80234

Telp. : (0361) 221 199, 248 982 Fax. : (0361) 248 993, 222 988

GORONTALO

Jl. D.I. Panjaitan No. 35, Gorontalo Telp. : (0435) 824 444

Fax. : (0435) 827 993

JAMBI

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.14 Telanaipura, Jambi 36122

Telp. : (0741) 62277, 62445, 62578, 63354, 63353

Fax. : (0741) 62112

JAYAPURA

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 9, Jayapura

Telp. : (0967) 534 581, 534 930, 522 935, 533 266

Fax. : (0967) 535 201

JEMBER

Jl. Gajah Mada No. 224, Jember 62133

Telp. : (0331) 485 478, 487 081, 484 487

Fax. : (0331) 487 081

KEDIRI

Jl. Brawijaya No. 2, Kediri

Telp. : (0354) 681 559, 682 112

Fax. : (0354) 682 951

KENDARI

Jl. Sultan Hasanuddin No. 150, Kendari 93122

Telp. : (0401) 321 878, 321 879, 321 655, 322 717

Fax. : (0401) 322 718

KUPANG

Jl. Tom Pello No. 2, Kupang

Telp. : (0380) 832 047, 832 931, 832 364, 827 916,

833 085

Fax. : (0380) 822 103

LHOKSEUMAWE

Jl. Merdeka No. 1, Lhokseumawe 24321

elp. : (0645) 43369, 44000

Fax. : (0645) 43581

MAKASSAR

Jl. Jenderal Sudirman No. 3, Makassar

Telp. : (0411) 3615 188, 3615 189

Fax. : (0411) 3615 170

MALANG

Jl. Merdeka Utara No. 7, Malang

Telp. : (0341) 362 060, 366 054

Fax. : (0341) 324 820

MATARAM

Jl. Pejanggik No. 2, Mataram 83126

Telp. : (0370) 623 600, 633 796, 635 131, 635 132

ax. : (0370) 631 793, 639 123

MEDAN

Jl. Balai Kota No. 4, Medan

Telp. : (061) 452 0800, 415 0500 Fax. : (061) 415 2777, 453 6777

MANADO

Jl. 17 Agustus No. 56, Menado

Telp. : (0431) 868 102, 868 103, 827 106, 868 720

Fax. : (0431) 866 933

PADANG

Jl. Jenderal Sudirman No. 22, Padang

Telp. : (0751) 25409, 31700, 31702, 31703, 30378,

30379, 39109

Fax. : (0751) 27313

PALANGKARAYA

Jl. Diponegoro No. 17, Palangkaraya 73111

Telp. : (0536) 322 2007, 322 2500, 322 1133,

322 0742

Fax. : (0536) 322 3855

PALEMBANG

Jl. Jenderal Sudirman No. 510, Palembang

Telp. : (0711) 352 126, 352 156, 354 258, 352 864,

313 172

: (0711) 312 013

Fax.

PALU

Jl. Sam Ratulangi No. 23, Palu

Telp. : (0451) 421 181, 423 484, 429 179

Fax. : (0451) 421 180

PEKANBARU

Jl. Jenderal Sudirman No. 464, Pekanbaru

Telp. : (0761) 31055, 31098, 31010, 32000, 31689,

31226

Fax. : (0761) 31046

PEMATANG SIANTAR

Jl. H. Adam Malik No. 1, Pematang Siantar

Telp. : (062) 226 999 Fax. : (062) 221 555

PONTIANAK

Jl. Rahadi Usman No. 3, Pontianak 78111

Telp. : (0561) 734 134, 734 018, 768 569, 768 571,

736 637

Fax. : (0561) 732 033

PURWOKERTO

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 98, Purwokerto 53116 Telp. : (0281) 631 632, 631 635, 631 630

Fax. : (0281) 636 201

SAMARINDA

Jl. Gajah Mada No. 1, Samarinda 75122

Telp. : (0541) 741 023, 741 375, 741 022, 749 269

Fax. : (0541) 732 644

SEMARANG

Jl. Imam Bardjo SH No. 4, Semarang

Telp. : (024) 831 0246, 831 0265, 831 0257

Fax. : (024) 831 0339

SERANG

Jl. Jusuf Martadilaga No. 12, Serang, Banten

Telp. : (0254) 223 788 Fax. : (0254) 223 875

SIBOLGA

Jl. Kapten Maruli Sitorus No. 8, Sibolga 22513

Telp. : (0631) 22033, 328 925

Fax. : (0631) 22383

SOLO

Jl. Jenderal Sudirman No. 4, Solo 57111 Telp. : (0271) 647 755, 641 837, 646 314

Fax. : (0271) 647 132

SURABAYA

Jl. Pahlawan No. 105, Surabaya Telp. : (031) 352 0011, 352 4708

Fax. : (031) 352 0025

TASIKMALAYA

Jl. Sutisna Senjaya No. 19, Tasikmalaya 46112

Telp. : (0265) 331 811, 331 813, 335 040, 335 044

Fax. : (0265) 333 528

TEGAL

Jl. Dr. Sutomo No. 55, Tegal Telp. : (0283) 350 500 Fax. : (0283) 356 560

TERNATE

Jl. Jos Sudarso, Ternate

Telp. : (0921) 312 1217, 312 1218, 312 1219

Fax. : (0921) 312 4017

YOGYAKARTA

Jl. Panembahan Senopati No. 4-6,

Yogyakarta 55121

Telp. : (0274) 377 286, 377 755, 371 766

Fax. : (0274) 371 707

Kantor Perwakilan Representative Office

NEW YORK

One Liberty Plaza 165 Broadway, 31st Floor New York, N. Y. 10006

Telp. : (212) 732 1958/59, 732 4011, 732 0467

ax. : (212) 732 4003

LONDON

10 City Road, London

EC 1Y 2EH

: (44-20) 7638 9043, 7638 2408

Fax. : (44-20) 7374 2051

TOKYO

New Kokusai Building Room 906 No.4-1, Marunouchi 3-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0005 Japan

Telp. : (03) 3201 2148, 3271 3415, 3271 3416,

3271 3417

Fax. : (03) 3285 0783

SINGAPORE

11 Collyer Quay #08-01 The Arcade, Singapore 049317

Telp. : (065) 6223 2700, 6223 2701, 6224 5806

Fax. : (065) 6224 4290

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia 2010

Bank Indonesia Annual Financial Statements 2010



TABLE OF CONTENTS DAFTAR ISI

Kata Pengantar Preface 124

Laporan Auditor Independen 126 Report of Independent Auditor

> Neraca 128 Balance Sheet

Laporan Surplus Defisit Surplus Deficit Statement 130

Laporan Perubahan Ekuitas dan Rasio Modal 131 Statement of Changes in Equities

> Laporan Arus Kas 132 Cash Flow Statements

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan 134 Notes to Financial Statements

> A. Umum 134 A. General

B. Kebijakan Akuntansi yang Signifikan 138 B. Significant Accounting Policies

C. Penjelasan Pos-Pos Neraca, Laporan Surplus C. Notes to Balance Sheet, Surplus Deficit Statement 148

Defisit dan Laporan Perubahan Ekuitas dan Rasio Modal and Statement of Changes in Equities

> D. Penjelasan Lainnya 194 D. Others

E. Komitmen dan Kontijensi 195 E. Commitments and Contigencies

> Lampiran **Appendices**

Appendix 1: Organization Chart of Bank Indonesia Lampiran 1 : Struktur Organisasi Bank Indonesia

> Lampiran 2 : Daftar Singkatan Appendix 2: Abbreviations



KATA PENGANTAR PREFACE

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2010 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). Laporan Keuangan ini terdiri dari Neraca per 31 Desember 2010, Laporan Surplus Defisit, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas, masing-masing untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010, berikut Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2010 ini memperoleh Pendapat **Wajar Tanpa Pengecualian** dari BPK. Perolehan pendapat tersebut secara berturutturut dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun terakhir ini merupakan sebuah pencapaian yang membesarkan hati dan mencerminkan komitmen Bank Indonesia untuk senantiasa transparan dan akuntabel, dalam kerangka perwujudan tata kelola yang baik (*good governance*). Pada gilirannya, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan para *stakeholders*, sehingga Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas di masa yang akan datang dengan lebih baik.

Pada kesempatan ini, perkenankan pula Dewan Gubernur Bank Indonesia menyampaikan terima kasih kepada BPK atas saran dan masukannya bagi perbaikan pelaksanaan tugas yang terus menerus di Bank Indonesia. Selanjutnya, terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada para pimpinan Satuan Kerja dan seluruh jajaran Bank Indonesia, yang telah menunjukkan kesungguhan, komitmen, dan kerjasama yang baik dalam melaksanakan tugas masing-masing serta dalam menindaklanjuti setiap saran dan masukan dari BPK, sehingga Bank Indonesia dapat mempertahankan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Disamping itu, sebagai wujud pelaksanaan pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang With praise to the Almighty God, herewith we present the Annual Financial Statements of Bank Indonesia for the year 2010, which had been audited by the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). The Financial Statements include the Balance Sheet as at December 31, 2010, as well as the Statement of Surplus Deficit, Changes in Equity, and Cash Flow, for the period of January 1 to December 31, 2010 along with Notes to the Financial Statements.

This Annual Financial Statements of Bank Indonesia for the year 2010 has obtained **Unqualified Opinion** from BPK. This achievement, which is the eighth for eight consecutive years, is an achievement that we can be proud of and shows Bank Indonesia's commitment to promote transparency and accountability in the hope of achieving good governance. In turn, we hope this will increase stakeholders' trust; therefore Bank Indonesia can perform its future duties better.

In this occasion, the Board of Governors of Bank Indonesia wishes to express our sincere appreciation to BPK for their advices and recommendations intended for a continuing improvement in Bank Indonesia. Our sincere gratitude also goes to the heads of all working units and parties in Bank Indonesia, who have shown strong commitments and cooperation in performing their tasks and implementing the advices and recommendations from BPK, so that Bank Indonesia can maintain the Unqualified Opinion.

In addition, as a form of implementation of article 61 paragraph (4) of the Act of the Republic of Indonesia Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia as amended by Act of the Republic of Indonesia Number 6 of 2009 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Act Number 2 of 2008 concerning Second Amendment of Act

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2010 dipublikasikan pula melalui media massa dan situs resmi Bank Indonesia (http://www.bi.go.id).

Akhir kata, semoga laporan keuangan ini dapat menjadi referensi yang dapat memberi manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat.

Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia as an Act, the Annual Financial Statements for the year 2010 are also published by Bank Indonesia through the mass media and the official website of Bank Indonesia (http://www.bi.go.id).

Finally, hopefully these Financial Statements will serve as a beneficial reference and offer added value to the public.

Jakarta, May 9, 2011

Deputi Gubernur | *Deputy Governor of*Bank Indonesia

Ardhayadi M.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA THE SUPREME AUDIT BOARD REPUBLIC OF INDONESIA

Nomor / Number: 06/01a/LHP/XV/04/2011

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN REPORT OF INDEPENDENT AUDITOR

Kami telah mengaudit Neraca Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009, serta Laporan Surplus Defisit, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajemen Bank Indonesia. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami juga telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern Bank Indonesia. Struktur pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah tanggung jawab Manajemen Bank Indonesia. Laporan atas hasil pengujian ini dilaporkan dalam laporan-laporan terpisah dari laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Bank Indonesia.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang memberlakukan Standar Profesional Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank Indonesia per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan

We have audited the accompanying balance sheets of Bank Indonesia as at December 31, 2010 and December 31, 2009, as well as statements of surplus deficit, changes in equity, and cash flows for the years ended. These financial statements are the responsibility of the management of Bank Indonesia. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits.

We have also performed tests on Bank Indonesia's compliance to regulations and internal control. The structures of internal control and the compliance to regulations are the responsibility of the management of Bank Indonesia. The results of this examination are reported separately from the Independent Auditor Report of the Financial Statements of Bank Indonesia.

We conducted our audits in accordance with State Finance Auditing Standards (SPKN) established by the Supreme Audit Board (BPK), which incoporates the Professional Public Accounting Standards (SPAP) established by the Indonesian Institute of Accountants (IAI). The standards require us to plan and perform our audits to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statements. The audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimations made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial statements as mentioned above present fairly, in all material respects, the financial position of Bank Indonesia as at Desember 31, 2010 and Desember 31, 2009, and the results of its operations, as well as cash flow for the years then ended in conformity with generally accepted accounting principles and specific accounting

kebijakan akuntansi khusus atas transaksi yang umumnya dilakukan Bank Sentral seperti dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan butir B.

Seperti diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan butir C.11, Bank Indonesia mencatat tagihan kepada Pemerintah dalam bentuk Obligasi Negara Seri SRBI-01/ MK/2003 senilai Rp126,70 triliun. Dalam salah satu persyaratan obligasi tersebut dinyatakan bahwa pelunasan obligasi bersumber dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah dan dilakukan apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia telah mencapai di atas 10%. Cara pelunasan seperti itu dapat menimbulkan adanya ketidakjelasan mengenai saat dan jumlah pelunasan obligasi tersebut oleh Pemerintah di masa mendatang. Selain itu, seperti diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan butir C.44, Bank Indonesia mencatat biaya pelaksanaan pencetakan uang sebesar Rp1,52 triliun diantaranya sebesar Rp1,30 triliun masih bersifat sementara dan belum dituangkan dalam suatu kontrak antara BI dengan Perum Peruri. Pengeluaran tanpa didukung kontrak dapat menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Hasil pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dan pengendalian intern kami sampaikan dalam Laporan No. 06/01b/LHP/XV/04/2011 dan No. 06/01c/LHP/ XV/04/2011.

policies generally adopted by Central Banks as discussed in Note B to the Financial Statements.

As elaborated in C.11 of Notes to the Financial Statements, Bank Indonesia recorded a claim to the Government in the form of Treasury Bond (ON) Number SRBI-01/MK/2003 amounted to IDR126,70 trillion. One of the bond's conditions stated that the source of the bond's payment is from Bank Indonesia's surplus, which is accruing to the Government and shall be performed in the event that the capital to monetary liabilities ratio of Bank Indonesia has reached 10% (ten percent). Such payment mechanism may cause uncertainty regarding the time and the amount of the bond's payment by the Government in the future. In addition, as described in C.44 of Notes to the Financial Statements, Bank Indonesia recorded the cost of money printing amounting to IDR1.52 trillion, of IDR1.30 trillion still tentative and has not been set forth in a contract between the BI and Perum Peruri. Expenditure without the supporting contract can lead to ambiguity in the rights and obligations between the parties concerned.

The results of the compliance test to regulations and internal control are delivered in separate reports Number 06/01b/LHP/XV/04/2011 and Number 06/01c/LHP/XV/04/2011.

Jakarta, April 26, 2011

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Penanggung Jawab Pemeriksaan

THE SUPREME AUDIT BOARD REPUBLIC OF INDONESIA

In Charge of Audit

Syafri Adnan Baharuddin, Ak. MBA
Akuntan, Register Negara No.D-4844

BANK INDONESIA NERACA

Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah)

BANK INDONESIA BALANCE SHEET

As at December 31, 2010 and December 31, 2009 (IDR millions)

AKTIVA	Catatan Notes	31 Desember 2010 December 31, 2010	31 Desember 2009 (Disajikan Kembali) December 31, 2009 (Reclassified)	ASSETS
1. Emas	B.6, C.2	29.759.509	24.356.708	1. Gold
2. Uang Asing	B.4, B.7, C.3	9.482	7.508	2. Foreign Currencies
3. Hak Tarik Khusus	B.4, B.8, C.4	24.398.707	25.877.210	3. Special Drawing Rights
4. Giro	B.4, B.9, C.5	11.840.208	28.970.875	4. Demand Deposits
5. Deposito	B.4, B.10, C.6	30.918.204	2.831.219	5. Time Deposits
6. Surat Berharga	B.4, B.11, C.7	766.098.413	538.378.349	6. Marketable Securities
7. Reinvestasi <i>Cash Collateral</i>	B.4, B.12, C.8	19.683.577	0	7. Cash Collateral Reinvestment
8. Surat Utang Negara Republik Indonesia	B.13, C.9	27.479.241	25.353.627	8. Government Bonds
9. Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	B.14, C.10	0	969.907	9. Securities Purchased under Resale Agreements
10. Tagihan		269.613.991	274.031.063	10. Claims
10.1 Kepada Pemerintah	B.15, C.11	251.506.198	254.939.518	10.1 on Government
10.2 Kepada Bank	B.16, C.1, C.12	10.886.737	11.623.482	10.2 on Banks
10.3 Kepada Lainnya	B.17, C.1, C.13	7.221.056	7.468.063	10.3 on Others
11. Penyertaan	B.18, C.14	582.297	837.467	11. Equity Participations
12. Aktiva Lain-Lain	B.19, B.32, B.33, C.15, C.30	15.278.591	9.671.199	12. Other Assets
13. Penyisihan Aktiva JUMLAH AKTIVA	B.21, C.16	(15.649.892) 1.180.012.328	(15.409.756) 915.875.376	13. Allowance for Bad Debt TOTAL ASSETS
JOIVILAN AKTIVA		1.100.012.320	313.073.370	I O I AL ASSETS

BANK INDONESIA NERACA

Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah) BANK INDONESIA
BALANCE SHEET

As at December 31, 2010 and December 31, 2009 (IDR millions)

KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Catatan <i>Notes</i>	31 Desember 2010 December 31, 2010	31 Desember 2009 (Disajikan Kembali)	LIABILITIES AND EQUITIES
			December 31,	
			2009	
			(Reclassified)	

A. KEWAJIBAN				A. LIABILITIES
1. Uang Dalam Peredaran	B.22, C.17	318.585.280	279.038.469	1. Currency in Circulation
2. Giro		258.697.530	156.206.916	2. Demand Deposits
2.1 Pemerintah	B.4, B.23, C.1, C.18	90.994.083	53.673.314	2.1 Government
2.2 Bank	B.4, B.23, C.19	166.163.309	100.944.438	2.2 Bank
2.3 Lainnya	B.4, B.23, C.20	1.540.138	1.589.164	2.3 Others
3. Sertifikat Bank Indonesia	B.24, C.21	195.500.837	254.191.592	3. Bank Indonesia Certificate.
4. Sertifikat Bank Indonesia Syariah	B.25, C.22	2.997.000	4.341.200	4. Bank Indonesia Sharia Certificates
5. Penempatan Berjangka	B.26, C.1, C.23	171.192.385	49.367.267	5. Term Deposits
6. Penempatan Dana	B.27, C.1, C.24	92.038.216	33.008.194	6. Deposit Facilities
7. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	B.28, C.25	9.175.700	3.386.000	7. Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities
 Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali 	B.29, C.26	7.000.320	2.556.042	8. Securities Sold under Repurchase Agreements
9. Pinjaman Dari Pemerintah	B.4, B.30, C.27	140.395	163.222	9. Loans from Government
10. Pinjaman Luar Negeri	B.4, B.31, C.28	5.217.852	5.736.175	10. Foreign Borrowings
11. Kewajiban Lain-Lain	B.20, B.33, C.1, C.29, C.30	50.668.012	34.372.956	11. Other Liabilities
JUMLAH KEWAJIBAN		1.111.213.527	822.368.033	TOTAL LIABILITIES
B. EKUITAS				B. EQUITIES
1. Modal	C.31	7.610.885	7.610.885	1. Capital
2. Cadangan Umum	C.32	62.250.542	62.858.789	2. General Reserves
3. Cadangan Tujuan	C.32	14.370.568	14.772.225	3. Statutory Reserves
4. Keuntungan Atau Kerugian yang Belum Direalisasi	B.32, C.33	5.725.994	9.275.348	4. Unrealized Gains/Losses
5. Surplus (Defisit) Tahun Berjalan		(21.159.188)	(1.009.904)	5. Current Year Surplus (Defis
JUMLAH EKUITAS		68.798.801	93.507.343	TOTAL EQUITY
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.180.012.328	915.875.376	TOTAL LIABILITIES AND EQUITIES

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan. See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan. See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

Maintaining Credibility, Strengthening the National Economic Recovery

BANK INDONESIA LAPORAN SURPLUS DEFISIT

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2010 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2009 (Dalam Jutaan Rupiah)

BANK INDONESIA SURPLUS DEFICIT STATEMENT

For the period of January 1 to December 31, 2010 and January 1 to December 31, 2009 (IDR millions)

1 Januari - 1 Januari - 31 Desember Catatan Notes 31 Desember 2010 January 1 -

December 31, 2010

2009 (Disajikan Kembali) January 1 - December 31 2009 (Reclassified)

PENERIMAAN				REVENUES
1. Pengelolaan Moneter		4.544.662	28.177.865	1. Monetary
1.1 Pengelolaan Devisa	C.1, C.34	17.969.953	19.027.557	1.1 Foreign Reserve
1.2 Kegiatan Pasar Uang	C.1, C.35	2.726.592	2.055.188	Management
1.3 Pemberian Kredit	C.1, C.36	283.870	551.633	1.2 Money Market Activities
dan Pembiayaan				1.3 Credit and Financing
1.4 Selisih Kurs karena Transaksi Valuta Asing	C.1, C.37	(16.435.753)	6.543.487	1.4 Exchange Differences
2. Pengelolaan Sistem Pembayaran	C.38	201.130	185.016	2. Payment System Services
3. Lainnya	C.1, C.39	1.306.118	1.293.635	3. Others
JUMLAH PENERIMAAN		6.051.910	29.656.516	TOTAL REVENUES
BEBAN				EXPENSES
1. Pengendalian Moneter		24.402.367	22.466.680	1. Monetary Operations
1.1 Operasi Pasar Terbuka	C.40	24.176.801	22.223.467	1.1 Open Market Operations
1.2 Pengelolaan Devisa	C.41	38.787	33.548	1.2 Foreign Reserve Management
1.3 Pinjaman Luar Negeri	C.42	158.643	131.175	1.3 Foreign Borrowings Management
1.4 Lainnya		28.136	78.490	1.4 Others
2. Jasa Giro Pemerintah	C.43	2.434.310	1.849.015	2. Interest Expenses on Government Accounts
3. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran	C.1, C.44	2.703.376	2.173.722	3. Payment System Operations
3.1 Sistem Pembayaran Tur	nai	2.692.494	2.162.634	3.1 Currency Circulation
3.2 Sistem Pembayaran Non Tunai		10.882	11.088	3.2 Payment System Services
4. Pengaturan dan Pengawasan Perbankan		149.878	132.168	4. Banking Regulations and Supervision
5. Umum dan Lainnya	C.1, C.45	4.344.435	4.171.965	5. General and Others
5.1 SDM dan Logistik		4.066.347	4.106.700	5.1 Human Resources and Logistics
5.2 Lainnya		278.088	65.265	5.2 Others
JUMLAH BEBAN		34.034.366	30.793.550	TOTAL EXPENSES
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM PAJAK		(27.982.456)	(1.137.034)	SURPLUS (DEFICIT) BEFORE T
Penerimaan (Beban) Pajak Penghasilan		6.823.268	127.130	INCOME TAX REVENUE (EXPENSE)
SURPLUS (DEFISIT)		(21.159.188)	(1.009.904)	SURPLUS (DEFICIT)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan. See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

BANK INDONESIA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Periode 1 Januari – 31 Desember 2010 (Dalam Jutaan Rupiah)

BANK INDONESIA STATEMENT OF CHANGES IN EQUITIES

For the period of January 1 to December 31, 2010 (IDR millions)

I. EKUITAS

I. EQUITIES

	31 Desember 2009 December 31, 2009	Penambahan <i>Addition</i>	Pengurangan Deduction	31 Desember 2010 December 31, 2010	
1. Modal	7.610.885	0	0	7.610.885	1. Capital
Cadangan Umum	62.858.789	401.657	1.009.904	62.250.542	2. General Reserves
Cadangan Tujuan	14.772.225	101.037	401.657	14.370.568	3. Statutory Reserves
Keuntungan atau Kerugian yang Belun Direalisasi	9.275.348		3.549.354	5.725.994	4. Unrealized Gains (Losses)
5. Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	(1.009.904)	(21.159.188)	(1.009.904)	(21.159.188)	5. Current Year Surplus (Deficit)
,	93.507.343	(20.757.531)	3.951.011	68.798.801	
II. KEWAJIBAN MONE (Catatan C.46)	TER			1.054.271.839	II. MONETARY LIABILITIES (Note C.46)
III. RASIO MODAL SEBELUM DIKURAI SISA SURPLUS YAN MENJADI BAGIAN PEMERINTAH (Catatan C.46)				4,62%	III. CAPITAL RATIO BEFORE DEDUCTED BY GOVERNMENT'S SHARE OF BI'S SURPLUS (Note C.46)
IV. SISA SURPLUS YAN MENJADI BAGIAN PEMERINTAH	NG			0	IV. TRANSFER OF SURPLUS TO THE GOVERNMENT
V. RASIO MODAL SETELAH DIKURAN SISA SURPLUS YAN MENJADI BAGIAN PEMERINTAH				4,62%	V. CAPITAL RATIO AFTER DEDUCTED BY GOVERNMENT'S SHARE OF BI'S SURPLUS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan. See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

Bank Indonesia 2010 Annual Report 131 130 Bank Indonesia Laporan Tahunan 2010

BANK INDONESIA LAPORAN ARUS KAS

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2010 (Dalam Jutaan Rupiah)

1. ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

BANK INDONESIA CASH FLOW STATEMENT

For the period of January 1 to December 31, 2010 (IDR millions)

1. CASH FLOWS/CASH EQUIVALENTS FROM OPERATING ACTIVITIES

1.1	l Defisit		(21,159,188)	1.1 Deficit
1.2			(5,402,801)	1.2 Increase in Gold
1.3			(1,974)	1.3 Increase in Foreign Currencies
1.4			1,478,503	1.4 Decrease in Special Drawing Rights
1.5	5 Penurunan Giro		17,130,667	1.5 Decrease in Demand Deposits
1.6	5 Kenaikan Deposito		(28,086,985)	1.6 Increase in Time Deposits
1.7			(227,720,064)	1.7 Increase in Marketable Securities
1.8	3 Kenaikan Reinvestasi		(19,683,577)	1.8 Increase in Cash Collateral
	Cash Collateral			Reinvestment
1.9	Kenaikan Surat Utang		(2,125,614)	1.9 Increase in Government Bonds
	Negara Republik Indonesia			
1.1	0 Penurunan Surat Berharga yang		969,907	1.10 Decrease in Securities Purchased
	Dibeli dengan Janji Dijual Kembali			Under Resale Agreements
1.1	l 1 Penurunan Tagihan		4,417,072	1.11 Decrease in Claims
	1.11.1 Penurunan Tagihan	3,433,320		1.11.1 Decrease in Claims
	kepada Pemerintah			on Government
	1.11.2 Penurunan Tagihan	736,745		1.11.2 Decrease in Claims on Banks
	kepada Bank	2.47.007		1.11.2.5
	1.11.3 Penurunan Tagihan	247,007		1.11.3 Decrease in Claims on Others
1 1	kepada Lainnya		(F FFF 226)	1 12 12 22 22 22 22
	2 Kenaikan Aktiva Lain-Lain		(5,555,236) 485,273	1.12 Increase in Other Assets 1.13 Adjusments:
1.1	13 Penyesuaian-penyesuaian:1.13.1 Penyisihan Aktiva	240,136	405,275	1.13.1 Allowance for Bad Debts
	1.13.1 Penyisinan Aktiva 1.13.2 Penyusutan Aktiva Tetap	231,436		1.13.2 Fixed Asset Depreciation
	1.13.3 Amortisasi Aktiva	96,910		1.13.3 Intangible Asset Amortization
	Tidak Berwujud	30,310		1.13.3 mangible / Bace/ morazadon
	1.13.4 Amortisasi Aktiva Sewa	(83,209)		1.13.4 Capital Lease Amortization
	Guna Usaha			,
1.1	4 Kenaikan Uang Dalam Peredaran		39,546,811	1.14 Increase in Currency Circulation
	15 Kenaikan Giro		102,490,614	1.15 Increase in Demand Deposits
	1.15.1 Kenaikan Giro Pemerintah	37,320,769		1.15.1 Increase in Government
				Demand Deposits
	1.15.2 Kenaikan Giro Bank	65,218,871		1.15.2 Increase in Bank Demand
				Deposits
	1.15.3 Penurunan Giro Lainnya	(49,026)		1.15.3 Decrease in Other Demand
				Deposits
	6 Penurunan Sertifikat Bank Indonesia		(58,690,755)	1.16 Decrease in Bank Indonesia Certificates
1.1	17 Penurunan Sertifikat Bank		(1,344,200)	1.17 Decrease in Bank Indonesia
4 4	Indonesia Syariah		424 025 440	Sharia Certificates
	8 Kenaikan Penempatan Berjangka		121,825,118	1.18 Increase in Term Deposits
	19 Kenaikan Penempatan Dana		59,030,022	1.19 Increase in Deposit Facilities 1.20 Increase in Bank Indonesia Sharia
1.2	20 Kenaikan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah		5,789,700	Deposit Facilities
1 7	21 Kenaikan Surat Berharga yang		4,444,278	1.21 Increase in Securities Sold Under
1.2	Dijual dengan Janji Dibeli Kembali		7,777,270	Repurchase Agreements
1 7	22 Kenaikan Kewajiban Lain-Lain		16,295,056	1.22 Increase in Other Liabilities
	•			
Ar	us Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivit	as Operasi	4,132,627	Net Cash Flows/Cash Equivalents from Operating Activities

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan. See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

BANK INDONESIA LAPORAN ARUS KAS

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2010 (Dalam Jutaan Rupiah)

BANK INDONESIA CASH FLOW STATEMENT

For the period of January 1 to December 31, 2010 (IDR millions)

2. ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

2. CASH FLOWS/CASH EQUIVALENTS FROM INVESTING ACTIVITIES

Increase in Fixed Assets Decrease in Finance-Leased Assets Increase in Intangible Assets Cash Flows/Cash Equivalents From Sting Activities ASH FLOWS/CASH EQUIVALENTS COM FINANCING ACTIVITIES Increase (Decrease) in Capital Decrease in Loans from Government Decrease in Foreign Borrowings
Increase in Intangible Assets Cash Flows/Cash Equivalents From Sting Activities ASH FLOWS/CASH EQUIVALENTS COM FINANCING ACTIVITIES Increase (Decrease) in Capital Decrease in Loans from Government
Cash Flows/Cash Equivalents From Sting Activities ASH FLOWS/CASH EQUIVALENTS FROM FINANCING ACTIVITIES Increase (Decrease) in Capital Decrease in Loans from Government
ASH FLOWS/CASH EQUIVALENTS COM FINANCING ACTIVITIES Increase (Decrease) in Capital Decrease in Loans from Government
Increase (Decrease) in Capital Decrease in Loans from Government
Decrease in Loans from Government
-
Decrease in Foreian Borrowinas
z cerease m. r ereign zemennige
Decrease in General Reserve
Decrease in Statutory Reserve
Decrease in Unrealized Gains/Losses
Previous Year Deficit
Cash Flows/Cash Equivalents from ncing Activities

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan. See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010

Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

A. UMUM

1. Organisasi Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang.

Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

Sehubungan dengan tugas tersebut, semua kegiatan Bank Indonesia dilakukan tidak atas dasar pertimbangan komersial, melainkan lebih diarahkan pada pengendalian nilai Rupiah dan terciptanya stabilitas sistem keuangan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur dan seorang Deputi Gubernur Senior, serta sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyakbanyaknya 7 (tujuh) orang Deputi Gubernur. Adapun susunan Dewan Gubernur pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

A. GENERAL

1. Organization of Bank Indonesia

Bank Indonesia is the Central Bank of the Republic of Indonesia that was established based on Act of the Republic of Indonesia Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia as amended by Act of the Republic of Indonesia Number 6 of 2009 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Act Number 2 of 2008 concerning Second Amendment of Act Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia as an Act.

In accordance with Article 7 of Act of the Republic of Indonesia Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia as amended by Act of the Republic of Indonesia Number 6 of 2009 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Act Number 2 of 2008 concerning Second Amendment of Act Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia as an Act, the objective of Bank Indonesia is to achieve and maintain the stability of the Rupiah. To accomplish the objective, Bank Indonesia has several duties as follows:

- a. To formulate and to implement monetary policies;
- b. To regulate and to safeguard the smoothness of the payment system; and
- c. To regulate and to supervise banks.

In relation to those duties, the activities of Bank Indonesia are not performed on a commercial basis, but are directed on controlling the Rupiah and maintaining financial system stability.

In performing its duties, Bank Indonesia is led by the Board of Governors that consist of a Governor, a Senior Deputy Governor and at least 4 (four) or at the maximum of 7 (seven) Deputy Governors. The members of the Board of Governors as at December 31, 2010 were as follows:

Gubernur Deputi Gubernur Senior Deputi Gubernur **Darmin Nasution**

Hartadi A. Sarwono S. Budi Rochadi Muliaman D. Hadad Ardhayadi M. **Budi Mulya** Halim Alamsyah

Governor Senior Deputy Governor Deputy Governor

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010

Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63/P Tahun 2010 tanggal 1 Juni 2010, Sdri. Siti Ch. Fadjrijah diberhentikan dengan hormat mengingat masa jabatan yang bersangkutan telah berakhir dan Sdr. Halim Alamsyah diangkat menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia terhitung tanggal 17 Juni 2010. Sementara itu, Sdr. Darmin Nasution yang sebelumnya telah menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95/P Tahun 2010 tanggal 21 Agustus 2010 diangkat menjadi Gubernur Bank Indonesia.

Bank Indonesia berkantor pusat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta, memiliki 41 Kantor Bank Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia dan empat Kantor Perwakilan Bank Indonesia di luar negeri dengan jumlah pegawai sebanyak 5.535 orang.

In accordance with Presidential Decree Number 63/P dated June 1, 2010, Siti Ch. Fadjrijah was respectfully discharged due to the completion of the service period and Halim Alamsyah has been appointed as Deputy Governor starting on Juni 17, 2010. Whereas Darmin Nasution was appointed as acting Governor, afterward has been appointed as Governor in accordance with Presidential Decree Number 95/P dated August 21, 2010.

Bank Indonesia's headquarter is located at Jl. MH Thamrin No. 2 Jakarta, with 41 branches around Indonesia and four overseas representative offices with a total of employees 5,535 persons.

2. Kebijakan Bank Indonesia Tahun 2010 yang Berimplikasi Terhadap Penyajian Laporan Keuangan

a. Kebijakan Moneter

Untuk meningkatkan efektivitas operasi moneter dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, telah dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai operasi moneter berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/11/PBI/2010 tanggal 2 Juli 2010 mengenai Operasi Moneter.

Latar belakang penyempurnaan ketentuan dimaksud diantaranya adalah harmonisasi ketentuan Operasi Moneter (OM) dengan kerangka kerja kebijakan moneter dengan sasaran akhir kestabilan harga. Dengan harmonisasi tersebut terdapat beberapa hal yang diakomodir, diantaranya penerapan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) Overnight (O/N) sebagai sasaran operasional kebijakan moneter dan pengklasifikasian kegiatan Operasi Moneter menjadi Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan koridor suku bunga.

Kegiatan OPT meliputi penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI), transaksi repurchase agreement (repo) dan reverse repo surat berharga, transaksi pembelian dan penjualan surat berharga secara *outright*, penempatan berjangka (term deposit) di Bank Indonesia dan jual beli valuta asing terhadap rupiah. Sedangkan koridor suku bunga (standing facility) meliputi kegiatan penyediaan dana rupiah (lending facility) dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana rupiah (deposit facility) oleh bank di Bank Indonesia.

2. The Impact of Bank Indonesia Policy in 2010 to Financial Statements

a. Monetary Policy

To enhance the effectiveness of monetary operation in supporting Bank Indonesia objective to achieve and maintain the value of Rupiah, Bank Indonesia had revised its regulation No. 12/11/PBI/2010 dated July 2, 2010, concerning Monetary Operation (Operasi Moneter – OM).

The revision intends to harmonize the OM regulation with monetary policy framework with ultimate objective the price stability. The revision consists of the implementation of Overnight Interest Rate Interbank Money Market as monetary policy operational target, and the classification of OM as Open Market Operation and Standing Facilities.

Open Market Operation instrument consists of Bank Indonesia Certificates issuance, repurchase agreement (repo) transaction and reverse repo transaction, outright buying/selling of securities, term deposit, and buying/ selling of foreign exchange against Rupiah. Standing Facilities consist of lending facilities (lending of Rupiah from Bank Indonesia to banks) and deposit facilities (placement of Rupiah from banks in Bank Indonesia).

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010

Oleh karena itu, dirasa perlu melakukan penyesuaian istilah dalam penyajian Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) 2010 yang mencerminkan kegiatan pokok di dalam OM, baik dalam rangka injeksi likuiditas maupun

absorbsi likuiditas. Beberapa perubahan terminologi

1) Fine Tune Ekspansi menjadi Repo

tersebut adalah sebagai berikut:

- 2) Fine Tune Kontraksi menjadi Term Deposit
- 3) Repo overnight menjadi Lending Facility
- 4) FASBI overnight menjadi Deposit Facility

b. Kebijakan Perbankan

Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing. Berdasarkan ketentuan tersebut, bank wajib memenuhi Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi terdiri dari GWM Primer dalam rupiah sebesar 8% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam rupiah, GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% dari DPK dalam rupiah dan GWM Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara LDR Bank dan LDR Target dengan memperhatikan selisih antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dan KPMM Insentif. Kewajiban pemenuhan GWM LDR tersebut akan diberlakukan sejak tanggal 1 Maret 2011. Sedangkan GWM dalam valuta asing yang wajib dipenuhi adalah sebesar 1% dari DPK dalam valuta asing.

Tata cara pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah diatur di dalam SE Nomor 11/29/DPNP tanggal 16 Oktober 2009 tentang Perhitungan Giro Wajib Minimum Sekunder dalam Rupiah. Sesuai SE Nomor 11/29/DPNP dimaksud, komponen yang dapat diperhitungkan sebagai cadangan dalam pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah adalah SBI untuk seluruh jangka waktu, Surat Utang Negara (SUN) berupa Obligasi Negara (ON) dan/atau Surat Perbendaharaan Negara (SPN) untuk seluruh jenis dan jangka waktu (tidak termasuk SUN yang tidak dapat diperdagangkan), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk seluruh jenis dan jangka waktu (tidak termasuk SBSN yang tidak dapat diperdagangkan), dan kelebihan

Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

There are some terminology adjustments in the BI's annual financial statements of 2010 to reflect the OM main activity, which is the injection of Rupiah liquidity or absorption of Rupiah liquidity. The adjustments made are as follows:

- 1) Fine Tune Expansion becoming Repo;
- 2) Fine Tune Contraction becoming Term Deposit;
- 3) Overnight Repo becoming Lending Facilities;
- 4) Overnight BI Deposit Facilities (FASBI) becoming Deposit Facilities.

b. Banking Policies

Bank Indonesia Regulation Number 12/19/PBI/2010 was issued on October4, 2010, concerning Banks' Minimum Reserve Requirement (Giro Wajib Minimum - GWM) at Bank Indonesia in Rupiah and Foreign Currency. Banks are required to maintain GWM both in Rupiah and in foreign currency denomination. Banks are obliged to uphold two types of minimum reserve requirement denominated in Rupiah: (1) Primary GWM and (2) Secondary GWM. Primary GWM in Rupiah is set at 8% of Third Party Deposits (Dana Pihak Ketiga - DPK) in Rupiah. Secondary GWM in Rupiah is set at 2.5% of DPK in Rupiah. In addition, GWM Loan to Deposit Ratio (LDR) is calculated using below or above disincentive parameter of the differences between Bank LDR and Targeted LDR, differences between Capital Adequacy Ratio (CAR) of Bank and CAR of Incentive. LDR GWM obligation will be enforced from the date of March 1, 2011. Meanwhile, GWM in foreign currencies that the banks are obliged to carry out is determined at 1% from DPK in foreign currencies.

The procedures to conform Secondary GWM in Rupiah are stated in Circular Letter Number 11/29/DPNP dated October 16, 2009 concerning Calculation of Secondary GWM in Rupiah. According to Circular Letter Number 11/29/DPNP, the components that can be calculated as reserves in complying with Secondary GWM in Rupiah is SBI for all time frames, SUN in the form of ON and/or SPN for all types and time frames (not including non-tradable SUN), SBSN of all types and time frames (not including non-tradable SBSN), and Excess Reserves.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010

Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

saldo rekening Giro Rupiah Bank dari GWM Primer dan GWM LDR yang wajib dipelihara di Bank Indonesia (Excess Reserve).

Bank Indonesia memberikan jasa giro setiap hari kerja dengan tingkat bunga sebesar 2,5% per tahun terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM Primer dalam rupiah. Bagian tertentu yang mendapat jasa giro ditetapkan sebesar 3% dari DPK dalam rupiah. Jasa giro diberikan apabila Bank telah memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah. Pemberian jasa giro untuk periode 1 November 2010 sampai dengan 28 Februari 2011 berdasarkan pemenuhan GWM Primer dan GWM Sekunder.

Kewajiban untuk memelihara GWM dalam Rupiah maupun valuta asing dimaksud berlaku pula bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (bank syariah), termasuk bank dan kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan juga melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang selanjutnya disebut Unit Usaha Syariah. Berdasarkan PBI Nomor 6/21/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 10/23/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008, GWM dalam Rupiah bagi bank syariah ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam Rupiah dan GWM dalam valuta asing sebesar 1% dari DPK dalam valuta asing. Di samping itu, bagi bank syariah yang memiliki DPK di atas Rp1 triliun, serta memiliki rasio pembiayaan dalam Rupiah terhadap DPK dalam Rupiah kurang dari 80%, berlaku pula kewajiban tambahan GWM dalam Rupiah sebesar 1%, 2% dan 3%, tergantung kepada besarnya DPK bank yang bersangkutan. Bank Indonesia tidak memberikan jasa giro atas saldo rekening giro bank syariah.

Bank Indonesia provides interest for bank demand deposits on working days of 2.5% per annum for particular amount of compulsory Primary GWM in Rupiah. This particular number is determined at 3% from DPK in Rupiah. Interest is given when Bank has satisfied all obligation of GWM in Rupiah. Interest attributable to these deposits for the period of November 1, 2010 to February 28, 2011 was based on fulfillment of Primary GWM and Secondary GWM.

The obligation to maintain GWM in Rupiah and in foreign currency is also applied to banks that perform their activities based on Sharia Principles (Sharia banks), including banks and the representative offices of banks whose head office is domiciled overseas (foreign banks) that perform their activities based on conventional and Sharia Principles referred to as Sharia Business Units (Unit Usaha Syariah – UUS). According to Bank Indonesia Regulation Number 6/21/2004 dated August 3, 2004 concerning Minimum Reserve Requirement in Rupiah and Foreign Currency for commercial banks that perform their activities based on sharia principles, as amended by Bank Indonesia Regulation Number 10/23/PBI/2008 dated October 16, 2008, GWM in Rupiah for Sharia Banks is determined at 5% of Third Party Funds in Rupiah and GWM in foreign currency is determined at 1% of Third Party Funds in foreign currency. Other than that, for Sharia banks with Third Party Funds more than IDR1 trillion and the ratio of funding in Rupiah to Third Party Funds in Rupiah is less than 80%, additional GWM in Rupiah is applied at 1%, 2%, and 3%, depending on the amount of Third Party Funds of the banks. Bank Indonesia does not provide yield to the balance of bank demand deposits account of Sharia banks.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010 Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyajian Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia per 31 Desember 2010 ini mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/102/INTERN tanggal 31 Desember 2009 tentang Laporan Keuangan Bank Indonesia.

Kebijakan akuntansi yang dianut Bank Indonesia diatur dalam Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PAKBI). PAKBI disusun dengan mengacu kepada prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagaimana dimaksud dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan International Accounting Standard (IAS), Peraturan Intern Bank Indonesia, dan praktik-praktik yang lazim dilakukan oleh bank sentral negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan antara Bank Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia. Agar senantiasa sejalan dengan perkembangan SAK dan IAS, PAKBI selalu disempurnakan, terakhir dengan Surat Edaran Nomor 8/50/INTERN tanggal 28 September 2006 tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam PAKBI, Kebijakan Akuntansi Bank Indonesia mengacu kepada prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan oleh Bank Indonesia secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

1. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia disajikan dalam jutaan Rupiah, disusun atas dasar akrual dengan konsep nilai historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan masingmasing akun tersebut.

2. Taksiran Manajemen

Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban, pengungkapan aktiva dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan. Hasil aktual dapat berbeda dari taksiran-taksiran tersebut.

B. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The presentation of the Annual Financial Statements of Bank Indonesia for the year 2010 is in accordance with the Circular Letter of Bank Indonesia Number 11/102/ INTERN dated December 31, 2009 concerning the Financial Statements of Bank Indonesia

The accounting policies adopted by Bank Indonesia are regulated in Bank Indonesia Financial Accounting Guidance (Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia - PAKBI). PAKBI is in conformity with the Indonesian Financial Accounting Standards (Standar Akuntansi Keuangan - SAK), International Accounting Standards (IAS), Bank Indonesia's internal regulations and best practices in other central banks, as well as the agreements among Bank Indonesia, the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan – BPK) and the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (Ikatan Akuntan Indonesia - IAI). In order to maintain its updated conformity with SAK and IAS, PAKBI has been continuously revised, most recently as declared in the Circular Letter Number 8/50/INTERN dated September 28, 2006 concerning Bank Indonesia Financial Accounting Guidance.

The significant accounting policies that have been consistently applied by Bank Indonesia on the Financial Statements for the period of January 1 to December 31, 2010 are as follows:

1. Basis for Preparation of Financial Statements

The financial statements of Bank Indonesia are presented in millions of Rupiah, and prepared on the accrual basis using the historical cost concept, except for certain accounts that are presented using other measurements as stated in the accounting policy of each account.

2. Management Estimations

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimations and assumptions that may affect the amount of assets and liabilities, disclosure of contingent assets and liabilities at the date of financial statements and the amount of revenues and expenses reported during the year. The actual results may differ from those estimations.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010

Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

3. Pengakuan Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga dari penanaman dana Bank Indonesia diakui secara akrual. Akrualisasi pendapatan bunga dihentikan dan bunga yang telah diakui sebelumnya namun belum tertagih dibatalkan pada saat penanaman dana yang bersangkutan digolongkan sebagai *non-performing*.

4. Transaksi dalam Valuta Asing

Transaksi valuta asing dibukukan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada saat transaksi. Guna penyusunan Laporan Keuangan, aktiva dan pasiva dalam valuta asing dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca yang berlaku pada tanggal yang bersangkutan. Selisih penjabaran tersebut dicatat dalam rekening Cadangan Selisih Kurs dan disajikan di neraca pada pos Keuntungan atau Kerugian Yang Belum Direalisasi dalam kelompok Ekuitas sampai dengan valuta asing yang bersangkutan berkurang. Bank Indonesia menggunakan metode Net Currency Position (NCP) dalam menatausahakan dan mencatat valuta asing. Dalam metode tersebut, hasil revaluasi aktiva dan pasiva valuta asing dihitung dari perkalian antara posisi netto valuta asing dengan selisih antara kurs neraca dengan harga pokok rata-rata valuta asing.

Kurs neraca Bank Indonesia untuk valuta asing utama pada tanggal 31 Desember 2010 adalah Rp8.991,00/USD, Rp11.955,79/EUR, Rp13.893,80/GBP, Rp13.846,41/SDR, dan Rp11.028,52/JPY100.

5. Hubungan Istimewa dan Kebijakan Akuntansinya

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Bank Indonesia adalah:

- a. Lembaga/Badan Usaha yang dikendalikan atau berada di bawah pengendalian Bank Indonesia.
 Dalam pengertian ini antara lain meliputi badan usaha di mana Bank Indonesia memiliki penyertaan atas sahamnya dengan proporsi kepemilikan lebih dari 20%.
- Karyawan Bank Indonesia dan Badan/Yayasan/
 Perusahaan yang mewakili kepentingan karyawan
 Bank Indonesia. Dalam pengertian ini antara lain
 Dana Pensiun Bank Indonesia (DAPENBI) dan

3. Recognition of Interest Income

Interest income from the investment of Bank Indonesia's funds is recognized on accrual basis. Accrued interest income that was previously recognized is reversed at the time when the placements are classified as nonperforming.

4. Transactions in Foreign Currencies

Transactions in foreign currencies are recorded in Rupiah using the exchange rate prevailing at the transaction date. For the financial reporting purposes, assets and liabilities in foreign currencies are translated into Rupiah using exchange rates prevailing at the balance sheet date. The differences of amount arising from the periodical translations are recorded at the Exchange Rate Revaluation Reserves account, which is presented on the balance sheet in the Unrealized Gains/Losses in the Equity section, until the foreign exchanges are decreased. Bank Indonesia uses the Net Currency Position (NCP) method in administrating and recording foreign currency assets and liabilities. With this method, the result of the revaluation of foreign currency assets and liabilities is calculated from the multiplication of the net position of the foreign currency assets and liabilities with the difference between the balance sheet exchange rate and average cost of the foreign exchange currencies.

The rates of major foreign exchanges as at December 31, 2010 were IDR8,991.00/USD, IDR11,955.79/ EUR, IDR13,893.80/GBP, IDR13,846.41/SDR, dan IDR11,028.52/JPY100.

5. Related Parties

Related parties of Bank Indonesia are as follows:

- a. Institutions/entities that are controlled or directed by Bank Indonesia. These include among others entities in which Bank Indonesia's ownership is more than 20%.
- b. The employees of Bank Indonesia and entities/ foundations/enterprises that represent interests of the employees of Bank Indonesia. These include among others Bank Indonesia Pension Fund (Dana

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010 Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI).

c. Badan/Lembaga/Yayasan yang didirikan untuk menunjang pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Dalam pengertian ini antara lain Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI).

Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat harga, persyaratan, dan kondisi yang sama dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, diungkapkan dalam Laporan Keuangan.

6. Emas

Emas terdiri dari emas batangan, deposito berjangka emas, dan surat-surat berharga emas yang dinilai secara periodik berdasarkan harga pasar. Selisih karena perubahan harga pasar emas dicatat dalam rekening Cadangan Revaluasi Emas pada pos Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi pada kelompok Ekuitas.

7. Uang Asing

Uang asing disajikan di neraca sebesar nilai nominal.

8. Hak Tarik Khusus

Hak Tarik Khusus atau Special Drawing Rights (SDR) merupakan potensi klaim Indonesia sebagai anggota International Monetary Fund (IMF) atas freely usable currencies (USD, JPY, GBP, EUR) milik negara anggota IMF lain sesama anggota SDR Department, apabila negara anggota tersebut setuju untuk dilakukan konversi. Hak Tarik Khusus disajikan di neraca sebesar nilai nominal ditambah hasil akrualisasi interest on SDR holding dan remuneration yang masih harus diterima dan dikurangi dengan hasil akrualisasi assessment fee dan charges.

9. Giro

Giro Bank Indonesia dalam valuta asing pada bank sentral negara lain atau pada bank komersial di luar negeri disajikan di neraca sebesar nilai nominal. Pensiun Bank Indonesia – DAPENBI) and Bank Indonesia Employees Welfare Foundation (Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia – YKK-BI).

c. Entities/institutions/foundations that are established to support activities of Bank Indonesia. These include among others Indonesian Banking Development Foundation (Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia – YPPI).

All significant transactions with related parties, whether or not made under similar terms and conditions as those conducted with third parties, are disclosed in the financial statements.

6. Gold

Gold consists of gold bars, gold time deposits, and gold marketable securities, which are revalued periodically at fair market values. The differences due to the gold market price changes are recorded in the Gold Revaluation Reserves account in Unrealized Gains/Losses item in the Equity section.

7. Foreign Currencies

Foreign Currencies are presented on the balance sheet at nominal value.

8. Special Drawing Rights

Special Drawing Rights (SDRs) Holding represents a potential claim to International Monetary Fund (IMF) countries on freely usable currencies (USD, JPY, GBP, EUR) owned by other IMF member as SDR Department member when those countries agree to convert. SDR presents in nominal value plus interest accrue on SDR Holding and Remuneration receivable, minus assessment fee and charges accruals.

9. Demand Deposits

Bank Indonesia Demand Deposits in foreign currencies in other central banks or correspondent banks are presented on the balance sheet at nominal value.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010

Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

10. Deposito

Deposito Bank Indonesia dalam valuta asing pada bank di luar negeri disajikan di neraca sebesar nilai nominal ditambah akrualisasi bunga yang masih harus diterima.

11. Surat Berharga

Surat-Surat Berharga (SSB) dalam Rupiah dan dalam valuta asing yang dimiliki oleh Bank Indonesia dikelompokkan berdasarkan tujuan pemilikan, yaitu Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (*Held to Maturity* – HTM) yang disajikan berdasarkan harga perolehan setelah amortisasi premi/diskonto, Diperdagangkan (*Trading*) dan Tersedia untuk Dijual (Available for Sale – AFS) yang disajikan berdasarkan harga pasar. Selisih karena perubahan harga pasar atas SSB Tersedia untuk Dijual dicatat dalam Rekening Cadangan Revaluasi SSB pada pos Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi pada kelompok Ekuitas, sedangkan selisih karena perubahan harga pasar atas SSB Diperdagangkan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian tahun berjalan. Bunga SSB yang masih harus diterima disajikan sebagai bagian dari pos Surat Berharga.

12. Reinvestasi Cash Collateral

Reinvestasi *Cash Collateral* merupakan jaminan berupa *cash* yang diterima oleh Bank Indonesia dari peminjam *(borrower)* yang diinvestasikan kembali melalui agen *Third Party Securities Lending* (TPSL) atas peminjaman SSB milik Bank Indonesia. Reinvestasi *Cash Collateral* disajikan di neraca sebesar nilai reinvestasi yang ditempatkan melalui agen TPSL.

13. Surat Utang Negara Republik Indonesia

Surat Utang Negara terdiri dari:

- a. Surat Perbendaharaan Negara
 Surat Perbendaharaan Negara (SPN) adalah Surat
 Utang Negara dengan jangka waktu sampai
 dengan satu tahun.
- b. Obligasi Negara Obligasi Negara (ON) adalah Surat Utang Negara dengan jangka waktu lebih dari satu tahun.

SPN dan ON Tersedia untuk Dijual yang dimiliki oleh Bank Indonesia disajikan berdasarkan harga pasar. Selisih karena perubahan harga pasar atas SPN dan ON Tersedia untuk Dijual dicatat dalam Rekening Cadangan Revaluasi SSB pada pos Keuntungan atau Kerugian

10. Time Deposits

Bank Indonesia Time Deposits in foreign currencies in correspondent banks are presented on the balance sheet at nominal value added with the accrued interest.

11. Marketable Securities

Marketable Securities (SSB) in Rupiah and foreign currencies are classified based on the purpose of ownership; i.e. Held to Maturity (HTM), which is presented at cost after premium/discount amortization, Trading and Available for Sale (AFS), which are presented at fair market value. The differences due to the market price changes of Available for Sale securities are recorded in the Marketable Securities Revaluation Reserves Account, and presented in Unrealized Gains/Losses item, in the Equity section, while the differences due to the market price changes of Trading securities are recorded as gains or losses for the current year. Accrued interests are presented as a part of the Marketable Securities account.

12. Cash Collateral Reinvestment

Cash Collateral Reinvestment is cash received by Bank Indonesia from borrower of Marketable Securities owned by Bank Indonesia as collateral that is reinvested by the Third Party Securities Lending (TPSL) agent. Cash Collateral Reinvestment is presented on the balance sheet at the reinvested value.

13. Government Bonds

Government Bonds consist of:

- a. Treasury Bills (SPN)
 Treasury Bills are State Debt Securities with up to one-year period.
- b. Marketable Treasury Bonds (ON)
 The marketable treasury bonds are State Debt
 Securities with more than one-year period.

SPN and Available-for-Sale ON are presented at fair market value. The difference due to the market value changes of SPN and Available-for-Sale ON is recorded on Marketable Securities Revaluation Reserves account in Unrealized Gains or Losses item in the Equity

Bank Indonesia 2010 Annual Report 141

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010 Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

yang Belum Direalisasi pada kelompok Ekuitas. Bunga ON yang masih harus diterima disajikan sebagai bagian dari pos Surat Utang Negara Republik Indonesia.

14. Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Repo) terdiri dari surat berharga milik bank yang dijual secara bersyarat kepada Bank Indonesia, dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali disajikan sebesar harga penjualan oleh bank. Selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian kembali oleh bank diakui sebagai penerimaan bunga.

15. Tagihan kepada Pemerintah

Tagihan kepada Pemerintah terdiri dari Surat Utang Pemerintah, Obligasi Negara, dan tagihan lainnya kepada Pemerintah.

a. Surat Utang Pemerintah

Surat Utang Pemerintah adalah surat pengakuan utang jangka panjang Pemerintah kepada Bank Indonesia, yang tidak dapat dipindahtangankan dan/atau diperjualbelikan kepada pihak lain dan pembayaran pokok beserta bunganya sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan. Surat Utang Pemerintah disajikan sebesar nilai surat utang yang belum dilunasi.

b. Obligasi Negara

ON yang termasuk dalam pos ini adalah Surat Utang Negara dengan jangka waktu lebih dari satu tahun yang tidak dapat diperjualbelikan dan disajikan sebesar nilai nominal yang masih outstanding.

c. Tagihan Lainnya kepada Pemerintah

Tagihan Lainnya kepada Pemerintah, termasuk bunga atas tagihan kepada Pemerintah, disajikan di neraca sebesar jumlah tagihan yang belum dilunasi oleh Pemerintah.

16. Tagihan kepada Bank

Tagihan kepada Bank disajikan di neraca sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh bank ditambah bunga yang masih harus diterima. section. The accrued interests of SPN and Availablefor-Sale ON are presented as a part of Government Bonds item

14. Securities Purchased Under Resale Agreements

Securities Purchased under Resale Agreements are securities owned by banks that are sold to Bank Indonesia with an agreement to repurchase under a specific price and terms. These securities are presented at their selling price. The differences between the selling price and the repurchase price are recognized as interest income.

15. Claims on Government

Claims on Government consist of State Debt Securities (Surat Utang Pemerintah – SUP), Government Bonds (Obligasi Negara – ON), and other claims on government.

a. State Debt Securities

State Debt Securities are long-term bonds issued by the Government to Bank Indonesia which are non-transferable and non-marketable, with regulated payment schedule of outstanding value and interest. State Debt Securities are presented at their outstanding nominal value.

b. Government Bonds

Government Bonds in this item are long-term bonds issued by the Government to Bank Indonesia which are non-transferable and non-marketable, and presented at their outstanding nominal value.

c. Other Claims on Government

Other claims on Government, including interest claims, are presented on the balance sheet at the outstanding value of the claims.

16. Claims on Banks

Claims on Banks are presented on the balance sheet at the outstanding value plus accrued interests.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010

Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

17. Tagihan kepada Lainnya

Tagihan kepada Lainnya antara lain terdiri dari tagihan kepada Bank Beku Operasi/Bank Beku Kegiatan Usaha (BBO/BBKU), pemberian kredit *channeling*, serta sisa kredit program, yang disajikan di neraca sebesar jumlah bruto yang belum dilunasi nasabah.

18. Penyertaan

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, Bank Indonesia dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Penyertaan dengan kepemilikan saham kurang dari 20% disajikan sebesar harga perolehan (cost), sedangkan penyertaan dengan kepemilikan saham sebesar 20% ke atas disajikan sebesar harga perolehan ditambah bagian laba atau rugi dari perusahaan anak setelah penyertaan tersebut dilakukan.

Penyertaan yang dilakukan sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, harus didivestasi selambat-lambatnya Januari tahun 2009, sehingga penyertaan dengan kepemilikan saham sebesar 20% ke atas disajikan sebesar harga perolehan dan tidak dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Bank Indonesia.

Apabila terdapat penurunan nilai secara permanen, maka nilai tercatat penyertaan harus disesuaikan sebesar nilai penurunan permanen tersebut.

19. Aktiva Tetap/Aktiva Tidak Berwujud

Aktiva Tetap/Aktiva Tidak Berwujud disajikan di Neraca pada pos Aktiva Lain-lain sebesar nilai perolehan aktiva tetap/aktiva tidak berwujud dikurangi akumulasi penyusutan/amortisasi.

17. Claims on Others

Claims on Others, which include other claims on Operation-Suspended Banks (Bank Beku Operasi – BBO) and Business-Activity-Suspended Banks (Bank Beku Kegiatan Usaha - BBKU), channeling credits, and remaining program credits, are presented on the balance sheet at the outstanding value.

18. Equity Participation

In accordance with Act of the Republic of Indonesia Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia as amended by Act of the Republic of Indonesia Number 6 of 2009 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Act Number 2 of 2008 concerning Second Amendment of Act Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia as an Act, Bank Indonesia may conduct an equity participation in legal entities or other entities deemed necessary in the implementation of the tasks of Bank Indonesia.

Equity participation with less than 20 percent ownership is presented at cost; meanwhile equity participation with the ownership more than 20 percent is presented at cost price added by profit or loss of the subsidiary company subsequent to the equity participation.

Equity participation conducted by Bank Indonesia before the enactment of Act of the Republic of Indonesia Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia as amended by Act of the Republic of Indonesia Number 6 of 2009 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Act Number 2 of 2008 concerning Second Amendment of Act Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia as an Act should be divested before January 2009; therefore, such kind of equity participation is not consolidated in the Financial Statements of Bank Indonesia.

In case of permanent impairment in the value of equity participation, the recorded value of equity participation is adjusted accordingly.

19. Fixed Assets/Intangible Assets

Fixed Assets/Intangible Assets are presented on the balance sheet as part of other assets at cost less accumulated depreciation.

142 Bank Indonesia 2010 Annual Report 143

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010 Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

Aktiva Tetap/Aktiva Tidak Berwujud disusutkan/ diamortisasi berdasarkan taksiran masa manfaat aktiva yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus.

Bank Indonesia telah melakukan penyesuaian kembali atas nilai aktiva tetap pada tahun 2000. Aktiva tetap yang telah disesuaikan kembali tersebut disajikan sebesar nilai revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai perolehan aktiva tetap disajikan di Neraca pada pos Modal dalam kelompok Ekuitas.

20. Imbalan Kerja

Bank Indonesia membentuk cadangan atas imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja dari pegawai yang telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan. Bank Indonesia memiliki program pensiun manfaat pasti yang didanai melalui pembayaran kepada DAPENBI dan program Bantuan Pemilikan Rumah (Baperum) serta Bantuan Kesehatan Pensiunan (BKP) yang didanai melalui pembayaran kepada YKKBI. Jumlah biaya dan kewajiban imbalan kerja tersebut ditentukan oleh perhitungan aktuaris independen, yang dilakukan secara berkala.

Biaya dan kewajiban imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing program dengan menggunakan metode penilaian aktuaris *projected unit credit*.

21. Penyisihan Aktiva

Bank Indonesia membentuk penyisihan aktiva secara gabungan atas tagihan, penanaman dana, dan aktiva lainnya baik dalam Rupiah maupun valuta asing, sehingga aktiva tersebut disajikan secara wajar. Penetapan persentase penyisihan aktiva dilakukan berdasarkan tingkat risiko yang melekat pada masingmasing aktiva tersebut yang tercermin antara lain dari rating penanaman dana, kondisi keuangan peminjam, kelancaran pembayaran pada masa lampau, peringkat komposit bank, hubungan, dan kesepakatan antara Bank Indonesia dengan peminjam dan faktor-faktor relevan lainnya.

22. Uang dalam Peredaran

Uang dalam Peredaran disajikan sebagai komponen kewajiban sebesar nilai nominal jumlah uang kertas dan uang logam yang telah dinyatakan sebagai alat Fixed Assets/Intangible Assets are depreciated through their economic life by using straight-line method.

Bank Indonesia revalued its fixed assets in 2000. Revalued fixed assets are stated at revalued amount (market price or fair value) less accumulated depreciation. The differences between the revaluation values and the book values of fixed assets are presented on the balance sheet in the Capital item under Equity section.

20. Employee Benefits

Bank Indonesia provides an allowance for longterm benefits and post-employment benefits for the employees who have rendered their services and are entitled to accept the future benefits. Bank Indonesia develops the defined benefit plan, which is funded through contribution to Bank Indonesia Pension Fund (Dana Pensiun Bank Indonesia), and Housing Loan (Baperum) as well as Pension Health Facilities (BKP) which are funded through contribution to YKKBI. The amount of contribution and benefit liabilities are calculated periodically by an independent actuary.

The costs and liabilities of employee benefits are determined separately for each plan by using projected unit credit actuary method.

21. Allowance for Bad Debts

Bank Indonesia provides a combined allowance for bad debts, including allowance for claims, placements, and other assets, in order to present the assets fairly. The allowance percentage is decided by considering the inherent rate of risk in each particular asset, which are reflected by some factors e.g. investment rating, debtors' financial position, performance of prior payment, bank's composite grade, relationship and agreement between Bank Indonesia and debtors, and other relevant factors.

22. Currency in Circulation

Currency in circulation is presented as liabilities at total nominal value of bank notes and coins that has been declared as legal tender by Bank Indonesia and is not

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010

pembayaran yang sah oleh Bank Indonesia dan tidak berada dalam penguasaan Bank Indonesia.

23. Giro

Giro atau simpanan pihak lain pada Bank Indonesia baik dalam Rupiah maupun dalam Valuta Asing yang disajikan sebesar nilai nominal.

24. Sertifikat Bank Indonesia

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. SBI disajikan di neraca sebesar nilai nominal dikurangi diskonto dibayar di muka.

25. Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS disajikan sebesar nilai nominal. Imbalan bonus SBIS dicatat secara *cash basis*.

26. Penempatan Berjangka (Term Deposit)

Merupakan penempatan dana rupiah milik peserta Operasi Moneter secara berjangka di Bank Indonesia (*Term Deposit*). Penempatan Berjangka disajikan sebesar nilai nominal dikurangi diskonto.

27. Penempatan Dana (Deposit Facility)

Merupakan penempatan dana rupiah oleh bank di Bank Indonesia (*Deposit Facility*). Penempatan Dana disajikan sebesar nilai nominal dikurangi diskonto.

28. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) adalah fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada Bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam rangka standing facility Syariah. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah disajikan sebesar nilai nominal. Imbalan bonus Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dicatat secara cash basis.

Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

under the possession of Bank Indonesia.

23. Demand Deposits

Demand deposits of other parties in Bank Indonesia consist of demand deposits in Rupiah and demand deposits in foreign currencies, which are presented at nominal value.

24. Bank Indonesia Certificates

Bank Indonesia Certificates (Sertifikat Bank Indonesia – SBI) are securities in Rupiah that are issued by Bank Indonesia to recognize short-term payables. SBI's are presented on the balance sheet at nominal value deducted by a discount paid in advance.

25. Bank Indonesia Sharia Certificates

Bank Indonesia Sharia Certificates (Sertifikat Bank Indonesia Syariah – SBIS) are short-term certificates issued by Bank Indonesia based on sharia principle in Rupiah. SBIS's are presented at nominal value. SBIS's bonuses are recorded at cash basis.

26. Term Deposits

Term Deposit is one of the Open Market Operation instruments where Monetary Operation participants place their funds in Bank Indonesia in certain period of time decided by Bank Indonesia. Term Deposit is presented at nominal value deducted by discount.

27. Deposit Facilities

Deposit Facilities are the facilities given to banks to place their funds in Bank Indonesia for an overnight period of time. Deposit Facilities presented at nominal value deducted by discount.

28. Bank Indonesia Deposit Facilities

Bank Indonesia Deposit Facilities (FASBIS) are deposit facilities provided by Bank Indonesia to the Banks for placing funds in Bank Indonesia in the framework of the Sharia standing facilities. FASBIS are presented at nominal value. FASBIS' bonuses are recorded on cash basis.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010 Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

29. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali adalah surat berharga milik Bank Indonesia yang dibeli secara bersyarat oleh bank, dengan kewajiban penjualan kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali disajikan sebesar harga pembelian oleh bank. Selisih antara harga pembelian dengan harga penjualan kembali oleh bank diakui sebagai pengeluaran bunga.

30. Pinjaman dari Pemerintah

Pinjaman dari Pemerintah antara lain terdiri dari pinjaman dalam rangka program *Two Step Loan* (TSL) dalam Rupiah dan obligasi Pemerintah dalam valuta asing yang disajikan di neraca sebesar nilai yang belum ditarik oleh Pemerintah setelah dikurangi amortisasi diskonto.

31. Pinjaman Luar Negeri

Pinjaman luar negeri atau fasilitas pinjaman yang diterima Bank Indonesia dari pihak lain di luar negeri dalam valuta asing disajikan sebesar nilai nominal yang belum dilunasi setelah memperhitungkan bunga yang masih harus dibayar.

32. Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi

Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi merupakan penyajian atas pengakuan hasil revaluasi surat berharga, hasil penjabaran aktiva dan pasiva valuta asing ke dalam nilai Rupiah, dan hasil revaluasi aktiva lainnya.

33. Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Bank Indonesia merupakan subyek pajak. Oleh karena itu, surplus (defisit) Bank Indonesia merupakan obyek Pajak Penghasilan (PPh).

Bank Indonesia untuk tahun 2009 telah mengadopsi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Berdasarkan PSAK 46, pajak penghasilan dihitung berdasarkan surplus (defisit) akuntansi.

Pengaturan pengenaan PPh Bank Indonesia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010

29. Securities Sold Under Repurchase Agreements

Securities Sold under Repurchase Agreements are Bank Indonesia Certificates and/or securities owned by BI that are purchased by banks with an agreement to resale under a specific price and terms. These securities are presented at cost. The differences between the purchase price and the reselling price are recognized as interest expense.

30. Loans from Government

Loans from Government consist of loans due to Two Step Loan in Rupiah and Government obligation in foreign currencies, which are presented at the outstanding amount after discount amortization.

31. Foreign Borrowings

Foreign borrowings or loan facilities received by Bank Indonesia from foreign parties in foreign currencies are presented at the outstanding amount after calculation of accrued interest.

32. Unrealized Gains/Losses

Unrealized Gains/Losses present the recognition of securities revaluation, translation of assets and liabilities in foreign exchange into Rupiah, and other assets revaluation.

33. Taxation

In accordance with Act of the Republic of Indonesia Number 36 of 2008, Bank Indonesia is a Tax Subject. Therefore, Bank Indonesia's surplus (deficit) is an object of Income Tax (Pajak Panghasilan – PPh).

Starting 2009, Bank Indonesia has adopted PSAK Number 46 concerning Accounting of Income Tax. Based on PSAK 46, income tax is calculated based on the accounting surplus (deficit).

Regulation for Bank Indonesia Income tax is furthermore in accordance with Government Legislature Number

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010

Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan khususnya pasal 7:

- Surplus Bank Indonesia yang merupakan obyek pajak penghasilan adalah surplus Bank Indonesia menurut laporan keuangan audit setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan undang undang pajak penghasilan dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia.
- Ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pembayaran pajak penghasilan atas surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam penjelasan pasal 7 disebutkan bahwa karakteristik Bank Indonesia terkait surplus Bank Indonesia antara lain selisih kurs, penyisihan aktiva, dan penyusutan aktiva tetap.

Pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan atas surplus Bank Indonesia diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/103/INTERN tanggal 31 Desember 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Penghasilan Bank Indonesia.

Pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebesar jumlah pajak terutang (restitusi pajak), yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak (peraturan pajak) yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aktiva dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca.

Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aktiva dan kewajiban untuk pelaporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan Metode Aktiva dan Kewajiban (Asset and Liability Method). Metode ini juga mengatur untuk mengakui manfaat pajak tangguhan atas kompensasi rugi fiskal.

Aktiva pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan jumlah surplus fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dapat dikompensasi dengan aktiva pajak tangguhan yang diakui tersebut.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan atau banding, pada saat keputusan atas keberatan atau banding tersebut telah ditetapkan.

94 of 2010 concerning Calculation and Redemption of Income Tax year to date specifically on article 7:

- 1) Bank Indonesia's surplus object of income tax is a BI's surplus according to audited financial statements after adjustment or fiscal correction based on income tax regulation adapted to BI's characteristic.
- 2) Procedures of calculating and paying income tax applied to BI's surplus as stated on paragraph (1) is regulated in Minister of Finance regulation

Article 7 explains that BI's characteristics related to surplus consist of exchange rate differences, allowance for bad debts, and fixed assets depreciation.

Implementation of Income tax for Bank Indonesia's surplus is internally regulated in Bank Indonesia Circular Letter number 11/103/INTERN dated December 31, 2009 concerning Guidance for Bank Indonesia's Income Tax Procedures.

The current tax for the current periode and the previous period is the amount of tax owed (tax restitution), that is calculated using the tax rate (according to the tax law) valid or substantially valid on the balance sheet date.

Deferred tax is calculated using the tax rate that will be valid when the asset is recovered or the liability is paid using the tax rate (according to the tax law) valid or substantially valid on the balance sheet date.

All temporary differences between values of assets and liabilities in financial reporting and values in tax imposition basis are recognized as deferred tax using the Asset and Liability Method. This method also regulates the recognition of income on deferred tax from fiscal loss compensation.

Deferred tax assets are recognized if there is a reasonable possibility that the amount of fiscal surplus in the future will be enough to be compensated with the deferred tax asset recognized.

A correction on tax liabilities is recognized when Tax Imposition Letter is received or if Bank Indonesia raises an objection or appeal, at the time a decision is made on the objection or appeal.

146 Bank Indonesia 2010 Annual Report 147

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010 Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

- C. PENJELASAN POS-POS NERACA, LAPORAN SURPLUS DEFISIT, DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DAN RASIO MODAL
- 1. Penyajian Kembali Laporan Keuangan Tahun 2009

Bank Indonesia menyajikan kembali informasi komparatif untuk periode sebelumnya sebagai berikut:

- C. NOTES TO BALANCE SHEETS, SURPLUS DEFICIT STATEMENTS AND STATEMENT OF CHANGES IN EQUITIES
- 1. Reclassification of 2009 Financial Statements

Bank Indonesia has reclassified its comparative information for the previous period as follows:

31 Desember 2009 December 31, 2009

Sebagaimana dilaporkan sebelumnya
As previously reported

Disajikan kembali Reclassified

Pos	Rp juta	Pos	Pos	Rp juta	Pos
Item	IDR Millions	Item	Item	IDR Millions	Item
Aktiva:		Assets:			
Tagihan kepada Bank	10.509.684	Claims on Banks	Tagihan kepada Bank	11.623.482	Claims on Banks
Tagihan kepada Lainnya	8.581.861	Claims on Others	Tagihan kepada Lainnya	7.468.063	Claims on Others
Kewajiban:		Liabilities:			
Giro Pemerintah	54.441.137	Government Demand Deposits	Giro Pemerintah	53.673.314	Government Demand Deposit
Fasilitas Simpanan Bank	82.375.461	Bank Indonesia Deposit	Penempatan Berjangka	49.367.267	Term Deposits
Indonesia		Facilities	Penempatan Dana	33.008.194	Deposit Facilities
Kewajiban Lain-lain	33.605.133	Other Liabilities	Kewajiban Lain-lain	34.372.956	Other Liabilities
Surplus Defisit:		Surplus Defisit:			
Penerimaan Pengelolaan	28.205.251	Monetary Operation	Penerimaan Pengelolaan	28.177.865	Monetary Operation
Moneter		Revenues	Moneter		Revenues
Penerimaan Pengelolaan	25.571.044	Revenues from Foreign	Penerimaan Pengelolaan	19.027.557	Revenues from Foreign
Devisa		Reserves Management	Devisa		Reserves Management
			Selisih Kurs karena Transaksi Valuta Asing	6.543.487	Exchange Differences
Penerimaan Kegiatan	168.916	Revenues from Money	Penerimaan Kegiatan Pasar	2.055.188	Revenues from Money
Pasar Uang		Market Activities	Uang		Market Activities
Penerimaan Pemberian	2.465.291	Revenues from Credit	Penerimaan Pemberian	551.633	Revenues from Credit
Kredit dan Pembiayaan		and Financing	Kredit dan Pembiayaan		and Financing
Pengawasan Perbankan	203.745	Revenues from Banking Regulations and Supervision	Penerimaan Lainnya	1.293.635	Other Revenues
Penerimaan Lainnya	1.062.504	Other Revenues			
Beban Penyelenggaraan	4.022.737	Payment System	Beban Penyelenggaraan	2.173.722	Payment System Operation.
Sistem Pembayaran	1.022.737	Operations Expenses	Sistem Pembayaran	2.173.722	Expenses
Beban Penyelenggaraan	2.119.095	Currency Circulation	Beban Penyelenggaraan	2.162.634	Currency Circulation
Sistem Pembayaran Tunai		Expenses	Sistem Pembayaran Tunai		Expenses
Beban Penyelenggaraan	1.903.642	Payment System Services	Beban Jasa Giro Pemerintah	1.849.015	Interest Expenses on
Sistem Pembayaran Non		Expenses	Beban Penyelenggaraan		Government Accounts
Tunai		2.16 01.000	Sistem Pembayaran Non	11.088	Payment System Services
			Tunai		Expenses
Beban SDM dan Logistik	4.095.218	Human Resources and Logistic Expenses	Beban SDM dan Logistik	4.106.700	Human Resources and Logistic Expenses
Beban Lainnya	76.747	Other Expenses	Beban Lainnya	65.265	Other Expenses

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010 Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

Penyajian kembali tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyajian kembali pos Tagihan Kepada Bank dan pos Tagihan Kepada Lainnya karena adanya tagihan yang sebelumnya dicatat sebagai Tagihan Kepada Lainnya menjadi Tagihan Kepada Bank sebesar Rp1.113.798 juta. Hal ini terkait dengan pemberian KLBI pola executing oleh Bank Indonesia kepada bank.
- b. Penyajian kembali atas Giro Pemerintah dan Kewajiban Lain-lain karena adanya kewajiban yang sebelumnya dicatat sebagai Giro Pemerintah menjadi Kewajiban Lain-lain sebesar Rp767.823 juta. Hal ini terkait dengan dana dalam escrow account yang peruntukannya untuk pembayaran subsidi bunga yang menjadi bagian Pemerintah.
- c. Penyajian kembali pos Fasilitas Simpanan Bank Indonesia menjadi pos Penempatan Berjangka (*Term Deposit*) dan pos Penempatan Dana (*Deposit Facility*) karena adanya perubahan ketentuan mengenai Operasi Moneter, sesuai PBI Nomor 12/11/PBI/2010 tanggal 2 Juli 2010 mengenai Operasi Moneter.
- d. Penyajian kembali atas pos-pos Surplus Defisit karena adanya penyesuaian format dan reklasifikasi akun-akun dalam Laporan Surplus Defisit.

2. Emas

Saldo emas per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing TOZ2,347,046.3100 atau setara dengan Rp29.759.509 juta dan TOZ2,347,046.3100 atau setara dengan Rp24.356.708 juta.

Nilai emas disajikan berdasarkan harga emas terkini yang tersedia di pasar London pada tanggal 31 Desember 2010, yaitu sebesar USD1,410.25/TOZ.

3. Uang Asing

Saldo uang asing per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing setara dengan Rp9.482 juta dan Rp7.508 juta dengan rincian sebagai berikut: Reclassification was due to the following matters:

- a. Claims on Banks and Claims on Others were reclassified since previous claims were recorded as Claims on Others to be Claims on Banks of IDR1,113,798 million. Claims related with presenting of Bank Indonesia Liquidity Credit (KLBI) executing pattern to bank.
- b. Government Demand Deposits and and Other Liabilities were reclassified since previous liabilities that were previously recorded as Government Demand Deposits to be Other Liabilities of IDR767,823 million. It was related with escrow account for interest subsidy paid by the Government.
- c. Bank Indonesia Deposit Fasilities were reclassified to be Term Deposits and Deposit Facilities as the result of amendment of Bank Indonesia Regulation Number 12/11/PBI/2010 dated July 2, 2010 concerning Monetary Operation.
- d. Surplus Deficit items were reclassified due to format adjustment and accounts reclassification of Surplus Deficit Statements.

2. Gold

The balance of gold as at December 31, 2010 and as at December 31, 2009 was TOZ2,347,046.3100 or equivalent to IDR29,759,509 million and TOZ2,347,046.3100 or equivalent to IDR24,356,708 million, respectively.

The value of gold was presented based on gold current market price available in London market at December 31, 2010, which was USD 1,410.25/TOZ.

3. Foreign Currencies

The balances of foreign currencies as at December 31, 2010 and December 31, 2009 were equal to IDR9,482 million and IDR7,508 million respectively, with details as follows:

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010 Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

	31 Desember 2010 December 31, 2010		31 Desember 2009 December 31, 2009		
	Valas OCY	Rp juta IDR millions	Valas OCY	Rp juta IDR millions	
Jang Asing dalam					Foreign currencies in
persediaan: JSD	1,051,886.23	9.458	797,013.94	7.492	vault consist of: USD
PY	136,799.00	15	111,899.00	11	JPY
GBP	635.24	9	165.29	3	GBP
GD .	45.76	0	323.62	2	SGD

4. Hak Tarik Khusus

Hak Tarik Khusus atau *Special Drawing Rights* (SDR) merupakan potensi klaim Indonesia sebagai anggota IMF atas *freely usable currencies* (USD, JPY, GBP, EUR) milik negara anggota IMF lain sesama anggota SDR *Department*, apabila negara anggota tersebut setuju untuk dilakukan konversi.

Hak Tarik Khusus diperhitungkan sebagai cadangan devisa. Saldo Hak Tarik Khusus berasal dari alokasi SDR dan bertambah jika terdapat penambahan alokasi SDR, pembelian SDR, serta penerimaan dalam SDR seperti interest on SDR holding, remuneration, dan refund of charges. Saldo Hak Tarik Khusus berkurang jika terdapat pembayaran dalam SDR seperti commitment fee, service charges, periodic charges, charges alokasi SDR, dan assessment fee. Alokasi SDR dijelaskan dalam Catatan C.29.

Saldo Hak Tarik Khusus per 31 Desember 2010 sebesar SDR1,762,096,220.00 atau setara dengan Rp24.398.707 juta dan per 31 Desember 2009 sebesar SDR1,762,427,354.00 atau setara dengan Rp25.877.210 juta.

4. Special Drawing Rights (SDR)

Special Drawing Rights is a potential claim due to Bank Indonesia membership in the IMF for freely usable currencies (USD, JPY, GBP, EUR) owned by other member of IMF, if other IMF member countries agree with the conversion.

SDR is part of foreign exchange reserves. SDR balance is derived from SDR allocation. Its increase is due to addition of SDR allocation, purchase of SDR and income in SDR such as interest on SDR holding, remuneration and refund of charges. The balance decreases due to various payments in SDR such as commitment fee, service charges, periodic charges, SDR allocation charges and assessment fee. SDR allocation is explained in Note C.29.

The balance of SDR as at December 31, 2010 was SDR1,762,096,220.00 or equivalent to IDR 24,398,707 million and as at December 31, 2009 was SDR1,762,427,354.00 or equivalent to IDR25,877,210 million.

	31 Desember 2010 December 31, 2010	31 Desember 2009 December 31, 2009	
	Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions	
Hak Tarik Khusus	24.400.038	25.879.507	SDR
Penerimaan YMH Diterima	15.535	10.983	Acrrued Income
Biaya YMH Dibayar	(16.866)	(13.280)	Payments due
	24.398.707	25.877.210	

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010 Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

5. Giro

Jumlah giro valuta asing Bank Indonesia yang disimpan pada bank sentral dan bank komersial di luar negeri per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing setara dengan Rp11.840.208 juta dan Rp28.970.875 juta dengan rincian sebagai berikut:

5. Demand Deposits

Demand deposits in foreign currencies in central banks and overseas correspondent banks as at December 31, 2010 and December 31, 2009 amounted to IDR11,840,208 million and IDR28,970,875 million, respectively, with details as follows:

		Desember 2010 Ember 31, 2010	31 Desember 2009 December 31, 2009	
	Valas OCY			
	Bank Sentral Central Banks	Bank Komersial Correspondent Banks	Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions
USD	814,067,410.48	14,617,272.16	7.450.704	21.179.446
JPY	4,199,110,728.00	17,605,060,711.00	2.404.677	5.781.734
EUR	43,729,145.52	959,790.05	534.292	832.362
GBP	30,512,975.15	1,225,958.86	440.974	448.253
Valas lainnya Other Foreign			1.009.561	729.080
Currency				
			11.840.208	28.970.875

Di antara saldo giro pada bank sentral tersebut, terdapat giro yang ditempatkan pada *Repo & Overnight*, antara lain oleh Federal Reserve Bank of New York, New York, dan Bank of Japan, Tokyo, masing-masing sebesar USD812,900,000.00 atau setara dengan Rp7.308.784 juta, dan sebesar JPY4,195,933,278 atau setara dengan Rp462.749 juta. Pendapatan atas *Repo & Overnight* tersebut diakui pada saat jatuh tempo.

6. Deposito

Saldo deposito dalam valuta asing per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing setara dengan Rp30.918.204 juta dan Rp2.831.219 juta dengan rincian sebagai berikut:

The demand deposit in central banks including placements in Repo and Overnight, among them in the Federal Reserve Bank of New York, New York and Bank of Japan, Tokyo amounted to USD812,900,000.00 or equivalent to IDR7,308,784 million, and JPY4,195,933,278 or equivalent to IDR462,749 million. Income from Repo & Overnight was recognized on the due date.

6. Time Deposits

The balances of time deposits in foreign currencies as at December 31, 2010 and December 31, 2009 were IDR30,918,204 million and IDR2,831,219 million respectively, with details as follows:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010 Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

		sember 2010 aber 31, 2010		mber 2009 er 31, 2009	
	Valas <i>OCY</i>	Rp juta IDR millions	Valas <i>OCY</i>	Rp juta IDR millions	
Bank Komersial:					Commercial Bank:
USD	1,922,000,000.00	17,280,702	0.00	0	USD
AUD	370,000,000.00	3,382,729	20,000,000.00	168.636	AUD
NZD	1,411,000,000.00	9,788,770	325,500,000.00	2.221.039	NZD
		30,452,201		2.389.675	
Deposito Khusus :					Special Time Deposits :
IMF PRGF (SDR)	25,000,000.00	346,160	25,000,000.00	367.068	IMF PRGF (SDR)
IMF <i>Trust for Special</i> PRGF (SDR)	4,850,030.00	67,156	4,850,030.00	71.211	IMF Trust for Special PRGF (SDR)
		413,316		438.279	
Bunga Deposito yang Masih Harus Diterima		52,687		3.265	Accrued Interest
Total Deposito		30,918,204		2.831.219	Total Time Deposits

- a. Deposito khusus pada IMF merupakan *Poverty Reduction and Growth Facility* (PRGF) pada IMF per tanggal 31 Desember 2010 sebesar SDR25,000,000.00 atau setara dengan Rp346.160 juta dan pada tanggal 31 Desember 2009 setara dengan Rp367.068 juta.
- b. Deposito khusus lainnya pada IMF merupakan *Trust for Special* PRGF *Operations for the Heavily Indebted Poor Countries* (HIPC) and *PRGF Subsidy Operations ("the Trust")* sebesar SDR4,850,030.00 atau setara dengan Rp67.156 juta pada tanggal 31 Desember 2010 dan setara Rp71.211 juta pada tanggal 31 Desember 2009.

Adapun jangka waktu dan kisaran tingkat suku bunga rata-rata deposito tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Special time deposits in IMF was Poverty Reduction and Growth Facilities (PRGF) on IMF amounted to SDR25,000,000.00 or equivalent to IDR346,160 million as at December 31, 2010 and equivalent to IDR367,068 million as at December 31, 2009.
- b. Other special time deposits in IMF were Trust for Special PRGF Operations for the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) and Interim PRGF Subsidy Operations ("the Trust") amounted to SDR4,850,030.00 or equivalent to IDR67,156 million as at December 31, 2010 and equivalent to IDR71,211 million as at December 31, 2009.

The period and average interest rate range of the time deposits were as follows:

	31 Desember 2010 December 31, 2010 Rp juta IDR millions	31 Desember 2009 December 31, 2009 Rp juta IDR millions	
a. Deposito pada bank koresponden			a. Time Deposits in correspondent banks
- Kurang dari 1 bulan	2.697.300	2.389.675	- less than 1 month
- 1- 3 bulan	15.935.360	0	- 1- 3 month
- Lebih dari 3 bulan	11.819.541	0	- more than 3 months
b. Deposito khusus			b. Special Time Deposits
- Kurang dari 1 bulan	0	0	- less than 1 month
- 1- 3 bulan	0	0	- 1- 3 month
- Lebih dari 3 bulan	413.316	438.279	- more than 3 months
	30.865.517	2.827.954	

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010 Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

	31 Desember 2010 December 31, 2010 Bunga Setahun Interest p.a	31 Desember 2009 December 31, 2009 Bunga Setahun Interest p.a	
Kisaran tingkat suku bunga setahun			Interest rate range
a. USD			a. USD
- Kurang dari 1 bulan	0,24%	-	- less than 1 month
- 1- 3 bulan	0,28%	-	- 1- 3 month
- Lebih dari 3 bulan	0,27%	-	- more than 3 months
b. AUD			b. AUD
- Kurang dari 1 bulan	-	3,40%	- less than 1 month
- 1- 3 bulan	4,70%	-	- 1- 3 month
- Lebih dari 3 bulan	4,53%	-	- more than 3 months
a. NZD			c. NZD
- Kurang dari 1 bulan	-	2,53%	- less than 1 month
- 1- 3 bulan	3,05%	-	- 1- 3 month
- Lebih dari 3 bulan	3,03%	-	- more than 3 months
b. SDR			d. SDR
- Kurang dari 1 bulan	-	-	- less than 1 month
- 1- 3 bulan	-	-	- 1- 3 month
- Lebih dari 3 bulan	0,29%	0,40%	- more than 3 months

7. Surat Berharga

Surat-Surat Berharga (SSB) yang dimiliki oleh Bank Indonesia saat ini adalah SSB dalam valas yang saldonya per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing setara dengan Rp766.098.413 juta dan Rp538.378.349 juta dengan rincian sebagai berikut:

31 Desember 2010 December 31, 2010

7. Marketable Securities

Marketable securities owned by Bank Indonesia were in foreign currency with a balance at December 31, 2010 and December 31, 2009 of IDR766,098,413 million and IDR538,378,349 million, respectively, with details as follows:

31 Desember 2009 *December 31, 2009*

	Harga Perolehan (setelah amortisasi premi/diskonto) Acquisition cost (after premium/discount amortization)	Hasil Revaluasi Revaluation	Harga Pasar dan Bunga Yang Masih Harus Diterima Fair value and Accrued Interest	Harga Perolehan (setelah amortisasi premi/diskonto) Acquisition cost (after premium/discount amortization)	Hasil Revaluasi Revaluation	Harga Pasar dan Bunga Yang Masih Harus Diterima Fair value and Accrued Interest
			Rp juta IDR million	95		
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Held to Maturity Tersedia Untuk Dijual Available for Sale:	72.994.091	-	72.994.091	70.850.560	-	70.850.560
Portofolio BI BI Portfolio External Portfolio Manager:	665.503.715	4.137.575	669.641.290	441.127.779	8.414.778	449.542.557
- Counterparty	10.506.591	250.423	10.757.014	6.656.078	152.526	6.808.604
- Asian Bond Fund	1.348.650	624.959	1.973.609	1.410.000	486.025	1.896.025
 Automatic Investment 	5.847.295	1.311	5.848.606	4.679.360	621	4.679.981
Bunga Yang Masih Harus Diterim Accrued Interest	na		4.883.803			4.600.622
	756.200.342		766.098.413	524.723.777		538.378.349

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010 Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

SSB ini merupakan penempatan dalam denominasi valuta asing terutama USD, GBP, EUR, AUD, NZD, dan JPY.

Untuk SSB Dimiliki Hingga Jatuh Tempo per 31 Desember 2010 sebesar Rp72.994.091 juta, terdiri dari: 1) sebesar Rp15.740.476 juta akan jatuh tempo dalam periode kurang dari satu tahun; 2) sebesar Rp50.175.052 juta akan jatuh tempo dalam periode antara 1-5 tahun; dan 3) sebesar Rp7.078.563 juta akan jatuh tempo dalam periode antara 5-10 tahun. Dalam SSB HTM tersebut termasuk penempatan pada *Third Party Securities Lending* (TPSL) sebesar Rp32.165.252 juta. Atas penempatan tersebut, Bank Indonesia menerima *collateral* dalam bentuk *cash* sebesar Rp19.683.577 juta sebagaimana dijelaskan pada C.29 dan dalam bentuk SSB (non cash) sebesar Rp14.924.763 juta yang ditatausahakan secara *extra countable*.

Untuk SSB Tersedia untuk Dijual kategori Portofolio Bank Indonesia dan *Automatic Investment*, per 31 Desember 2010 sebesar Rp675.489.896 juta, terdiri dari: 1) sebesar Rp247.514.789 juta akan jatuh tempo dalam periode kurang dari satu tahun; 2) sebesar Rp287.033.202 juta akan jatuh tempo dalam periode antara 1-5 tahun; dan 3) sebesar Rp140.941.905 juta akan jatuh tempo dalam periode 5-10 tahun.

8. Reinvestasi Cash Collateral

Saldo reinvestasi *cash collateral* yang berasal dari *cash collateral* program *Third Party Securities Lending* (TPSL) per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp19.683.577 juta dan Rp0 juta.

9. Surat Utang Negara Republik Indonesia

Saldo Surat Utang Negara Republik Indonesia per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masingmasing adalah sebesar Rp27.479.241 juta dan Rp25.353.627 juta dengan rincian sebagai berikut Marketable securities are placements denominated in foreign currencies, predominantly in USD, GBP, EUR, AUD, NZD, dan JPY.

Among Held-to-Maturity securities outstanding as at December 31, 2010 amounted to IDR72,994,091 million, consisted of: 1) IDR15,740,476 million would be due within 1 year; 2) IDR50,175,052 million would be due within 1 to 5 years; 3) IDR7,078,563 million would be due within 5 to 10 years. Included in Held-to-Maturity securities was Third Party Securities Lending (TPSL) amounted IDR32,165,252 million. For the TPSL deal, Bank Indonesia received cash collateral of IDR19,683,577 million as explained in note C.29 and extra countable securities collateral equaled to IDR14,924,763 million.

Among Available for Sale securities categorized in BI Portfolio and Automatic Investment, as at December 31, 2010 amounted to IDR675,489,896 million, consist of: 1) IDR247,514,789 million would be due within 1 year; 2) IDR287,033,202 million would be due within 1 to 5 years; and 3) IDR140,941,905 million would be due within 5 to 10 years.

8. Cash Collateral Reinvestment

Cash Collateral of Marketable Securities involved at Third Party Securities Lending program being reinvested as at December 31, 2010 and December 31, 2009 were IDR19,683,577 million and IDR0 million, respectively

9. Government Bonds

The balances of Government Bonds as at December 31, 2010 and December 31, 2009 were IDR27,479,241 million and IDR25,353,627 million, respectively, with details as follows:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010

Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

a. Obligasi Negara Marketable Treasury Bonds

		31 Desember 2010 December 31, 2010		31 Desember 2009 December 31, 2009		
	Harga Perolehan Acquisition cost	Hasil Revaluasi <i>Revaluation</i>	Harga Pasar dan Bunga Yang Masih Harus Diterima Fair value and Accrued Interest	Harga Perolehan Acquisition cost	Hasil Revaluasi <i>Revaluation</i>	Harga Pasar dan Bunga Yang Masih Harus Diterima Fair value and Accrued Interest
			Rp juta IDR millions			
- Tersedia utk dijual Available for Sale	18,370,561	2,514,529	20,885,090	15,882,776	708,629	16,591,405
- Bunga Yang Masih Harus Diterima Accrued interest	-	-	696,320	-	-	547,468
	18,370,561		21,581,410	15,882,776		17,138,873

b. Surat Perbendaharaan Negara Treasury Bills

		31 Desember 2010 December 31, 2010		31 Desember 2009 December 31, 2009		
	Harga Perolehan Acquisition cost	Hasil Revaluasi <i>Revaluation</i>	Harga Pasar dan Bunga Yang Masih Harus Diterima Fair value and Accrued Interest	Harga Perolehan Acquisition cost	Hasil Revaluasi <i>Revaluation</i>	Harga Pasar dan Bunga Yang Masih Harus Diterima Fair value and Accrued Interest
			Rp juta IDR millions			
- Tersedia utk dijual Available for Sale	5,662,653	235,178	5,897,831	7,667,845	546,909	8,214,754
- Bunga Yang Masih Harus Diterima Accrued interest	-	-	0	-	-	0
TOTAL	5,662,653 24,033,214		5,897,831 27,479,241	7,667,845 23,550,621		8,214,754 25,353,627

21 December 2010

Surat Utang Negara Republik Indonesia yang dimiliki oleh Bank Indonesia terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) jenis Obligasi Negara (ON) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang dapat diperjualbelikan yang dikelompokkan sebagai SSB Tersedia untuk Dijual.

SUN baik jenis SPN maupun ON diperoleh Bank Indonesia dalam rangka *building stock* SUN untuk digunakan sebagai instrumen moneter yang akan menggantikan SBI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SUN jenis ON diperoleh melalui pembelian di pasar Government Bonds owned by Bank Indonesia were government bonds (Surat Utang Negara – SUN) in the form of Marketable Treasury Bonds (Obligasi Negara – ON) and Treasury Bills (Surat Perbendaharaan Negara - SPN), which were marketable and classified as Available for Sale securities.

21 December 2000

SUN, either SPN or ON, were acquired by Bank Indonesia aimed for building stocks, which was intended to substitute Bank Indonesia Certificates (SBI) as monetary instruments as stated in Act of State Treasury Number 1 of 2004 concerning National Treasury. ON was acquired through secondary market

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010

Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

sekunder mulai bulan April 2005, sedangkan SUN jenis SPN diperoleh Bank Indonesia di pasar perdana mulai bulan Mei 2008.

SUN Tersedia untuk Dijual jenis SPN sebesar Rp5.897.831 juta akan jatuh tempo dalam periode kurang dari satu tahun. Sedangkan, jenis ON sebesar Rp20.885.090 juta terdiri dari: 1) sebesar Rp6.696.388 juta akan jatuh tempo dalam periode antara 1-5 tahun; 2) sebesar Rp1.664.705 juta akan jatuh tempo dalam periode 5-10 tahun; dan 3) sebesar Rp12.523.997 juta akan jatuh tempo di atas sepuluh tahun.

10. Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Saldo Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Repo) per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing adalah sebesar Rp0 juta dan Rp969.907 juta.

starting from April 2005, whereas SPN were acquired by Bank Indonesia through the primary market starting from May 2008.

SPN classified as Available for Sale amounted to IDR5,897,831 million would be due in less than one year. ON amounted to IDR 20,885,090 million consisted of: 1) IDR6,696,388 million would be due within 1 to 5 years; 2) IDR1,664,705 million would be due within 5 to 10 years; and 3) IDR12,523,997 million would be due over 10 years.

10. Securities Purchased under Resale Agreements

Securities Purchased under Resale Agreements as at December 31, 2010 and December 31, 2009 amounted to IDRO million and IDR969.907 million respectively.

	31 Desember 2010 December 31, 2010	31 Desember 2009 December 31, 2009
	Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions
- SBI dan SUN – <i>Repo</i> yang berjangka waktu 1 (satu) hari <i>Bank Indonesia Certificates–Repo (SBI–Repo) and</i>	-	390.991
Government Bonds – Repo (SUN – Repo) with a period of one day		
- Transaksi <i>Fine Tune E</i> kspansi (FTE) yang berjangka waktu 1 (satu) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan	-	578.916
Fine Tune Expansion (FTE) transaction with a period of one day to three months		
	-	969.907

Dengan berlakunya PBI Nomor12/11/PBI/2010 tanggal 2 Juli 2010 mengenai Operasi Moneter, SBI dan SUN -Repo menjadi Lending Facility, sedangkan FTE menjadi Repo.

11. Tagihan kepada Pemerintah

Tagihan kepada Pemerintah pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp251.506.198 juta dan Rp254.939.518 juta, terdiri dari:

In accordance with PBI Number 12/11/PBI/2010 dated July 2, 2010 concerning Monetary Operation (OM), SBI and SUN – Repo were amended into Lending Facilities, whereas FTE was amended into Repo.

11. Claims on Government

Claims on Government as at December 31, 2010 and December 31, 2009 amounted to IDR251,506,198 million and IDR254,939,518 million respectively, with details as follows:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010

Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

	31 Desember 2010 December 31, 2010	31 Desember 2009 December 31, 2009
	Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions
- Surat Utang Pemerintah Government Bonds (SUP)	121,734,229	125,177,078
- Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003 Treasury Bonds (ON) SRBI-01/MK/2003	126,697,948	126,697,948
- Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah Lainnya Other claims on Government in Rupiah	3,074,021	3,064,492
,	251,506,198	254,939,518

1) Surat Utang Pemerintah (SUP)

Nilai SUP per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

1) Government Bonds (SUP)

The values of SUP as at December 31, 2010 and December 31, 2009 were as follows:

	31 Desember 2010 December 31, 2010	31 Desember 2009 December 31, 2009
	Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions
Nilai nominal:		
Nominal value:		
- SUP Nomor: SU-002/MK/1998	19,420,583	20,000,000
- SUP Nomor: SU-004/MK/1999	52,315,360	53,779,500
- SUP Nomor: SU-007/MK/2006	49,998,286	51,397,578
	121,734,229	125,177,078

a) SUP Nomor SU-002/MK/1998 (SU-002)

SU-002 diterbitkan tanggal 23 Oktober 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri dalam Bentuk Surat Utang jo. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Impor Indonesia (PT BEII).

Nilai nominal SU-002 adalah sebesar Rp20.000.000 juta yang tidak dapat dipindahtangankan dan diperjualbelikan.

Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-505/ MK.08/2006 tanggal 24 November 2006, sejak

a) SUP Number SU-002/MK/1998 (SU-002)

SU-002 was issued on October 23, 1998 based on Presidential Decree Number 55 of 1998 concerning Domestic Loans in the form of Debt Securities in conjunction with Government Regulation Number 60 of 1998 concerning Addition of The Republic of Indonesia's Equity Participation in PT Bank Ekspor Impor Indonesia (PT. BEII).

The nominal value of SU-002 was IDR20,000,000 million, non-transferable and non-marketable.

As stated in Minister of Finance Letter Number S-505/MK.08/2006 dated November 24, 2006, since January 1, 2006 the terms and conditions of

Bank Indonesia 2010 Annual Report 157 156 Bank Indonesia Laporan Tahunan 2010

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010 Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

tanggal 1 Januari 2006 ketentuan dan persyaratan SU-002 diubah menjadi sebagai berikut:

- (1) Bunga SU-002 sebesar 1% per tahun yang dihitung dari sisa pokok, tanpa indeksasi dan dibayar secara tunai oleh Pemerintah kepada Bank Indonesia setiap enam bulan sekali yaitu pada tanggal 1 April dan 1 Oktober. Pembayaran bunga pertama kali dilakukan tanggal 1 Desember 2006 untuk pembayaran bunga yang jatuh tempo tanggal 1 April 2006 dan tanggal 1 Oktober 2006.
- (2) Pokok SU-002 diangsur sebanyak 31 kali. Angsuran pertama jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 April 2010 dan angsuran berikutnya jatuh tempo dan dibayar setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahunnya sehingga angsuran terakhir jatuh tempo dan dibayar pada tanggal 1 April 2025. Pembayaran angsuran pokok dapat dilakukan secara tunai atau dibayar dengan SUN yang dapat diperdagangkan.

Perubahan SU-002 tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 18 April 2006 tentang Restrukturisasi Surat Utang Nomor SU-002/MK/1998 dan SU-004/MK/1999, yang didukung oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Kerja antara Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 11 Oktober 2006.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri Keuangan telah menerbitkan *addendum* kelima SU-002 yang mengubah suku bunga dari 1% menjadi 0,1% per tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009.

Pemerintah telah melakukan pembayaran angsuran SU-002 dengan total sebesar Rp579.417 juta sejak 1 April 2010 s.d. 1 Oktober 2010, sehingga baki debet SU-002 pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp19.420.583 juta

SU-002 have been amended as follows:

- (1) SU-002 interest rate is 1% per annum calculated based on the outstanding principal balances, without indexation and paid in cash by the Government to Bank Indonesia semi-annually on April 1 and October 1. The first payment was settled on December 1, 2006 to settle interest due on April 1, 2006 and October 1, 2006.
- (2) Principal repayment is divided into 31 installments. The first installment was due on April 1, 2010, the next installments will be due on April 1 and October 1 each year until the final installment is due on April 1, 2025. Principal repayment may be settled in form of cash or marketable treasury bonds.

This amendment of SU-002 is part of the Agreement between the Minister of Finance and the Governor of Bank Indonesia dated April 18, 2006 regarding the Restructurization of Government Bond Number SU-002/MK/1998 and SU-004/MK/1999, that was supported by Commission XI of the DPR-RI in the work meeting between Commission XI DPR-RI with the Minister of Finance and the Governor of Bank Indonesia dated October 11, 2006.

Based on Act No. 41 of 2008 dated November 10, 2008 concerning Government Income and Expenditure Budget for the year 2009, the Minister of Finance has issued the fifth addendum of SU-002 that amends the interest rate from 1% to 0.1% per annum and has been effective since January 1, 2009.

The Government has paid the installments of SU-002 with a total amount of IDR579.417 million for the period of April 1, 2010 to October 1, 2010, so that the outstanding balance of SU-002 as at December 31, 2010 were IDR19,420,583 million.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010

Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

b) SUP Nomor SU-004/MK/1999 (SU-004)

SU-004 diterbitkan tanggal 28 Mei 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri dalam Bentuk Surat Utang jo. Persetujuan Bersama Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 6 Februari 1999.

Nilai nominal SU-004 adalah sebesar Rp53.779.500 juta yang tidak dapat dipindahtangankan dan diperjualbelikan.

Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-505/ MK.08/2006 tanggal 24 November 2006, sejak tanggal 1 Januari 2006 ketentuan dan persyaratan SU-004 diubah menjadi sebagai berikut:

- (1) Bunga SU-004 sebesar 3% per tahun dihitung dari sisa pokok, tanpa indeksasi dan dibayar secara tunai oleh Pemerintah kepada Bank Indonesia setiap enam bulan sekali yaitu pada tanggal 1 Juni dan 1 Desember. Pembayaran bunga pertama kali dilakukan pada tanggal 1 Desember 2006 untuk pembayaran bunga yang jatuh tempo tanggal 1 Juni 2006 dan tanggal 1 Desember 2006.
- (2) Pokok SU-004 diangsur sebanyak 32 kali. Angsuran pertama jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 Juni 2010 dan angsuran berikutnya jatuh tempo dan dibayar setiap tanggal 1 Desember dan 1 Juni setiap tahunnya sehingga angsuran terakhir jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 Desember 2025. Pembayaran angsuran pokok dapat dilakukan secara tunai atau dibayar dengan SUN yang dapat diperdagangkan.

Perubahan SU-004 tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 18 April 2006 tentang Restrukturisasi Surat Utang Nomor SU-002/MK/1998 dan SU-004/MK/1999, yang didukung oleh Komisi XI DPR RI dalam Rapat Kerja antara Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 11 Oktober 2006.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

b) SUP Number SU-004/MK/1999 (SU-004)

SU-004 was issued on May 28, 1999 based on Presidential Decree Number 55 of 1998 concerning Domestic Loans in the Form of Debt Securities in conjunction with Agreement between the Government and Bank Indonesia dated February 6, 1999.

The nominal value is IDR53,779,500 million, non-transferable and non-marketable.

As stated in Minister of Finance Letter Number S-505/MK.08/2006 dated November 24, 2006, since January 1, 2006 the terms and conditions of SU-004 have been amended as follows:

- (1) SU-004 interest rate is 3% per annum calculated based on the outstanding principal balances, without indexation and paid in cash by the Government to Bank Indonesia semiannually on June 1 and December 1. The first payment was settled on December 1, 2006 to settle interest due on June 1, 2006 and December 1, 2006.
- (2) Principal repayment is divided into 32 installments. The first installment was due on June 1, 2010, the next installments will be due on December 1 and June 1 each year until the final installment is due on December 1, 2025. Principal repayment may be settled in form of cash or marketable treasury bonds.

This amendment of SU-004 is part of the Agreement between the Minister of Finance and the Governor of Bank Indonesia dated April 18, 2006 regarding the Restructurization of Government Bond Number SU-002/MK/1998 and SU-004/MK/1999, that was supported by Commission XI of the DPR-RI in the work meeting between Commission XI DPR-RI with the Minister of Finance and the Governor of Bank Indonesia dated October 11, 2006.

Based on Act No. 41 of 2008 dated November 10, 2008 concerning Government Income and Expenditure Budget for the year 2009, the

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010 Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri Keuangan telah menerbitkan *addendum* kelima SU-004 yang mengubah suku bunga dari 3% menjadi 0,1% per tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009

Pemerintah telah melakukan pembayaran angsuran SU-004 dengan total sebesar Rp1.464.140 juta sejak 1 Juni 2010 s.d. 1 Desember 2010, sehingga baki debet SU-004 pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp52.315.360 juta.

c) SUP Nomor SU-007/MK/2006 (SU-007)

SU-007 diterbitkan tanggal 24 November 2006 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tentang Restrukturisasi Surat Utang Nomor SU-002/MK/1998 dan SU-004/MK/1999 tanggal 18 April 2006. Nilai nominal SU-007 adalah sebesar Rp54.862.150 juta dan tidak dapat diperdagangkan.

SU-007 diterbitkan untuk mendudukkan tunggakan bunga dan hasil indeksasi SU-002 dan SU-004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Tunggakan bunga SU-002 sebesar Rp4.637.583 juta.
- (2) Tunggakan bunga SU-004 sebesar Rp12.291.887 juta.
- (3) Hasil indeksasi SU-002 sebesar Rp11.231.072 juta.
- (4) Hasil indeksasi SU-004 sebesar Rp26.701.608 juta.

Adapun persyaratan Surat Utang ini adalah sebagai berikut:

- (1) SU-007 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006 dan jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2025.
- (2) Bunga SU-007 sebesar 0,1% per tahun yang dihitung dari sisa pokok dan dibayar secara tunai oleh Pemerintah kepada Bank Indonesia setiap enam bulan sekali yaitu pada tanggal

Minister of Finance has issued the fifth addendum of SU-004 that amends the interest rate from 3% to 0.1% per annum and has been effective since January 1, 2009.

The Government has paid the installments of SU-004 with a total amount of IDR1,464,140 million for the period of June 1, 2010 to December 1, 2010, so that the outstanding balance of SU-004 as at December 31, 2010 was IDR52,315,360 million.

c) SUP Number SU-007/MK/2006 (SU-007)

SU-007 was issued on November 24, 2006 based on Act of the Republic of Indonesia Number 24 of 2002 concerning Government Bonds and the Agreement between the Minister of Finance and the Governor of Bank Indonesia concerning Restructurization of Government Bond Number SU-002/MK/1998 and SU-004/MK/1999 dated April 18, 2006. The nominal value of SU-007 is IDR54,862,150 million and non-tradable.

SU-007 was issued to substitute the interest and indexation claim of SU-002 and SU-004 until December 31, 2005, with details as follows:

- (1) SU-002 interest claim amounted to IDR4,637,583 million.
- (2) SU-004 interest claim amounted to IDR12,291,887 million.
- (3) SU-002 indexation claim amounted to IDR11,231,072 million.
- (4) SU-004 indexation claim amounted to IDR26,701,608 million.

The terms and conditions of SU-007 are:

- (1) SU-007 became effective on January 1, 2006 and will be due on August 1, 2025.
- (2) SU-007 interest rate is 0.1% per annum calculated based on the remaining principal balances, and paid in cash by the Government to Bank Indonesia semi-annually

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010

Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

1 Februari dan 1 Agustus. Pembayaran bunga pertama kali dilakukan pada tanggal 1 Desember 2006 untuk pembayaran bunga yang jatuh tempo tanggal 1 Februari 2006 dan tanggal 1 Agustus 2006.

(3) Pokok SU-007 diangsur sebanyak 38 kali.
Angsuran pertama jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 Februari 2007 dan angsuran berikutnya jatuh tempo dan dibayar setiap tanggal 1 Agustus dan 1 Februari setiap tahunnya sehingga angsuran terakhir jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 Agustus 2025.
Pembayaran angsuran pokok dilakukan secara tunai atau dibayar dengan Surat Utang Negara yang dapat diperdagangkan.

Pemerintah telah melakukan pembayaran angsuran SU-007 dengan total sebesar Rp4.863.864 juta sejak 1 Februari 2007 s.d. 30 Juli 2010, sehingga baki debet SU-007 pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp49.998.286 juta.

2) Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003 (SRBI-01)

SRBI-01 diterbitkan sebagai pengganti SUP Nomor SU-001/MK/1998 dan Nomor SU-003/MK/1999 dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dan Bank Indonesia mengenai Penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia serta Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 1 Agustus 2003. Nilai nominal SRBI-01 adalah sebesar Rp144.536.094 juta.

Adapun persyaratan SRBI-01 adalah sebagai berikut:

- a) SRBI-01 mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2003, tanpa indeksasi, berjangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang.
- b) SRBI-01 dikenakan bunga tahunan sebesar 0,1% dari sisa pokok, yang dibayar oleh Pemerintah setiap enam bulan sekali, yaitu pada bulan Februari dan Agustus.
- c) Pelunasan pokok SRBI-01 bersumber dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah dan dilakukan apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia telah mencapai di atas 10%. Dalam hal

on February 1 and August 1. The first interest payment was settled on December 1, 2006 to pay for interest due on February 1, 2006 and August 1, 2006.

(3) Principal repayment is divided into 38 installments. The first installment was due on February 1, 2007, the next installments will be due on August 1 and February 1 each year until the final installment is due on August 1, 2025. Principal repayment may be settled in form of cash or marketable treasury bonds.

The Government has paid installments of SU-007 with a total amount of IDR4,863,864 million for the period of Februari 1, 2007 to July 30, 2010, so that the outstanding balance of SU-007 as at December 31, 2010 was IDR49,998,286 million.

2) Treasury Bond (ON) Number SRBI-01/ MK/2003 (SRBI-01)

ON SRBI-01 was issued as the substitute for SUP Number SU-001/MK/1998 and SU-003/MK/1999 in relation to the implementation of Agreement between the Government and Bank Indonesia concerning the Settlement of BLBI and the Financial Relationship between the Government and Bank Indonesia dated August 1, 2003. The nominal value of the Bond is IDR144,536,094 million.

The terms and conditions of ON SRBI-01 are as follows:

- (a) ON SRBI-01 became effective on August 1, 2003, without indexation, has a 30-year maturity period and is extendable.
- (b) Interest on ON SRBI-01 is 0.1% per annum calculated based on the remaining principal balance, which will be paid by the Government semi-annually on February and August.
- (c) ON SRBI-01 redemption is funded from the surplus of Bank Indonesia which is accruing to the Government and shall be performed in the event that the capital to monetary liabilities ratio of Bank Indonesia has

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010 Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia kurang dari 3%, maka Pemerintah membayar *charge* kepada Bank Indonesia sebesar kekurangan dana yang diperlukan untuk mencapai rasio modal tersebut. Dalam hal SRBI-01 telah dilunasi dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah sebelum jangka waktu 30 tahun, maka SRBI-01 tersebut dinyatakan lunas dan tidak berlaku lagi.

SRBI-01 telah mengalami tiga kali perubahan sebagai berikut:

- a) Perubahan SRBI-01 yang disampaikan dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-10/MK.8/2006 tanggal 19 Desember 2006 karena adanya pembayaran angsuran pokok SRBI-01 pada tahun 2006 sebesar Rp1.522.471 juta yang berasal dari surplus Bank Indonesia tahun 2005 yang menjadi bagian Pemerintah, sehingga pokok SRBI-01 menjadi Rp143.013.623 juta.
- b) Perubahan kedua SRBI-01 yang disampaikan dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-68/MK.8/2007 tanggal 15 Mei 2007 karena adanya pembayaran angsuran pokok SRBI-01 pada tahun 2007 sebesar Rp13.669.321 juta yang berasal dari surplus Bank Indonesia tahun 2006 yang menjadi bagian Pemerintah, sehingga pada posisi 31 Desember 2008 pokok SRBI-01 menjadi Rp129.344.302 juta.
- c) Perubahan ketiga SRBI-01 yang disampaikan dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-84/MK.8/2009 tanggal 25 Mei 2009 karena adanya pembayaran angsuran pokok SRBI-01 pada tahun 2009 sebesar Rp2.646.354 juta yang berasal dari surplus Bank Indonesia tahun 2008 yang menjadi bagian Pemerintah, sehingga pada posisi 31 Desember 2010 pokok SRBI-01 menjadi Rp126.697.948 juta.

Tagihan kepada Pemerintah berupa SU-002, SU-004, SU-007, dan SRBI-01 pada saat ini dalam proses restrukturisasi menjadi surat utang yang dapat diperdagangkan yang merupakan salah satu aspek dalam pembahasan *asset-liability management* antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

exceeded 10%. If the capital to monetary liabilities ratio is less than 3%, the Government is obliged to pay charge in order to maintain the ratio at 3% level. If the redemption of the ON SRBI-01 is accomplished before 30 years from the surplus of Bank Indonesia that is accruing to the Government, Treasury Bond will be stated settled and will be revoked.

ON SRBI-01 has been amended twice, with details as follows:

- (a) First amendment of ON SRBI-01 by Minister of Finance Letter Number S-10/MK.8/2006 dated December 19, 2006 due to principal payment of 2006 amounted IDR1,522,471 million from Bank Indonesia's surplus for the year 2005 accrued to the Government. The remaining principal of ON SRBI-01 was IDR143,013,623 million.
- (b) Second amendment of ON SRBI-01 by Minister of Finance Letter Number S-68/MK.8/2007 dated May 15, 2007 due to principal payment of 2007 amounted IDR13,669,321 million from Bank Indonesia's surplus for the year 2006 accrued to the Government. The remaining principal of ON SRBI-01 was IDR129,344,302 million.
- (c) The third amendment of ON SRBI-01 by Minister of Finance Letter Number S-84/ MK.8/2009 dated May 25, 2009 due to principal payment of 2009 amounted to IDR2,646,354 million from Bank Indonesia's surplus for the year 2008 accrued to the Government. The outstanding principal of ON SRBI-01 as at December 31, 2010 was IDR126,697,948 million.

Claims on Government in the form of SU-002, SU-004, SU-007, and ON SRBI-01 is currently in the restructurization of becoming available-for-sale bond and as one of the aspects in the discussions of asset-liability management between The Ministry of Finance and Bank Indonesia.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010

Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

3) Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah Lainnya

3) Other Claims on Government in Rupiah

	31 Desember 2010 December 31, 2010	31 Desember 2009 December 31, 2009
	Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions
a. Tagihan karena keanggotaan Pemerintah dalam Lembaga Internasional Claims due to Government membership in international institutions	2,826,956	2,826,956
b. Tagihan bunga kepada Pemerintah Claims due to loan interests	237,867	228,338
c. Tagihan lainnya dalam Rupiah Other claims in Rupiah	9,198	9,198
Jumlah Total	3,074,021	3,064,492

Kecuali Tagihan Bunga kepada Pemerintah,
Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah
Lainnya merupakan tagihan yang terjadi sebelum
berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia menjadi Undang-Undang. Tagihan
kepada Pemerintah dalam Rupiah Lainnya terdiri dari:

a) Tagihan karena keanggotaan Pemerintah dalam Lembaga Internasional sebesar Rp2.826.956 juta, terdiri dari tagihan kepada Pemerintah karena keanggotaan pada IMF sebesar Rp2.764.861 juta, keanggotaan pada International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) sebesar Rp57.434 juta dan keanggotaan lainnya sebesar Rp4.661 juta. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2009, Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencantumkan Dana Talangan tersebut sebagai kewajiban/ pasiva dalam pos "Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya". Pemerintah dan Bank Indonesia saat ini sedang melakukan pembahasan guna menyepakati nilai dan penyelesaian dana talangan tersebut.

Other than claims due to loan interests, other claims on Government in Rupiah were claims effective before the enactment of Act of the Republic of Indonesia Number 6 of 2009 concerning Endorsement of Government Legislature as Replacement of Act Number 2 of 2008 concerning The Second Amendment of Act Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia as an Act, with details as follows:

a) Claims due to Government membership in International Institutions amounted to IDR2,826,956 million, consisted of IMF membership fee amounted to IDR2,764,861 million, membership in IBRD amounted to IDR57,434 million and other memberships amounted to IDR4,661 million. In Government of Indonesia Financial Statements (LKPP) of 2009, the Government c.q Ministry of Finance recognized these claims as liabilities under "Other Domestic Long Term Liabilities". Resolution of the claims is being discussed between Bank Indonesia and the Ministry of Finance.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010 Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

- b) Tagihan bunga kepada Pemerintah sebesar Rp5.560.115 juta terdiri dari:
 - Tagihan bunga SU-002, SU-004, dan SU-007 sebesar Rp30.571 juta.
 - Tagihan bunga SRBI-01 sebesar Rp52.676 juta.
 - Tagihan dalam rangka Subsidi Bunga Kredit Program per tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp154.620 juta, terdiri dari tagihan subsidi bunga kredit program periode tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2009 yang telah diaudit oleh BPK sebesar Rp144.543 juta dan subsidi bunga kredit program, sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp10.077 juta.
- c) Tagihan lainnya dalam Rupiah sebesar Rp9.198 juta terdiri dari tagihan kepada Perum Peruri sebesar Rp9.007 juta yang masih dalam proses penyelesaian dan tagihan lainnya sebesar Rp191 juta.

12. Tagihan kepada Bank

Tagihan kepada Bank dalam Rupiah per tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masingmasing sebesar Rp10.886.737 juta dan Rp11.623.482 juta dengan rincian sebagai berikut:

- b) Claims due to loan interest amounted to IDR 5,560,115 million, consisted of:
 - Interest claims of SU-002, SU-004, and SU-007 amounted to IDR 30,571 million.
 - Interest claims of ON SRBI-01 amounted to IDR 52.676 million.
 - Claims due to subsidy of credit program as at December 31, 2010 amounted to IDR154,620 million, consisted of subsidy of credit program for the period of 2007 to 2009 audited by Supreme Audit Board (BPK) amounted to IDR144,543 million and subsidy of credit program, since January 1, 2010 to December 31, 2010 amounted to IDR 10,077 million.
- c) Other claims in Rupiah amounted to IDR9,198 million consisted of claim to Perum Peruri amounted to IDR9,007 million that is still in the settlement process, and other claims amounted to IDR191 million.

12. Claims on Banks

Claims on banks in Rupiah as at December 31, 2010 and December 31, 2009 amounted to IDR10,886,737 million and IDR11,623,482 million respectively, with details as follows:

	31 Desember 2010 December 31, 2010	31 Desember 2009 December 31, 2009
	Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions
- Pinjaman Subordinasi (SOL)	3,697,856	3,893,712
Subordinated loans (SOL) - Kredit Likuditas Bank Indonesia (KLBI) executing	1,849,076	2,388,709
Executing Bank Indonesia Liquidity Credit (KLBI) - Pinjaman Dua Tahap (TSL)	11,269	12,395
Two Step Loan (TSL) - Tagihan Bunga SOL, KLBI, dan TSL	6,288	6,418
Claims of interest of SOL, KLBI, dan TSL - Tagihan bunga lainnya	5,322,248	5,322,248
Others Claims of interest Jumlah		
Jumian Total	10,886,737	11,623,482

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010

Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

	31 Desember 2010 December 31, 2010	31 Desember 2009 December 31, 2009	
	bunga setahun IDR millions	bunga setahun IDR millions	
- SOL	0.20% - 10.00%	0.20% - 10.00%	
- KLBI*) - TSL	3.75% - 9.00% 6.63%	3.75% - 15.00% 6.87%	

*) Kisaran suku bunga KLBI yang belum jatuh tempo Estimation of interest of KLBI that has not due

Tagihan bunga lainnya merupakan tagihan bunga atas Fasilitas Saldo Debet (FSD) kepada tiga bank berstatus *Bank Take Over* (BTO) yang diberikan pada tahun 1998. Tagihan pokok FSD telah dialihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan akta Cessie pada tahun 1999. Tagihan bunga FSD belum dialihkan kepada BPPN namun telah diperhitungkan oleh BPPN dalam proses rekapitalisasi tiga bank berstatus BTO tersebut. Bank Indonesia telah beberapa kali meminta penegasan Pemerintah atas penyelesaian tagihan bunga FSD dimaksud, terakhir dengan surat Nomor 12/1/GBI/DKBU tanggal 30 April 2010, namun sampai tanggal 31 Desember 2010 belum mendapatkan tanggapan.

13. Tagihan kepada Lainnya

Tagihan kepada Lainnya dalam Rupiah per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masingmasing sebesar Rp7.221.056 juta dan Rp7.468.063 juta, terdiri dari: Interest claims of Overdraft Facilities (Fasilitas Saldo Debet – FSD) to three taken over banks (BTO) were given in 1998. FSD principal claims had been transferred to IBRA by assignment of contract rights certificate in 1999. The interest claims of FSD had not been transferred to IBRA; however IBRA had calculated these claims upon recapitalization process of BTO. Bank Indonesia has proposed confirmation to the Government regarding the settlement of the interest claims of FSD, the most current letter No. 12/1/GBI/DKBU dated April 30, 2010, but as at December 31, 2010 there has not been any response.

13. Claims on Others

Claims on others in Rupiah as at December 31, 2010 and December 31, 2009 were IDR7,221,056 million and IDR7,468,063 million respectively, with details as follows:

	31 Desember 2010 December 31, 2010	31 Desember 2009 December 31, 2009
	Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions
- Tagihan pada BUMN yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pengalihan sisa kredit program Claims on appointed State-Owned Enterprises due to credit program hand-over	999.552	1,222,263
- Tagihan karena pemberian kredit <i>channeling</i> Claims on channeling loan	5.851.580	5,862,338
- Tagihan Lainnya Other claims	369.924	383,462
Jumlah Total	7.221.056	7,468,063

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010 Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

Termasuk dalam tagihan karena pemberian kredit channeling adalah tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) sebesar Rp5.706.913 juta. Penyelesaian tagihan tunggakan KUT dimaksud masih menunggu hasil pembahasan *risk sharing* dengan Pemerintah dan Perum Jamkrindo.

14. Equity Participations

14. Penyertaan

Bank Indonesia mempunyai penyertaan pada lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya, dengan rincian sebagai berikut: Bank Indonesia holds several equity participations in banks and other financial institutions, with details as follows:

Included in claims on channeling loan was Farm

Credit (Kredit Usaha Tani - KUT) in arrears amounted

waiting for the result of risk sharing discussion with

the Government and Perum Jamkrindo.

to IDR5,706,913 million. Settlement of this claim is still

	Persentase kepemilikan Percentage of Ownership	31 Desember 2010 December 31, 2010	Persentase kepemilikan Percentage of Ownership	31 Desember 2009 December 31, 2009
	%	Rp juta IDR millions	%	Rp juta IDR millions
Penyertaan pada:				
Equity participation in:				
- Bank for International	0.55	582,297	0.55	617,467
Settlements (BIS)				
- PT Asuransi Kredit Indonesia	0	0	14.67	220,000
- PT Bahana Pembinaan	0	0	82.22	0
Usaha Indonesia (BPUI)				
		582,297		837,467

- a. Bank Indonesia melakukan penyertaan pada Bank for International Settlements (BIS) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang vide pasal 57, yang menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional. Penyertaan modal tersebut telah memperoleh izin dari DPR RI. Tujuan dari penyertaan tersebut adalah untuk memperoleh akses lebih besar terhadap kegiatan BIS dalam pengambilan keputusan, memanfaatkan fasilitas yang disediakan, meningkatkan kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia, meningkatkan kerjasama di bidang kebanksentralan yang berkaitan dengan kebijakan moneter, stabilitas
- a. Bank Indonesia's equity participation in BIS is based on Act of the Republic of Indonesia Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia as amended by Act of the Republic of Indonesia Number 6 of 2009 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Act Number 2 of 2008 concerning Second Amendment of Act Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia as an Act, Article 57, which states that Bank Indonesia may establish cooperation with other central banks, organizations and international institutions. DPR-RI had approved of the equity participation in BIS. The purpose of the equity participation is to gain more access in BIS decision-making activities, to utilize the provided facilities, as well as to increase the international investors' confidence towards Indonesia and cooperation with other central banks concerning monetary policy, financial system stability, payment system and banking regulation. On September 29, 2003, Bank Indonesia purchased 3000 shares (0.55% of total issued shares) with nominal value of SDR5,000/shares and total acquisition

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010

Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

sistem keuangan, sistem pembayaran, dan pengaturan perbankan. Bank Indonesia membeli 3.000 lembar saham (0,55% dari total saham yang beredar) pada tanggal 29 September 2003 dengan nilai nominal SDR5,000.00/saham dengan total harga perolehan SDR42,054,000.00. Posisi penyertaan tersebut pada tanggal 31 Desember 2010 setara dengan Rp582.297 juta.

b. Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, Bank Indonesia telah melaksanakan upaya-upaya dalam proses pelaksanaan divestasi atas penyertaan pada bank dan lembaga keuangan yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan tersebut.

Pada tanggal 25 November 2009 dan 16 Februari 2010, Bank Indonesia bersama-sama dengan Pemerintah telah melaporkan pelaksanaan divestasi penyertaan anak perusahaan Bank Indonesia dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI yang memutuskan untuk menyetujui pelaksanaan divestasi anak-anak perusahaan Bank Indonesia kepada Pemerintah secara hibah serta disarankan untuk menggunakan nilai nominal pada hibah dimaksud.

Guna menindaklanjuti hasil keputusan pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI tersebut, pada tanggal 26 April 2010, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT BPUI dan PT Askrindo dalam rangka hibah saham Bank Indonesia kepada Pemerintah yang memutuskan pemegang saham menyetujui pengalihan saham dimaksud.

Pelaksanaan divestasi PT Askrindo dan PT BPUI telah dilaksanakan dengan dilakukannya penandatanganan akta hibah antara Bank Indonesia dengan Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Keuangan pada tanggal 12 Juli 2010 dan telah dibuku oleh Bank Indonesia. cost of SDR42,054,000.00. The balance of the equity participation as at December 31, 2010 is equivalent to IDR582,297 million.

b. In order to comply with Act of the Republic of Indonesia Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia as amended by Act of the Republic of Indonesia Number 6 of 2009 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Act Number 2 of 2008 concerning Second Amendment of Act Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia as an Act, Bank Indonesia has performed several efforts to divest all equity participation in banks and financial institutions that had been acquired before the enactment of the regulation.

On November 25, 2009 and February 16, 2010, Bank Indonesia and the Government have reported the progress of divestment of Bank Indonesia's subsidiary company in the work meeting of Comission XI of DPR RI. DPR RI has agreed to process the divestment as grant to the Government, including the suggestion to use nominal value for the intended grant.

To follow up the result of the work meeting of Comission XI of DPR RI, on April 26, 2010, there has been the Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS) of BPUI and Askrindo in order to donate the stock of Bank Indonesia to the Government which concluded that shareholders have agreed for divestment.

The divestment of Askrindo and BPUI was executed by signing legal document of grant between Bank Indonesia and the Government represented by Ministry of Finance dated on July 12, 2010 recorded by Bank Indonesia.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010 Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

15. Other Assets

follows:

Advances, and Other Assets.

Other Assets consist of Fixed Assets, Finance-Leased

Assets, Intangible Assets, Other Assets in Indo Plus BV

(IPBV), Currency Inventory and Currency Procurement

The balances of Other Assets as at December 31, 2010

and December 31, 2009 were IDR15,278,591 million

and IDR9,671,199 million respectively, with details as

a. Fixed Assets, Finance-Leased Assets and

2010 and December 31, 2009 were

respectively with details as follows:

The book value of fixed assets, finance-leased

assets and intangible assets as at December 31,

IDR6,667,599 million and IDR6,615,444 million

Intangible Assets

December 31 2009

15. Aktiva Lain-lain

Aktiva Lain-lain terdiri atas Aktiva Tetap, Aktiva Sewa Guna Usaha, Aktiva Tidak Berwujud, Aktiva Lain-lain pada Indo Plus BV (IPBV), Persediaan Bahan Uang dan Uang Muka Pengadaan Uang, Aktiva Pajak Tangguhan, serta Aktiva Lainnya.

Posisi Aktiva Lain-lain pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp15.278.591 juta dan Rp9.671.199 juta, dengan rincian sebagai berikut:

		31 Desember 2010 December 31, 2010	31 Desember 2009 December 31, 2009	
		Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions	
	etap, Aktiva Sewa Guna Usaha dan Tidak Berwujud (Nilai buku)	6,667,599	6,615,444	 Fixed Assets, Finance-Leased Assets, and Intangible Assets (Book value)
- Aktiva L	ain-lain pada IPBV	359,810	376,029	- Other Assets in IPBV
- Persedia	aan Bahan Uang dan Uang Muka	721,894	1,377,414	- Currency Inventory and Currency
Pengad	aan Uang			Procurement Advances
- Aktiva F	Pajak Tangguhan	6,950,398	127,130	- Deferred Tax Assets
- Lainnya		578,890	1,175,182	- Other Assets
		15,278,591	9,671,199	

a. Aktiva Tetap, Aktiva Sewa Guna Usaha, dan Aktiva Tidak Berwujud

Nilai buku Aktiva Tetap, Aktiva Sewa Guna Usaha, dan Aktiva Tidak Berwujud per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp6.667.599 juta dan Rp6.615.444 juta, dengan rincian sebagai berikut:

31 Desember 2010 31 Desember 2009

	December 31, 2010	December 31, 2009	
	Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions	
Harga Perolehan/Revaluasi			Cost of Fixed Assets
Aktiva Tetap:			Fixed Assets:
- Tanah dan Bangunan	6,332,382	6,155,802	- Land and Building
- Selain Tanah dan Bangunan	1,464,412	1,404,115	- Non Land and Building
Aktiva Tidak Berwujud	206,616	114,380	Intangible Assets
Aktiva Sewa Guna Usaha	0	83,209	Finance-Leased Assets
Aktiva Dalam Penyelesaian	361,883	310,494	Self-constructed Assets
	8,365,293	8,068,000	

December 31 2010

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010 Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

	31 Desember 2010 December 31, 2010	31 Desember 2009 December 31, 2009	
	Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions	
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi			Accumulated Depreciation/Amortization
Aktiva Tetap:			Fixed Assets:
- Bangunan	657.764	558.668	- Building
- Selain Bangunan	926.527	794.187	- Non Building
Aktiva Sewa Guna Usaha	0	83.209	Finance-Leased Assets
Aktiva Tidak Berwujud	113.403	16.492	Intangible Assets
	1.697.694	1.452.556	
Nilai Buku	6.667.599	6.615.444	Book Value

b. Aktiva Lain-lain pada IPBV

Aktiva Lain-lain pada IPBV merupakan tagihan kepada IPBV yang terdiri dari tagihan *Floating Principal Note* (FPN) dan tagihan lainnya yang digunakan sebagai cadangan untuk biaya operasional IPBV.

Tagihan FPN merupakan tagihan yang berasal dari *Non Performing Loans* (NPL) eks Indover Bank yang dialihkan pengelolaannya kepada IPBV. Secara periodik (triwulanan) IPBV memutakhirkan nilai FPN tersebut untuk menggambarkan nilai NPL terkini yang dikelola. Untuk pertama kali nilai FPN yang dikeluarkan IPBV pada tanggal 26 Januari 2004 sebesar USD294,232,949.00.

Berdasarkan laporan triwulanan IPBV terakhir tanggal 31 Desember 2010, nilai FPN terkini adalah sebesar USD38,598,104.78 atau setara dengan Rp347.036 juta.

Sementara itu, nilai tagihan lainnya kepada IPBV adalah sebesar USD34,676.23 atau setara dengan Rp312 juta dan EUR1,042,387.00 atau setara dengan Rp12.463 juta. Dari jumlah tagihan lainnya tersebut oleh IPBV disimpan di Indover Bank Amsterdam sebesar EUR393,960.20 serta di ING Bank Amsterdam sebesar USD34,676.23 dan EUR648,426.80.

c. Aktiva Pajak Tangguhan

Posisi aktiva pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp6.950.398 juta dan pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp127.130 juta. Penjelasan lebih rinci mengenai Aktiva Pajak Tangguhan dijelaskan dalam Catatan C.30.

b. Other Assets in Indo Plus BV (IPBV)

Other Assets in IPBV are claims to IPBV that consisted of the Floating Principle Note (FPN) claim and other claims used as a reserve for IPBV's operational expenditures.

FPN claims are claims from Non-Performing Loans (NPL) of ex-Indover Bank that has been transferred to IPBV. Quarterly IPBV renews the FPN values to represent the current NPL value that it manages. The First FPN was issued on January 26, 2004 amounted to USD294.232.949.00.

Based on IPBV's latest quarterly report dated December 31, 2010, the current FPN value amounted to USD38,598,104.78 or equaled to IDR347,036 million.

Meanwhile, the balance of other claims to IPBV was USD34,676.23 or equivalent to IDR312 million and EUR1,042,387.00 or equaled to IDR12,463 million. Those claims were kept by IPBV in Indover Bank amounted to EUR393,960.20, and in ING Bank amounted to USD34,676.23 and EUR648,426.80.

c. Deferred Tax Assets

The balance of Deferred Tax Assets as at December 31, 2010 was IDR6,950.398 million and as at December 31, 2009 was IDR127,130 million. Further explanation of Deferred Tax Assets is in Note C.30.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010 Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

d. Lainnya

Termasuk dalam Pos Lainnya adalah penempatan dana pada Indover Bank Amsterdam (IBA) yang terdiri dari USD48,797,259.98 atau setara dengan Rp438.736 juta dan EUR4,987,667.93 atau setara dengan Rp59.632 juta per 31 Desember 2010 serta Aktiva Lainnya sebesar Rp80.522 juta.

Pada tanggal 5 November 2009, dalam *Creditors Meeting* di Pengadilan Amsterdam, Belanda, tagihan Bank Indonesia di IBA ditetapkan sebagai *disputed claim also provisionally acknowledged*. Selanjutnya pada bulan Maret 2010 Bank Indonesia telah mengajukan *Statement of Claim* ke Pengadilan Amsterdam meminta agar claim Bank Indonesia di IBA tersebut dapat sepenuhnya diakui menjadi *acknowledged claim*. Berdasarkan *Eighth Public Liquidation Report* dari Stibbe tanggal 28 Maret 2011, proses pengadilan atas *claim* Bank Indonesia tersebut masih berlangsung – lihat Catatan E.4.

Sementara itu untuk penempatan dana Bank Indonesia pada Indover Asia Limited Hongkong (IAL) sebesar USD80,000,000.00 beserta bunganya telah dilunasi oleh IAL pada bulan Maret 2010.

16. Penyisihan Aktiva

Total penyisihan aktiva pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp15.649.892 juta dan Rp15.409.756 juta, dengan rincian sebagai berikut:

d. Others

Included in Others is the placement of funds in Indover Bank Amsterdam (IBA) amounted to USD48,797,259.98 or equivalent to IDR438,736 million and EUR4,987,667.93 or equivalent to IDR59,632 million at December 31, 2010, and Other Assets amounted to IDR80.522 million.

On November 5, 2009, in the Creditors Meeting in the Amsterdam Courts, The Netherlands, Bank Indonesia's claims in IBA were acknowledged as disputed claim also provisionally acknowledged. In March 2010, Bank Indonesia has proposed a Statement of Claim to the Amsterdam Courts requesting that Bank Indonesia's claim in IBA can be declared as acknowledged claim. According to Eight Public Liquidation Report from Stibbe dated March 28, 2011, the trial on Bank Indonesia's claim is still in process – see Note E.4.

Fund placements in IAL in the form of deposits amounted to USD80,000,000.00 has been redeemed by IAL in March 2010.

16. Allowance for Bad Debts

Total allowance for bad debts as at December 31, 2010 and December 31, 2009 were IDR15,649,892 million and IDR15,409,756 million respectively, with details as follows:

		31 Desember 2010 December 31, 2010	31 Desember 2009 December 31, 2009	
		Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions	
_	Saldo awal	15,409,756	16,474,382	- Beginning Balance
	Pemulihan penyisihan aktiva	-	78	- Assets recovery
-	Penggunaan untuk penghapusbukuan aktiva	(799)	(42,709)	- Assets write-off
-	Pengurangan (penambahan) pembentukan penyisihan aktiva	240,935	(1,021,995)	- Addition/(decreased) of allowance for bad debt
-	Saldo akhir	15,649,892	15,409,756	- Ending Balance

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010

Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

17. Currency in Circulation

17. Uang dalam Peredaran

Uang dalam Peredaran merupakan alat pembayaran yang sah dan tidak berada dalam penguasaan Bank Indonesia dengan posisi per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing adalah sebesar Rp318.585.280 juta dan Rp279.038.469 juta dengan rincian sebagai berikut:

Currency in Circulation is valid payment instrument not under possession of Bank Indonesia with a position as at December 31, 2010 and December 31, 2009 amounted to IDR318,585,280 million and IDR279,038,469 million respectively, with details as follows:

	31 Desember 2010 December 31, 2010	31 Desember 2009 December 31, 2009	
	Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions	
Uang yang dicetak:	441,530,239	393,213,763	Printed Money:
- Uang Kertas	437,056,520	389,746,227	- Bank Notes
- Uang Logam	4,463,191	3,457,008	- Coins
- Uang Khusus	10,528	10,528	- Special edition
Uang yang telah dicabut dan ditarik dari Peredaran	(3,158)	(11,530)	Currency withdrawn from circulation
Uang dalam Persediaan	(122,926,647)	(114,162,714)	Currency inventory
Lainnya	(15,154)	(1,050)	Others
Jumlah Uang dalam Peredaran	318,585,280	279,038,469	Currency in circulation

18. Giro Pemerintah

Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemegang kas pemerintah, mengelola giro pemerintah dengan rincian:

18. Government Demand Deposits

In performing its function as the account holder of the Government, Bank Indonesia manages Government demand deposits, with details as follows:

	31 Desember 2010 December 31, 2010	31 Desember 2009 December 31, 2009	
	Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions	
- Dalam Rupiah	62.137.088	30.252.456	- In Rupiah
- Dalam valuta asing	28.856.995 90.994.083	23.420.858 53.673.314	- In Foreign Currency
	90.994.063	33.073.314	

- a. Giro Pemerintah dalam Rupiah per 31 Desember 2010, antara lain terdiri dari:
 - 1) Rekening Kemenkeu yang diberikan jasa giro oleh Bank Indonesia terdiri dari:
 - a) Rekening Kas Umum Negara (RKUN) senilai Rp2.120.439 juta.
- a. Government demand deposits in Rupiah as at December 31, 2010 included as follows:
 - 1) Accounts of Ministry of Finance given interest by Bank Indonesia:
 - a) General State Cash Account (Rekening Kas Umum Negara – RKUN) amounted IDR2,120,439 million.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010

Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

- b) Rekening Penempatan terdiri dari Rekening Kas Penempatan sebesar Rp9.320.902 juta, untuk menampung kelebihan dana di RKUN, dan rekening lainnya yang dikategorikan sebagai Rekening Penempatan oleh Kemenkeu sebesar Rp50.668.682 juta, antara lain terdiri dari:
 - i) Rekening giro Sub BUN dalam rangka program penjaminan sebesar Rp82.107 juta yang dananya berasal dari penerbitan SUP Nomor SU-004/ MK/1999.
 - ii) Rekening Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebesar Rp49.496.410 juta, antara lain untuk menampung dana Sisa Anggaran Lebih (SAL).
- 2) Rekening Pemerintah Lainnya, sebesar Rp27.065 juta.
- b. Giro Pemerintah dalam valuta asing per 31 Desember 2010, terdiri dari:
 - 1) Rekening Kemenkeu yang diberikan jasa giro oleh Bank Indonesia, terdiri dari:
 - a) Rekening Kas Umum Negara terdiri dari RKUN sebesar USD1,755,346.78 dan JPY20,860,931,769 atau setara dengan Rp2.316.434 juta.
 - Rekening Penempatan terdiri dari Rekening Kas Penempatan dalam USD sebesar USD1,777,904,811.97 atau setara dengan Rp15.985.142 juta, serta rekening lainnya yang telah dikategorikan sebagai Rekening Penempatan oleh Kemenkeu dalam valuta USD dan non USD yang setara dengan Rp10.314.442 juta.
 - 2) Rekening Pemerintah Lainnya dalam valas, yang setara dengan Rp240.977 juta.

- b) Placement accounts consisted of Placement Cash Accounts amounted to IDR9,320,902 million, to keep excess funds in RKUN, and other accounts belonging to General State Treasury (Bendaharawan Umum Negara – BUN) besides RKUN that has been categorized as Placement Accounts by the Ministry of Finance of IDR50,668,682 million consisted of:
 - i) Sub BUN demand deposits for the purpose of quarantee program amounted to IDR82,107 million with funds raised from the issuance of SUP Number SU-004/MK/1999.
 - ii) Directorate General of Treasury account amounted to IDR49,496,410 million, among others to keep excess funds from Budget Surplus (Sisa Anggaran Lebih – SAL).
- 2) Other Government Account amounted to IDR27.065 million.
- b. Government demand deposits in foreign currency as at December 31, 2010 consisted of:
 - 1) Bank Indonesia has set an interest rate for Accounts of Ministry of Finance, with details as follow:
 - a) State Cash Account amounted to USD1,755,346.78 and *JPY20,860,931,769* or equivalent to IDR2,316,434 million.
 - Placement accounts consisted of Cash Placement Accounts amounted to USD1,777,904,811.97 or equivalent to IDR15,985,142 million and other accounts belonging to BUN besides RKUN that has been categorized as Placement Accounts by the Ministry of Finance in USD and non USD equivalent to IDR10,314,442 million
 - 2) Other Government Account in foreign currency equivalent to IDR240,977 million.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010

Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

Tingkat bunga atas RKUN Rupiah, RKUN valuta

USD, dan RKUN valuta asing non USD per tahun adalah 0,1%. Sementara tingkat bunga atas rekening penempatan dalam rupiah, rekening penempatan dalam valuta USD, dan rekening penempatan valuta asing non USD per tahun ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang mengatur mengenai koordinasi pengelolaan Uang Negara dan untuk pertama kali berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 17/KMK.05/2009 dan Nomor 11/3/KEP.GBI/2009 ditetapkan sebesar 65% dari suku bunga acuan.

19. Giro Bank

Giro Bank adalah saldo giro bank umum yang minimal berisi Giro Wajib Minimum (GWM) yang harus dipenuhi oleh Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing.

Saldo Giro Bank per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

The interest rate for RKUN in Rupiah, RKUN in USD, and RKUN in non USD is 0.1% per annum. The interest rates for placement accounts in Rupiah, placement accounts in USD, and placement accounts in non USD per annum is determined based on The Agreement between The Ministry of Finance and The Governor of Bank Indonesia concerning Coordination of the Management of State Funds and for the first time based on the Joint Regulation between The Ministry of Finance and the Governor of Bank *Indonesia Number 17/KMK.05/2009 and Number* 11/3/KEP.GBI/2009 was determined at 65% of the reference interest rate.

19. Bank Demand Deposits

Bank demand deposits are the balance of demand deposits of commercial banks in order to comply with Minimum Reserve Requirement (Giro Wajib Minimum -GWM). GWM is regulated by Bank Indonesia Regulation Number 12/19/PBI/2010 dated October 4, 2010 concerning Minimum Reserve Requirement of Commercial Banks in Bank Indonesia in Rupiah and Foreign Currency.

Bank Demand Deposits as at December 31, 2010 and December 31, 2009 were as follows:

	31 Desember 2010 December 31, 2010	31 Desember 2009 December 31, 2009	
	Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions	
- Dalam Rupiah	159.105.607	89,916,989	- In Rupiah
- Dalam valuta asing	7.057.702 166.163.309	11,027,449 100,944,438	- In Foreign Currency

20. Giro Lainnya

20 Other Demand Denosits

o. Giro Lainnya	20. Other Demand Deposits				
	31 Desember 2010 December 31, 2010	31 Desember 2009 December 31, 2009			
	Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions		_	
Rekening Giro IMF	1,023,825	919,700	IMF		
Rekening Giro Bank Dunia	16,167	41,623	IBRD		
Rekening Giro ADB	15,831	26,987	ADB		
Rekening Giro Lainnya	484,315 1,540,138	600,854 1,589,164	Others		

172 Bank Indonesia Laporan Tahunan 2010 Bank Indonesia 2010 Annual Report 173

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010 Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

Rekening giro IMF merupakan gabungan dari IMF *Account No. 1* dan IMF *Account No. 2*. IMF Account No. 1 digunakan untuk transaksi keuangan dengan IMF antara lain terkait dengan pembayaran kuota Indonesia dalam Rupiah, *purchases* dan *repurchases* fasilitas IMF, sedangkan IMF *Account No. 2* digunakan untuk transaksi administratif IMF di Indonesia.

Sebagai anggota IMF, Indonesia berkewajiban untuk memberikan kontribusi keuangan kepada IMF yang besarnya tergantung dari kuota masing-masing negara anggota yang nilainya ditetapkan oleh Dewan Gubernur IMF. Kontribusi keuangan negara anggota selanjutnya digunakan sebagai sumber pendanaan oleh IMF untuk membantu negara anggota yang mengalami kesulitan likuiditas dalam bentuk fasilitas pinjaman, seperti *Stand-By Arrangement* (SBA), *Extended Fund Facility* (EFF), dan *Flexible Credit Line* (FCL). Total kuota Indonesia per 31 Desember 2010 adalah sebesar SDR2,079,300,000.00.

Rekening giro IMF direvaluasi setiap tanggal 30 April berdasarkan kurs yang ditetapkan IMF pada tanggal tutup buku IMF. Penyesuaian kurs ini atas beban atau untuk untung Bank Indonesia dan Pemerintah. Bank Indonesia menanggung atau memperoleh manfaat penyesuaian nilai lawan SDR yang berkaitan dengan purchases fasilitas IMF (IMF Account No. 1), sedangkan Pemerintah menanggung atau memperoleh manfaat penyesuaian kurs yang berkaitan dengan pembayaran kuota dalam Rupiah (IMF Account No. 1) dan rekening transaksi administratif antara Pemerintah Indonesia dengan IMF dalam mata uang lokal (IMF Account No. 2). Revaluasi yang menjadi bagian Pemerintah tersebut apabila diselesaikan dengan menerbitkan promissory note akan menambah atau mengurangi nilai *promissory note* Pemerintah yang diadministrasikan dan disimpan oleh Bank Indonesia. Total nilai *promissory note* per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp25.329.807 juta.

21. Sertifikat Bank Indonesia

Sertifikat Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 tercatat masing-masing sebesar Rp195.500.837 juta dan Rp254.191.592 juta. Rincian Sertifikat Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

The IMF Demand Deposit accounts consist of IMF Account No. 1 and IMF Account No. 2. IMF Account No. 1 is used for financial transaction related to Indonesia's quota payment in Rupiah, purchases and repurchases of IMF facilities, whereas IMF Account No. 2 is used for administrative transaction account.

As a member of IMF, Indonesia is obliged to contribute financially for IMF; the amount is related to the quota of each member whereas the value is determined by IMF Board of Governor. The contribution is utilized as fund sources for IMF to support member in liquidity difficulties in form of loan facilities such as Stand-By Arrangement (SBA), Extended Fund Facilities (EFF), dan Flexible Credit Line (FCL). Indonesia's total quota as at December 31, 2010 was SDR2,079,300,000.00.

The balance of IMF Demand Deposits Account is revalued every April 30 based on the exchange rate at the closing date of IMF. This exchange rate adjustment is on expense or on beneficiary of Bank Indonesia and Government. Bank Indonesia is liable or beneficial from SDR exchange rate related to purchases of IMF facilities (IMF Account No.1), whereas the Government is liable or beneficial from the exchange rate adjustment in relation to the quota payment in Rupiah (IMF Account No. 1) and administrative transaction account between the Indonesian Government and IMF in local currency (IMF Account No. 2). The revaluation that the Government is liable for, if settled by Promissory Note, will add or subtract the balance of the Government's promissory note administered and kept by Bank Indonesia. The promissory note as at December 31, 2010 amounted to IDR25,329,807 million.

21. Bank Indonesia Certificates

Bank Indonesia Certificates as at December 31, 2010 and December 31, 2009 amounted to IDR195,500,837 million and IDR254,191,592 million respectively, with details as follows:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010

Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

	31 Desember 2010 December 31, 2010	31 Desember 2009 December 31, 2009	
	Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions	
Nilai nominal menurut jangka waktu:			Nominal value by period:
- 1 bulan	0	172.672.400	- 1 month
- 3 bulan	10.000.000	62.962.700	- 3 month
- 6 bulan	135.219.999	19.887.600	- 6 month
- 9 bulan	54.892.997		- 9 month
Dikurangi: Diskonto (bunga dibayar di muka)	(4.612.159)	(1.331.108)	Less: Un-amortized discount
yang belum diamortisasi			(interest paid in advance)
	195.500.837	254.191.592	
Kisaran Tingkat Diskonto SBI:			SBI discount rate range:
- 1 bulan	6,20% - 6,46%	6,46% - 10,33%	- 1 month
- 3 bulan	6,37% - 6,64%	6,54% - 10,61%	- 3 month
- 6 bulan	6,26% - 6,73%	6,62% - 11,30%	- 6 month
- 9 bulan	6,60% - 6,84%		- 9 month

22. Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Sertifikat Bank Indonesia Syariah pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 tercatat masing-masing sebesar Rp2.997.000 juta dan Rp4.341.200 juta. Rincian Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah sebagai berikut:

22. Bank Indonesia Sharia Certificates

Bank Indonesia Sharia Certificates as at December 31, 2010 and December 31, 2009 amounted to IDR2,997,000 million and IDR4,341,200 million respectively, with details as follows:

	31 Desember 2010 December 31, 201		
	Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions	
Nilai nominal menurut jangka waktu:			1 month BI Sharia Certificate bonus rate range:
- 28 hari	0	4.341.200	- 28 days
- 91 hari	1.576.000	0	- 91 days
- 182 hari	1.421.000	0	- 182 days
	2.997.000	4.341.200	
Kisaran Tingkat Imbalan SBIS:			1 month BI Sharia Certificate bonus rate range:
- 28 hari	6,19877% - 6,45819%	6,45885% - 10,32545%	- 28 days
- 91 hari	6,36967% - 6,63677%	-	- 91 days
- 182 hari	6,26221% - 6,42326%	-	- 182 days

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010 Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

23. Penempatan Berjangka

Penempatan Berjangka merupakan penempatan dana rupiah milik peserta Operasi Moneter secara berjangka di Bank Indonesia, sesuai dengan PBI Nomor 12/11/ PBI/2010 tanggal 2 Juli 2010 mengenai Operasi Moneter.

Penempatan Berjangka pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing tercatat sebesar Rp171.192.385 juta dan Rp49.367.267 juta. Rincian Penempatan Berjangka adalah sebagai berikut:

23. Term Deposits

Term Deposits are Rupiah placement owned by participants of Monetary Operation in Bank Indonesia for a period of time according to Bank Indonesia Regulation Number 12/11/PBI/2010 dated July 2, 2010.

Term Deposits as at December 31, 2010 and December 31, 2009 amounted to IDR171,192,385 million and IDR49,367,267 million respectively, with detail as follows:

	31 Desember 2010 December 31, 2010	31 Desember 2009 December 31, 2009	
	Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions	
Nilai nominal periode 1-365 hari	172.645.500	49.417.000	Nominal value of 1-365 days period
Dikurangi: Diskonto (bunga dibayar di muka) yang belum diamortisasi	(1.453.115)	(49.733)	Less: Un-amortized discount (interest paid in advance)
yang belum diamordsasi	171.192.385	49.367.267	III advance)
Tingkat Diskonto Penempatan Berjangka			Term Deposit discount rate range by period:
- 1 hari <i>Over Night</i>	-	7,23% - 9,25%	- 1 days Over Night
- 2 s/d 90 hari	6,06% - 6,35%	6,23% - 9,25%	- 2 to 90 days
- > 90 hari	6,21% - 6,32%	-	- > 90 days

24. Penempatan Dana

Penempatan Dana merupakan penempatan dana rupiah oleh bank di Bank Indonesia, sesuai dengan PBI Nomor 12/11/PBI/2010 tanggal 2 Juli 2010 mengenai Operasi Moneter.

Penempatan Dana pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing tercatat sebesar Rp92.038.216 juta dan Rp33.008.194 juta. Rincian Penempatan Dana adalah sebagai berikut:

24. Deposit Facilities

Deposit Facilities are Rupiah Fund placement by bank in Bank Indonesia for an overnight period of time according to Bank Indonesia Regulation Number 12/11/PBI/2010 dated July 2, 2010 concerning Monetary Operation.

Deposit Facilities as at December 31, 2010 and December 31, 2009 amounted to IDR92,038,216 million and IDR33,008,194 million respectively, with detail as follows:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010 Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

	31 Desember 2010 December 31, 2010	31 Desember 2009 December 31, 2009	
	Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions	
Nilai nominal periode 1 hari Dikurangi: Diskonto (bunga dibayar	92.080.400	33.030.200	Nominal value of 1 day period Less: Un-amortized discount
di muka) yang belum diamortisasi	(42.184)	(22.006)	(interest paid in advance)
	92.038.216	33.008.194	
Tingkat bunga Penempatan Dana			Depocit Facilites Interest Rate
- 1 hari <i>Over Night</i>	5.50% - 6.00%	6.00% - 8.75%	- 1 day Over Night

25. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 tercatat masing-masing sebesar Rp9.175.700 juta dengan kisaran tingkat imbalan FASBIS 5,50% - 6,00% dan Rp3.386.000 juta dengan kisaran tingkat imbalan FASBIS 6,00% - 7,00%. Sejak tanggal 20 April 2009 telah dilakukan setelmen FASBIS yang pertama, berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/8/DPM tanggal 27 Maret 2009 perihal Tata Cara Transaksi Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dalam Rupiah (FASBIS).

26. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (*Reverse Repo*) pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 tercatat masing-masing sebesar Rp7.000.320 juta dengan *repo rate* sebesar 6,00% - 6,45% dan Rp2.556.042 juta dengan *repo rate* sebesar 6,45%.

Transaksi *Reverse Repo* berjangka waktu satu hari sampai dengan satu tahun. Sejak tanggal 6 Maret 2009 telah dilakukan setelmen *Reverse Repo* yang pertama, berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/37/DPM tanggal 13 November 2008 perihal Transaksi *Reverse Repo* Surat Utang Negara Dengan Bank Indonesia Dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka.

27. Pinjaman dari Pemerintah

Pinjaman dari Pemerintah terdiri dari:

25. Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities

Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah – FASBIS) as at December 31, 2010 and December 31, 2009 amounted to IDR9,175,700 million with a bonus rate range of 5.50% - 6.00% and IDR3,386,000 million with a bonus rate range of 6.00% - 7.00% respectively. The first settlement of FASBIS took place on April 20, 2009, in accordance with Circular Letter Number 11/8/DPM dated March 27, 2009 concerning Procedure for Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities Transaction in Rupiah (FASBIS).

26. Securities Sold Under Repurchase Agreements

Securities Sold Under Repurchase Agreements as at December 31, 2010 and December 31, 2009 amounted to IDR7,000,320 million with a repo rate of 6.00% - 6.45% and IDR2,556,042 with a repo rate of 6.45% respectively.

Reverse Repo transactions have a time limit of one day up to one year. The first Reverse Repo settlement was performed on March 6, 2009, in accordance with Circular Letter Number 10/37/DPM dated November 13, 2008 concerning Government Bonds Reverse Repo Transactions With Bank Indonesia For The Purpose of Open Market Operation.

27. Loans from Government

Loans from Government consisted of:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010 Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

	31 Desember 2010 December 31, 2010	31 Desember 2009 December 31, 2009	
	Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions	
- Dalam Rupiah	117.561	131.392	- In Rupiah
- Dalam valuta asing	22.834	31.830	- In Foreign Currency
	140.395	163.222	

Pinjaman dari Pemerintah dalam Rupiah antara lain terdiri dari penerimaan pinjaman Pemerintah dalam rangka program *Two Step Loan* (TSL) yaitu ASEAN Japan Development Fund for Indonesia (AJDF) untuk Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) sebesar Rp116.860 juta.

Pinjaman dari Pemerintah dalam valuta asing per 31 Desember 2010 adalah pinjaman dari pemerintah dalam rangka TSL dari Asian Development Bank (ADB) sebesar USD2,539,620.00 atau setara dengan Rp22.834 juta.

28. Pinjaman Luar Negeri

Pinjaman Luar Negeri terdiri dari:

Loans from Government in Rupiah consisted of Government loans revenue due to Two Step Loans (TSL), i.e. ASEAN Japan Development Fund for Indonesia (AJDF) for Major Commercial Field (Perkebunan Besar Swasta Nasional - PBSN) program amounted to IDR116,860 million.

Loans from Government in foreign currency as at December 31, 2010 consisted of loans from Government due to Two Step Loans from Asian Development Bank (ADB) amounting to USD2,539,620.00 or equivalent to IDR22,834 million.

28. Foreign Borrowings

Foreign borrowings consisted of:

	31 Desember 2010 December 31, 2010	31 Desember 2009 December 31, 2009	
	Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions	
a. Pinjaman sindikasi dari bank luar negeri	5.182.599	5.695.629	a. Syndicated loans from foreign banks
b. Pinjaman non sindikasi dari bank luar neger	i 32.350	37.204	b. Non-syndicated loans from foreign banks
c. Bunga yang masih harus dibayar	2.903 5.217.852	3.342 5.736.175	c. Deferred interest payables

a. Pinjaman Sindikasi dari Bank Luar Negeri

Pinjaman Sindikasi dari bank luar negeri merupakan pinjaman sindikasi dari bank-bank internasional kepada Bank Indonesia atas nama Pemerintah yang digunakan untuk cadangan devisa nasional. Pinjaman Sindikasi terdiri dari:

a. Syndicated Loans from Foreign Banks

Syndicated loans from foreign banks represent syndicated loans from international banks to Bank Indonesia on behalf of the Government for monetary reserve purposes. Syndicated loans consisted of:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010 Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

	31 Desember 2010 December 31, 2010	31 Desember 2009 December 31, 2009	
	Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions	
1) Pinjaman Sindikasi Tahun 1994	1.001.984	1.177.567	1) Syndicated loans of 1994
2) Pinjaman Sindikasi Tahun 1995	4.180.615	4.518.062	2) Syndicated loans of 1995
	5.182.599	5.695.629	

1) Pinjaman Sindikasi Tahun 1994

Merupakan pinjaman sindikasi dari kreditur luar negeri dengan Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Hongkong Branch yang bertindak sebagai *agent*, jumlah pinjaman sebesar USD500,000,000.00 dan pinjaman tersebut ditandatangani pada tanggal 28 Maret 1994. Pembayaran pokok dilakukan semesteran vaitu setiap bulan Maret dan September. Pembayaran pokok pertama dilakukan pada tanggal 28 Maret 2002 dan terakhir pada tanggal 28 Maret 2013. Tingkat bunga adalah LIBOR + 0,625% pada tahun pertama dan LIBOR + 0,875% pada tahun selanjutnya. Sesuai Master Loan Agreement (MLA) penarikan pinjaman dapat dilakukan dalam bentuk valuta USD dan JPY.

Dari USD500,000,000.00 pinjaman tersebut hanya ditarik sebesar USD350,000,000.00. Dalam rangka memenuhi asas comparability treatment dari kesepakatan Paris Club I dan II telah dilakukan *rescheduling* pokok pinjaman sindikasi melalui London Club I dan II. Pada London Club I telah dilakukan amandemen pertama pada tanggal 28 Maret 1999 yakni menjadwal ulang pinjaman pokok sebesar USD210,000,000.00 untuk pembayaran periode 28 September 2000 sampai dengan 29 Maret 2009. Sedangkan London Club II telah dilakukan amandemen kedua tanggal 28 September 2000 yakni menjadwal ulang pinjaman pokok sebesar USD150,000,000.00 untuk periode pembayaran 28 Maret 2002 sampai dengan 28 Maret 2013. Tingkat bunga pinjaman yang diamandemen adalah LIBOR + 0,875% dan TIBOR + 0,875%.

1) Syndicated Loans of 1994

Represents a syndicated loan from foreign creditors with Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Hong Kong Branch as the agent, amounted to USD500,000,000.00, and was signed on March 28, 1994. Principal repayments are conducted semi-annually on March and September. First principal repayment was settled on March 28, 2002 and the final repayment will be due on March 28, 2013. The interest rates are LIBOR + 0.625% for the first year and LIBOR + 0.875% for subsequent years. According to the Master Loan Agreement (MLA), loan withdrawals can be made in USD and JPY.

From the ceiling amount of USD500,000,000.00, the amount withdrawn was USD350,000,000.00. *In order to comply with the comparability* treatment principle adopted from the agreement of Paris Club I and Paris Club II, the syndicated loan principal has been rescheduled through the agreement of London Club I and II. In London Club I, the first amendment took place on March 28, 1999, i.e. to reschedule loan principal amounted to USD210,000,000.00 for the payment period of September 28, 2000 to March 29, 2009. Meanwhile in London Club II, the second amendment took place on September 28, 2000, i.e. to reschedule loan principal amounted to USD150,000,000.00 for the payment period of March 28, 2002 to March 28, 2013. The interest rates amended were LIBOR + 0.875% and TIBOR + 0.875%.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010 Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

Saldo pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar USD75,136,460.02 atau setara dengan Rp675.552 juta dan JPY2,959,892,368 atau setara dengan Rp326.432 juta.

2) Pinjaman Sindikasi Tahun 1995

Merupakan pinjaman sindikasi dari kreditur luar negeri dengan The Mizuho Corporate Bank, Ltd., Singapore *Branch* yang bertindak sebagai *agent*, jumlah pinjaman sebesar USD500,000,000.00 dan pinjaman tersebut ditandatangani pada tanggal 14 Juni 1995. Pembayaran pokok dilakukan secara semesteran yaitu setiap bulan Juni dan Desember dengan pembayaran pokok pertama tanggal 14 Juni 2002 dan terakhir tanggal 14 Desember 2013. Tingkat bunga adalah LIBOR + 0,625% dan TIBOR + 0,625%. Sesuai *Master Loan Agreement* (MLA) penarikan pinjaman dapat dilakukan dalam bentuk valuta USD dan JPY.

Dalam rangka memenuhi asas comparability treatment kesepakatan Paris Club II dan III telah dilakukan penjadwalan ulang pokok pinjaman sindikasi melalui London Club II dan III. Dalam London Club II telah dilakukan amandemen pada tanggal 28 September 2000, yakni menjadwal ulang pinjaman pokok sebesar USD200,000,000.00 dengan pembayaran periode 14 Juni 2004 sampai dengan 14 Desember 2013. Tingkat bunga untuk pinjaman yang telah diamandemen adalah LIBOR + 0,875% dan TIBOR + 0,875%. Sedangkan pada London Club III telah dilakukan amandemen kedua tanggal 6 September 2002 yakni menjadwal ulang pokok pinjaman sebesar USD300,000,000.00 untuk periode pembayaran 14 Desember 2008 sampai dengan 14 Desember 2019. Tingkat bunga pinjaman yang diamandemen adalah LIBOR + 0,875% dan TIBOR + 0,875%.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar USD349,747,200.00 atau setara dengan Rp3.144.577 juta dan JPY9,394,164,670 atau setara dengan Rp1.036.038 juta.

The balances as at December 31, 2010 amounted to USD75,136,460.02 or equivalent to IDR675.552 million and JPY2,959,892,368 or equivalent to IDR326,432 million.

2) Syndicated Loans of 1995

Represents a syndicated loan from foreign banks with The Mizuho Corporate Bank, Ltd., Singapore Branch as the agent, amounted to USD500,000,000.000, and was signed on June 14, 1995. Principal repayments are conducted semi-annually on June and December. First principal repayment was settled on June 14, 2002 and the final repayment will be due on December 14, 2013. The interest rates are LIBOR + 0.625% and TIBOR + 0.625%. According to the Master Loan Agreement (MLA), loan withdrawals can be made in USD and JPY.

In order to comply with comparability treatment principle adopted from the agreement of Paris Club II and Paris Club III, the syndicated loan principal has been rescheduled through the agreement of London Club II and III. In London Club II, the amendment took place on September 28, 2000, i.e. to reschedule loan principal amounted to USD200,000,000.00 for payment period of June 14, 2004 to December 14, 2013. Interest rates for the amended loan are LIBOR + 0.875% and TIBOR +0.875%. Meanwhile, in London Club III, the second amendment took place on September 6, 2002, i.e. to reschedule loan principal amounted to USD300,000,000.00 for payment period of December 14, 2008 to December 14, 2019. The interest rates amended were LIBOR + 0.875% and TIBOR + 0.875%.

The balances as at December 31, 2010 amounted to USD349,747,200.00 or equivalent to IDR3,144,577 million and JPY9,394,164,670 or equivalent to IDR1,036,038 million.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010 Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

b. Pinjaman Non Sindikasi dari Bank di Luar Negeri

Posisi pinjaman non sindikasi adalah sebesar USD3,598,097.20 atau setara dengan Rp32.350 juta per 31 Desember 2010, dan sebesar USD3,957,906.92 atau setara dengan Rp37.204 juta per 31 Desember 2009. Pinjaman ini diberikan oleh International Cooperation and Development Fund (pengalihan dari The Export Import Bank of the Republic of China, Taipei) dengan plafon sebesar USD10,000,000.00 dan tingkat bunga 3,5% setahun dan digunakan untuk melanjutkan, meningkatkan, mengembangkan dan memperkenalkan program kredit koperasi. Pinjaman ini diangsur dalam 36 cicilan secara semesteran mulai tanggal 27 April 2003 dan akan berakhir pada tanggal 27 Oktober 2020.

c. Bunga yang Masih Harus Dibayar

Perhitungan bunga atas Pinjaman Luar Negeri yang telah menjadi beban namun belum dibayar karena belum jatuh tempo adalah sebesar Rp2.903 juta pada tanggal 31 Desember 2010 dan Rp3.342 juta pada tanggal 31 Desember 2009.

29. Kewajiban Lain-lain

Kewajiban Lain-lain per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 terdiri dari:

b. Non-Syndicated Loans from Foreign Banks

The balance of non-syndicated loans amounted to USD3,598,097.20 or equivalent to IDR32,350 million as at December 31, 2010, and USD3,957,906.92 or equivalent to IDR37,204 million as at December 31, 2009. The loans were provided by the International Cooperation and Development Fund (was The Export Import Bank of the Republic of China -Taipei) with the ceiling amounted to USD10,000,000.00 and interest rate of 3.5% per annum, and utilized to continue, improve, and expand or introduce cooperative credit programs. The loan will be repaid in 36 semiannual installments, starting from April 27, 2003 and the final repayment will be due on October 27, 2020.

c. Deferred Interest Payables

Deferred Interest Payables of Foreign Borrowings amounted to IDR2,903 million as at December 31, 2010 and IDR3,342 million as at December 31, 2009.

29. Other Liabilities

Other Liabilities as at December 31, 2010 and December 31, 2009 consisted of:

31 Desember 2010 December 31, 2010 31 Desember 2009 December 31, 2009

	Valas <i>OCY</i>	Rp juta IDR millions	Valas <i>OCY</i>	Rp juta IDR millions	
- Setoran jaminan pembukaan L/C dalam valas	-	601.981	-	840.218	- Collateral for opening L/C in foreign currency
- Kewajiban Imbalan Kerja	-	1.790.777	-	2.580.056	- Employee benefits liabilities
- Alokasi Hak Tarik Khusus (SDR)	1,980,435,720.00	27.421.967	1,980,438,720.00	29.078.207	- SDR Allocation
- Utang pajak	-	23.448	-	10.991	- Tax Payables
- Lainnya	-	20.829.839	-	1.863.484	- Others
		50.668.012		34.372.956	

180 Bank Indonesia 2010 Annual Report 181

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010

a. Kewajiban Imbalan Kerja

Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

a. Employee Benefits

Bank Indonesia menyelenggarakan program imbalan kerja yang terdiri dari imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Perhitungan imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya dilakukan oleh aktuaris independen pada posisi 31 Desember 2010 dengan tingkat diskonto sebesar 9,75% untuk Manfaat Pensiun serta 8,5% untuk Tunjangan Hari Tua (THT), Imbalan Pasca Kerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang lainnya.

Imbalan Pasca Kerja terdiri dari program pensiun manfaat pasti yang dikelola oleh DAPENBI, dan Tunjangan Hari Tua (THT) yang dikelola oleh YKKBI, serta imbalan pasca kerja tanpa pendanaan antara lain berupa Uang Perpisahan Pegawai. Imbalan Kerja Jangka Panjang lainnya antara lain berupa Uang Cuti Besar dan Uang Penghargaan Pengabdian.

Mutasi aktiva, kewajiban, dan beban imbalan kerja pada periode Januari sampai dengan Desember tahun 2010 adalah sebagai berikut: Bank Indonesia provides post and long-term employment benefit program. The actuarial calculation on post and long-term employment benefit program was performed by an independent actuary for the position of December 31, 2010 with a discount rate of 9.75% for pension benefits and 8.5% for Retirement Benefits (Tunjangan Hari Tua – THT), Post and Long-Term Employement Benefits.

Post employment programs consists of defined benefit pension plan managed by DAPENBI, Retirement Benefit Program (Tunjangan Hari Tua - BKP and Baperum) managed by YKKBI, and other post employment benefit programs without funding which consists of Employee Farewell Paid Leave. Other long-term benefits are such as Grand Leaves and Long Service Awards.

Movement of employee benefit assets, liabilities and expenses for the period of January to December 2010 were as follows:

Pajak untuk

	Manfaat Pensiun Pension Benefits	ТНТ <i>ТНТ</i>	Imbalan Pasca Kerja Other Post Employment Benefits	Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya Other Long-term Benefits	Imbalan Pasca Kerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya <i>Tax</i>	Jumlah <i>Total</i>
	Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Saldo Aktiva/(Kewajiban) 31 Desember 2009 Assets/(Liabilities) Balance as at Dec 31, 2009	(405.097)	(894.325)	(287.821)	(848.001)	(144.812)	(2.580.056)
Beban Imbalan Kerja Employee Benefit Expense	(110.008)	(304.960)	(52.493)	(279.896)	(41.893)	(789.250)
Kontribusi Bank Indonesia Employer Contribution	121.054	116.316	-	-	-	237.370
Pembayaran Manfaat Benefit Payment	-	-	30.670	157.099	24.215	211.984
Pemulihan Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Employee Benefit Liability Recovery	-	1.129.175	-	-	-	1.129.175
Saldo Aktiva/(Kewajiban) 31 Desember 2010 Assets/(Liabilities) Balance as at Dec 31, 2010	(394.051)	46.206	(309.644)	(970.798)	(162.490)	(1.790.777)

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010

Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

Total kewajiban imbalan kerja manfaat pensiun, THT, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, dan pajak untuk imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp1.790.777 juta. Kewajiban Imbalan Kerja THT telah disesuaikan dengan komposisi kekayaan pendanaan Baperum sesuai dengan keputusan rapat Pembina YKKBI tanggal 25 April 2011 – lihat Catatan D.3.

Pada posisi 31 Desember 2010, pendanaan DAPENBI berasal dari iuran pegawai dan pemberi kerja masing-masing sebesar 7% dan 15% dari penghasilan dasar pensiun. Berdasarkan laporan Aktuaris Berkala DAPENBI Nomor DP-88/IV/2010 oleh aktuaris independen, pada posisi 31 Desember 2009 DAPENBI berada pada kondisi Kualitas Pendanaan tingkat II, sehingga Bank Indonesia memberikan iuran tambahan sebesar Rp4.692 juta per bulan kepada DAPENBI terhitung sejak bulan Januari 2010 selama 36 bulan atau sampai dengan rasio pendanaan DAPENBI mencapai 100%.

Pada posisi 31 Desember 2010, pendanaan YKKBI berasal dari iuran THT dari Bank Indonesia sebesar 20% dari gaji pokok dengan memperhatikan indeks kota.

b. Alokasi Hak Tarik Khusus

IMF mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan SDR (Article XV Section 1 dan Article XVIII) untuk menambah likuiditas global jika dibutuhkan dan untuk menambah cadangan devisa negara-negara anggota dengan biaya relatif murah. Keputusan Alokasi SDR tersebut memerlukan dukungan 85% suara negara anggota IMF. Tidak seperti halnya fasilitas pinjaman IMF pada umumnya, Alokasi SDR tidak mengandung conditionality. Besaran suku bunga Alokasi SDR sama dengan suku bunga Hak Tarik Khusus, sehingga negara anggota akan memperoleh pendapatan bunga bila saldo Hak Tarik Khusus lebih besar dibandingkan dengan Alokasi SDR dan sebaliknya negara anggota akan membayar bunga bila saldo Hak Tarik Khusus lebih kecil dibandingkan dengan Alokasi SDR. Atas pengelolaan SDR tersebut, IMF mengenakan biaya administrasi yang besarnya kurang dari 0,01% per tahun.

Total Employee Benefits liabilities for pension benefits, Other Post Employment Benefits, Tax and Other Long-Term Benefits as at December 31, 2010 amounted to IDR1,790,777 million. The balance of THT has been adjusted with the Baperum funding composition according to the meeting decision of YKKBI Board of Advisor dated April 25, 2011 - see note D.3.

As at December 31, 2010, DAPENBI's funding was derived from employees' and Bank Indonesia's contribution amounted to 7% and 15% respectively, based on basic pension salary. According to DAPENBI Periodic Actuary Statement Number DP-88/IV/2010 by Independent Actuary, as at December 31, 2009 DAPENBI has been in condition of Funding Quality Second Grade, therefore Bank Indonesia rendered additional fee amounted IDR4,692 million to DAPENBI since January 2010 up to 36 months or until funding ratio of DAPENBI reaches 100%.

As at December 31, 2010, YKKBI's funding was derived from Bank Indonesia amounted to 20% of basic salary with consideration to the city index.

b. SDR Allocation

IMF has the authority to allocate SDR (Article XV Section 1 and Article XVIII) to add global liquidity if needed and foreign reserves of member countries with minimum cost. The decision for SDR Allocation needed the voting support of 85% of IMF member countries. SDR Allocation has no conditionality. SDR allocation's interest is the same as the interest of Special Drawing Rights, so that member countries will get interest income when their SDR balance is bigger than SDR Allocation. On the other hand, members will have to pay interest when their SDR balance is smaller than SDR Allocation. IMF charges administration fee less than 0.01% annually to manage SDR.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010 Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

Sejak diciptakannya SDR pada tahun 1969, IMF telah tiga kali memberikan Alokasi Umum SDR kepada Negara anggota yaitu: 1) Alokasi SDR yang disampaikan secara bertahap pada periode tahun 1970-1972; 2) Alokasi SDR yang disampaikan secara bertahap pada periode tahun 1979-1981; dan 3) Alokasi SDR 28 Agustus 2009. Di samping Alokasi Umum SDR, IMF juga telah memberikan Alokasi Khusus SDR yang dilakukan satu kali pada tahun 1997, namun baru dialokasikan kepada negara anggota pada tanggal 9 September 2009 karena persetujuan 85% negara anggota baru diperoleh pada bulan Agustus 2009.

Berdasarkan surat IMF tanggal 3 September 2009, pencatatan Alokasi SDR diklasifikasikan sebagai other debt liabilities dalam kelompok long-term liabilities sesuai Balance of Payment Manual 6 (BPM6). Klasifikasi ini sesuai dengan karakteristik Alokasi SDR yang memiliki jangka waktu panjang sehingga dikategorikan sebagai hutang jangka panjang. Atas dasar guidance tersebut, Alokasi SDR yang pada tahun 2008 diklasifikasikan sebagai Giro Pemerintah selanjutnya diklasifikasikan menjadi kewajiban lain-lain bank sentral atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

c. Utang Pajak

Saldo utang pajak per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp23.448 juta dan Rp10.991 juta. Penjelasan lebih rinci mengenai utang pajak dijelaskan dalam Catatan C.30.

d. Lainnya

Saldo Kewajiban Lainnya per 31 Desember 2010 sebesar Rp20.829.839 juta terutama berupa *cash collateral* atas penempatan Bank Indonesia pada *Third Party Securities Lending* (TPSL) sebesar Rp19.683.577 juta.

30. Perpajakan

a. Penerimaan (Beban) Pajak Penghasilan

Penerimaan (Beban) pajak penghasilan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut: Since the inception of SDR in 1969, IMF has allotted SDR General Allocation to member countries three time: 1) SDR Allocation allotted in several phases during the period 1970 – 1972; 2) SDR Allocation allotted in several phases during the period 1979 – 1981; and 3) August 28, 2009. Other than General SDR Allocation, IMF has also added Special SDR Allocation once in 1997, yet it was allocated to member countries on September 9, 2009 since it was approved by 85% of IMF member countries in August 2009.

Based on IMF letter dated September 3, 2009, SDR Allocation recording is classified as other debt liabilities in the long-term liabilities section according to the guidance in The Balance of Payment Manual 6 (BPM6). This classification is fitted with characteristic of SDR Allocation which is long term and classify as long-term liabilities. Based on the guidance, SDR Allocation that was classified as Government Demand Deposits in 2008 became classified as central bank other liabilities on behalf of the Government of The Republic of Indonesia

c. Tax Payable

The balance of tax payable as at December 31, 2010 and December 31, 2009 amounted to IDR23,448 million and IDR10,991 million respectively. Detailed explanation can be found in Note C.30.

d. Others

The balance of Other Liabilities as at December 31, 2010 amounted to IDR20,829,839 million, mainly consisted of cash collateral for placement of Bank Indonesia's marketable securities on Third Party Securities Lending (TPSL) amounted IDR19,683,577 million.

30. Taxation

a. Income Tax Revenues (Expensse)

Income tax revenues (expenses) for the period of January 1 to December 31, 2010 and 2009 were as follows:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010

Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

	Jan - Des 2010 Jan - Dec 2010	Jan - Des 2009 Jan - Dec 2009	
	Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions	
Pajak Kini	0	0	Current Tax
Pajak Tangguhan Jumlah Penerimaan (Beban) Pajak Tangguhan	6.823.268 6.823.268	127.130 127.130	Deferred Tax Total Deferred Tax Income (Expense)

b. Rekonsiliasi

PPh Badan Lebih (Kurang) Bayar

Rekonsiliasi antara surplus (defisit) sebelum pajak penghasilan yang ditunjukkan dalam Laporan Keuangan dan penerimaan (beban) pajak penghasilan:

b. Reconciliation

The reconciliation between the surplus (deficit) before income tax shown in the financial statements and the income tax revenues (expense) is as follows:

Income Tax Payable

	Jan - Des 2010 Jan - Dec 2010	Jan - Des 2009 Jan - Dec 2009	
	Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions	
Surplus (defisit) sebelum pajak penghasilan Koreksi Fiskal Positif Beda Tetap:	(27.982.456)	(1.137.034)	Surplus (deficit) before income tax Positive Fiscal Correction Permanent Differences:
1) Natura dan Kenikmatan	535.574	563.575	1) Benefits
2) Bantuan atau Sumbangan	26.952	15.197	2) Grants
3) Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris	28.536	13.153	3) Fixed Asset and Inventory Depreciation
4) Lainnya	100.485	36.589	4) Others
Jumlah	691.547	628.514	Total
Beda Waktu:			Temporary Differences:
1) Imbalan Pasca Kerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	738.509	944.661	Post Employment and Other Long-Term Employment Benefits
2) Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris	49.892	20.633	2) Fixed Asset and Inventory Depreciation
Jumlah	788.401	965.294	Total
Koreksi Fiskal Negatif			Negative Fiscal Correction
Beda Tetap:	(2.162)	0	Permanent Differences:
·	(2.162)	0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Beda Waktu:			Temporary Differences:
1) Imbalan Pasca Kerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	(420.971)	(628.487)	Post Employment and Other Long-Term Employment Benefits
2) Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris	(5.359)	0	2) Fixed Asset and Inventory Depreciation
	(426.330)	(628.487)	
Surplus (Defisit) Kena Pajak	(26.931.000)	(171.713)	Taxable Surplus (Deficit)
Perhitungan Pajak Terutang			Calculation of Current Tax
25% x Rp0	0	0	25% x Rp0
Jumlah Pajak Terutang	0	0	Current tax
Kredit Pajak:			Tax Credit:
Angsuran PPh pasal 22	19.431	0	Income Tax Article 22 Installment
Angsuran PPh pasal 25	0	0	Income Tax Article 25 Installment
BBI B 1 1 1 1 1 ///	40.404		

19.431

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010 Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

c. Aktiva (Kewajiban) Pajak Tangguhan

Posisi aktiva (kewajiban) pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 merupakan pengaruh beda pajak dengan rincian sebagai berikut:

c. Deferred Tax Assets (Liabilities)

The position of deferred tax assets (liabilities) as at December 31, 2010 and December 31, 2009 was the effect of tax differences as follows:

	31 Desember 2010 December 31, 2010	31 Desember 2009 December 31, 2009	
	Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions	
1) Imbalan Pasca Kerja	18,058	236,136	1) Post Employment Benefits
2) Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	121,882	(146,225)	2) Other Long Term Employment Benefits
3) Imbalan Pasca Kerja Manfaat Pensiun	(11,046)	39,053	3) Post Employment Benefits - Pension
4) Tunjangan Hari Tua	188,644	187,210	4) Retirement Benefits
5) Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris	44,533	20,633	5) Fixed Assets and Inventory Depreciation
Jumlah Koreksi Fiskal Beda Waktu	362,071	336,807	Total Temporary Differences Fiscal
			Correction
Rugi Fiskal	26,931,000	171,713	Fiscal Loss
Jumlah	27,293,071	508,520	Total
Aktiva Pajak Tangguhan	6,823,268	127,130	Deferred Tax Assets
(25% x Rp27.293.071 juta)			(25% x IDR27,293,071 million)
Aktiva (Kewajiban) Pajak Tangguhan	127,130	-	Deferred Tax Assets (Liabilities)
per 31/12/2009			as at Dec, 31, 2009
Aktiva (Kewajiban) Pajak Tangguhan	6,950,398	127,130	Deferred Tax Assets (Liabilities)
per 31/12/2010			as at Dec, 31, 2010

d. Utang Pajak

d. Tax Liabilities

	31 Desember 2010 December 31, 2010	31 Desember 2009 December 31, 2009		
	Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions		
PPh Pasal 25/29	0	0	Article 25/29	
Pasal 21	19,547	2,413	Article 21	
Pasal 22	958	0	Article 22	
Pasal 23	967	812	Article 23	
Pasal 26	93	21	Article 26	
Pasal 4 ayat 2	1,850	5,260	Article 4 ayat 2	
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	33	2,485	Value Added Tax	
Jumlah	23,448	10,991	Total	

Bank Indonesia telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.PEM-00167/WJP.07/KP.103/2006 tanggal 1 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Bank Indonesia has been affirmed as a Taxable Entrepreneur based on the Affirmation Letter of Taxable Entrepreneur Number PEM-00167/WJP.07/ KP.103/2006 dated December 1, 2006 issued by the Tax Office of State-Owned Enterprises (KPP

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010

> Pajak Badan Usaha Milik Negara (KPP BUMN). Melalui Surat No.9/8/DKI/PGKI tanggal 5 Januari 2007 tentang Penolakan Pengukuhan Bank Indonesia sebagai PKP, Bank Indonesia keberatan dikukuhkan sebagai PKP dengan pertimbangan bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 D yang kemudian diatur lebih lanjut dengan UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004, Bank

Indonesia adalah bank sentral yang merupakan

lembaga negara dan badan hukum publik.

31. Modal

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah). Modal ini harus ditambah sehingga menjadi 10% (sepuluh persen) dari seluruh kewajiban moneter, yang dananya berasal dari cadangan umum atau hasil revaluasi aset. Jumlah modal pada tanggal 31 Desember 2010 sama dengan jumlah modal pada tanggal 31 Desember 2009, yaitu sebesar Rp7.610.885 juta.

32. Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan

Dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Bank Indonesia) diatur bahwa surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut:

- a. 30% untuk Cadangan Tujuan; dan
- 5. Sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum menjadi 10% dari seluruh kewajiban moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

BUMN). Through Letter Number 9/8/DKI/PGKI dated January 5, 2007 concerning Bank Indonesia Refusal of Affirmation as Taxable Entrepreneur, Bank Indonesia objected to this affirmation considering that based on the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 Section 23 D which is then further regulated by Law Number 23 of 1999 as amended by Act Number 3 of 2004 concerning Bank Indonesia, Bank Indonesia is the central bank which is a state institution and public legal entities.

31. Capital

Based on Act of the Republic of Indonesia Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia as amended by Act of the Republic of Indonesia Number 6 of 2009 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Act Number 2 of 2008 concerning Second Amendment of Act Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia as an Act, the capital of Bank Indonesia shall be at least IDR2,000,000,000,000 (two trillion Rupiah). The capital shall be increased up to 10% (ten percent) of the total monetary liabilities, with funds to be derived from general reserves or asset revaluation reserves. The capital of Bank Indonesia as at December 31, 2010 is the same as at December 31, 2009 amounted to IDR7,610,885 million.

32. General and Statutory Reserves

According to Article 62 of Act of the Republic of Indonesia Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia as amended by Act of the Republic of Indonesia Number 6 of 2009 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Act Number 2 of 2008 concerning Second Amendment of Act Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia as an Act, the surplus of Bank Indonesia shall be distributed as follows:

- a. 30% for the Statutory Reserves;
- b. The remainder to be reinvested as General Reserves so that the sum of capital and General Reserves becomes 10% of the monetary liabilities as referred to in Article 6 paragraph (2).

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010

Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

Selanjutnya dalam Pasal II angka 3 diatur bahwa selama penyelesaian BLBI belum berakhir, Cadangan Tujuan ditetapkan sebesar 10%.

Pada penjelasan Pasal 62 Undang-Undang Bank Indonesia tersebut di atas disebutkan pula bahwa Cadangan Tujuan dipergunakan antara lain untuk biaya penggantian dan atau pembaruan harta tetap, pengadaan perlengkapan yang diperlukan, dan pengembangan organisasi dan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia serta penyertaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Penggunaan Cadangan Tujuan periode Januari sampai dengan Desember 2010 adalah sebesar Rp401.657 juta dengan rincian sebagai berikut:

- Pembaruan/penggantian harta tetap sebesar Rp321.717 juta.
- Pengembangan Organisasi & Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar Rp79.940 juta.

Posisi Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan pada tanggal 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp62.250.542 juta dan Rp14.370.568 juta.

33. Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi

Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi per tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp5.725.994 juta dan Rp9.275.348 juta yang terdiri atas:

Furthermore, as stated in Article II Number 3, as long as the settlement of BLBI has not been completed, Statutory Reserves shall be set at 10%.

According to the explanation of Article 62 as mentioned above, Statutory Reserves is used, among other things, to finance the replacement and or renewal of fixed assets, the procurement of required equipment, and the development of organization and human resources in implementing the tasks and authority of Bank Indonesia, as well as the investment needed in implementing the tasks of Bank Indonesia. The Statutory Reserves utilized in the period of January up to December 2010 amounted to IDR401,657 million with details as follows:

- Replacement/renewal of fixed assets amounted to IDR321.717 million.
- Development of organization and human resources amounted to IDR79,940 million.

The balances of General Reserves and Statutory Reserves as at December 31, 2010 amounted to IDR62,250,542 million and IDR14,370,568 million.

33. Unrealized Gains/Losses

The balances of Unrealized Gains/Losses as at December 31, 2010 and December 31, 2009 amounted to IDR5,725,994 million and IDR9,275,348 million respectively, with details as follows:

	Jan - Des 2010 Jan - Dec 2010	Jan - Des 2009 Jan - Dec 2009	
	Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions	
- Revaluasi harga emas	28.917.019	23.514.218	- Revaluation of gold price
- Revaluasi SSB dalam valas	5.014.268	9.053.950	 Revaluation of marketable securities in foreign currency
- Revaluasi SSB dalam rupiah	2.749.708	1.255.538	 Revaluation of marketable securities in Rupiah
- Selisih kurs valuta asing	(30.955.001) 5.725.994	(24.548.358) 9.275.348	- Differences in foreign exchange rate

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010

Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

34. Penerimaan dari Pengelolaan Devisa

Penerimaan dari Pengelolaan Devisa pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 terdiri atas:

Jan - Des 2010 Jan - Dec 2010	Jan - Des 2009 Jan - Dec 2009
Rp juta	Rp juta
IDR millions	IDR millions

- Bunga sektor valas 13.512.496 - Provisi sektor valas 1.762 - Penerimaan valas lainnya 4.455.695 17.969.953

Penerimaan valas lainnya tahun 2010 terutama berasal dari penerimaan SSB sebesar Rp4.337.567 juta.

35. Penerimaan dari Kegiatan Pasar Uang

Penerimaan dari kegiatan pasar uang pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 masingmasing sebesar Rp2.726.592 juta dan Rp2.055.188 juta. Penerimaan tahun 2010 terutama berasal dari penerimaan bunga Obligasi Negara sebesar Rp2.001.748 juta.

36. Penerimaan dari Pemberian Kredit dan Pembiayaan

Penerimaan dari Pemberian Kredit dan Pembiayaan pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp283.870 juta dan Rp551.633 juta, diantaranya termasuk bunga Surat Utang Pemerintah yang dihitung secara akrual sebesar Rp123.478 juta.

37. Selisih Kurs karena Transaksi Valuta Asing

Selisih kurs karena transaksi valuta asing pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 masingmasing sebesar negatif Rp16.435.753 juta dan positif Rp6.543.487 juta.

Selisih kurs negatif atas transaksi valuta asing tersebut terkait dengan adanya penguatan nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing pada tahun 2010.

33. Unrealized Gains/Losses

The balances of Unrealized Gains/Losses as at December 31, 2010 and December 31, 2009 amounted to IDR5,725,994 million and IDR9,275,348 million respectively, with details as follows:

າ9

14 967 208 1.208 4.059.141 - Interest in foreign exchange sector - Provision in foreign exchange sector

19.027.557

- Other foreign exchange revenues

Other foreign exchange revenues of 2010 primarily consisted of securities capital gain amounted IDR4,337,567 million.

35. Revenues from Money Market

Revenues from Money Market for the period of January 1 up to December 31, 2010 and January 1 up to December 31, 2009 amounted to IDR2,726,592 million and IDR2,055,188 million respectively. Included in these revenues was Government Bonds accrued interests of IDR2,001,748 million.

36. Revenues from Credit and Financing

Revenues from credit and financing for the period of January 1 up to December 31, 2010 and 2009 amounted to IDR283,870 million and IDR551,633 million respectively. Included in that amount were accrual revenues from Government Bonds' interest, amounted to IDR123.478 million.

37. Exchange Differences

The value of Exchange Differences for the period of January 1 up to December 31, 2010 and January 1 up to December 31, 2009 amounted to negative IDR16,435,753 million and positive IDR6,543,487 million respectively.

This difference resulted from the appreciation of Rupiah against world major currencies in 2010.

Bank Indonesia 2010 Annual Report 189 188 Bank Indonesia Laporan Tahunan 2010

Maintaining Credibility, Strengthening the National Economic Recovery

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010

Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

38. Penerimaan dari Pengelolaan Sistem Pembayaran

Penerimaan dari Pengelolaan Sistem Pembayaran pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp201.130 juta dan Rp185.016 juta. Penerimaan dari Pengelolaan Sistem Pembayaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 berasal dari Jasa Penyelenggaraan Kliring sebesar Rp201.118 juta dan Jasa Pengelolaan Rekening sebesar Rp12 juta.

39. Penerimaan Lainnya

Penerimaan Lainnya terdiri atas:

		Jan - Des 2010 Jan - Dec 2010	Jan - Des 2009 Jan - Dec 2009	
		Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions	
_	Pemulihan Penyisihan Aktiva	-	1,021,995	- Recovery of Allowance for Bad Debts
-	Penerimaan Sanksi Administratif	114,888	203,745	- Penalty and Administrative fees
-	Penerimaan Lainnya	1,191,230	67,895	- Other Revenues

1,306,118

40. Beban Operasi Pasar Terbuka

Beban Operasi Pasar Terbuka terdiri atas:

	Jan - Des 2010 Jan - Dec 2010	Jan - Des 2009 Jan - Dec 2009	
	Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions	
- Penelitian Uang Beredar	13,075	3,571	- Research for Base Money
 Pengembangan Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Operas Uang Beredar 	24,163,726 sional	22,219,896	 Policy Development, Endorsement an Execution for Base Money
	24,176,801	22,223,467	

Beban operasi pasar terbuka merupakan bagian pengeluaran terbesar Bank Indonesia periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp24.176.801 juta (71,04%) dari total beban dan Rp22.223.467 juta (72,17%) dari total beban.

38. Revenues from Payment System Services

Revenues from payment system services for the period of January 1 up to December 31, 2010 and 2009 amounted to IDR201,130 million and IDR185,016 million respectively. Revenues from payment system services for the period of January 1 up to December 31, 2010 were derived from clearing service fee amounted to IDR201,118 million and account administration fee amounted to IDR12 million.

39. Other Revenues

1,293,635

Other revenues consisted of:

Jan - Des 2009 Jan - Dec 2009	
Rp juta IDR millions	
1,021,995 203,745 67,895	Recovery of Allowance for Bad DebtsPenalty and Administrative feesOther Revenues

40. Open Market Operations Expenses

Open Market Operations Expenses consisted of:

22,223,467
Open market operations expenses was Bank Indonesia's largest expense, for the period of January
1 up to December 31, 2010 and 2009 amounted to
IDR24,176,801 million (71.04%) of total expenses and
amounted to IDR22,223,467 million (72.17%) of total
expenses respectively.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010

Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

Termasuk dalam Pelaksanaan Kebijakan Uang Beredar adalah Biaya Diskonto SBI, Penempatan Dana, Penempatan Berjangka dan Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali - SUN sebesar Rp23.438.334 juta, beban imbalan SBIS dan FASBIS pemenuhan GWM dalam rupiah sebesar Rp155.788 juta.

sebesar Rp337.160 juta, serta beban jasa giro atas

41. Beban Pengelolaan Devisa

Beban Pengelolaan Devisa pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 terdiri atas:

Included in Policy Execution Expenses were SBI discount, Term Deposit discount, Deposit Facilities discount, and Reverse Repo Transaction - SUN amounted to IDR23,438,334 million, SBIS and FASBIS Bonus expenses amounted to IDR337,160 million, and GWM interest expenses amounted to IDR155,788 million.

41. Foreign Reserves Management Expenses

Foreign reserves management expenses for the period of January 1 up to December 31, 2010 and 2009 consisted of:

	Jan - Dec 2010	Jan - Dec 2009	
	Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions	
- Penelitian Pengelolaan Cadangan Devisa	4,908	104	- Research for Foreign Reserves Management
- Pelaksanaan Pengelolaan Cadangan Devisa	33,879	33,444	- Execution for Foreign Reserves Management
	38,787	33,548	

Jan - Des 2009

Jan - Des 2010

42. Beban Pinjaman Luar Negeri

Beban Pinjaman Luar Negeri pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp158.643 juta dan Rp131.175 juta.

43. Beban Jasa Giro Pemerintah

Beban Jasa Giro Pemerintah pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp2.434.310 juta dan Rp1.849.015 juta. Jasa Giro diberikan atas Giro Pemerintah yang berupa Rekening Kas Umum Negara dan Rekening Penempatan.

44. Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp2.703.376 juta dan Rp2.173.722 juta. Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran tahun 2010 antara lain terdiri dari Pelaksanaan Pengadaan Bahan Uang sebesar Rp1.067.966 juta, dan Pelaksanaan Pencetakan Uang sebesar Rp1.521.218 juta.

42. Foreign Loan Management Expenses

Foreign loan management expenses for the period of January 1 up to December 31, 2010 and 2009 were IDR158,643 million and IDR131,175 million respectively.

43. Interests of Government Account Expenses

Interests of Government Account Expenses for the period of January 1 up to December 31, 2010 and 2009 amounted to IDR2,434,310 million and IDR1,849,015 million respectively. Interests were attributed to General State Cash Account and Placement Accounts.

44. Payment System Operations Expenses

Payment system services expenses for the period of January 1 up to December 31, 2010 and 2009 amounted to IDR2,703,376 million and IDR2,173,722 million respectively. Payment system services expenses for the year 2010 among others consisted of currency procurement expenses amounted to IDR1,067,966 million, and currency printing expenses amounted to IDR1,521,218 million.

Bank Indonesia 2010 Annual Report 191 190 Bank Indonesia Laporan Tahunan 2010

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010 Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

Beban pelaksanaan pencetakan uang sebesar Rp1.521.218 juta diantaranya biaya pencetakan uang sebesar Rp1.301.664 juta masih bersifat sementara dan belum dituangkan dalam suatu kontrak antara BI dan Perum Peruri.

45. Beban Umum dan Lainnya

Pos Beban Umum dan Lainnya pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 terdiri atas: Included in currency procurement expenses of IDR1,521,218 million was note printing expense amounting IDR1,301,664 million that still tentative and has not been set forth in a contract between Bank Indonesia and Perum Peruri.

45. General and Other Expenses

General and Other Expenses for the period of January 1 up to December 31, 2010 and 2009 consisted of:

	Jan - Des 2010 Jan - Dec 2010	Jan - Des 2009 Jan - Dec 2009	
	Rp juta IDR millions	Rp juta IDR millions	
Sumber Daya Manusia	3,245,503	3,268,242	Human Resources
Logistik dan Pengamanan	783,025	713,053	Logistics and Security Management
Sistem Teknologi Informasi	37,819	113,923	Information Technology System
Lainnya:			Others:
- Keuangan Intern	7,126	4,038	- Internal Finance
- Pengawasan Intern	4,833	4,709	- Internal Control
- Legislasi dan Hukum	17,554	48,554	- Legislature and Law
- Administrasi, Arsip, dan Ekspedisi	7,636	19,406	- Administration, Archive and Expedition
- Penambahan Penyisihan Aktiva	240,936	0	Addition of Allowance for Bad Debts
- Pengeluaran yang Akan Direklasifikasi	3	40	Expenses To Be Reclassified
	4,344,435	4,171,965	

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, gaji, penghasilan lainnya dan fasilitas bagi Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Besarnya gaji dan penghasilan lainnya bagi Dewan Gubernur ditetapkan paling banyak dua kali gaji dan penghasilan lainnya bagi pegawai dengan jabatan tertinggi di Bank Indonesia.

Dalam beban SDM, termasuk juga imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya periode tahun 2010 sebesar Rp789.250 juta sebagaimana dijelaskan dalam pos Kewajiban Lain-lain serta gaji, insentif, tunjangan hari raya keagamaan, dan uang cuti tahunan bagi Dewan Gubernur Bank Indonesia

According to Act of the Republic of Indonesia Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia as amended by Act of the Republic of Indonesia Number 6 of 2009 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Act Number 2 of 2008 concerning Second Amendment of Act Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia as an Act, the salary, other income and facilities of the Governor, Senior Deputy Governor and Deputy Governor shall be prescribed by the Board of Governors. The amount of such salary and other income of the Governor shall be determined at the maximum of two times the salary and other income of an employee of the highest rank in Bank Indonesia.

Included in Human Resources expense was post employment and other long-term employment expenses for the year 2010 amounted to IDR789,250 million as explained in the Other Liabilities item as well as salaries, incentives, holiday bonus (tunjangan hari raya), and compensation on annual leaves

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010 Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp16.862 juta dan Rp15.991 juta. Dalam beban SDM tersebut termasuk biaya untuk keikutsertaan Bank Indonesia pada program Jamsostek, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992.

46. Rasio Modal

Rasio Modal (Modal, Cadangan Umum dan Defisit tahun berjalan) terhadap Kewajiban Moneter per tanggal 31 Desember 2010 adalah 4,62%. Jumlah Modal dan Kewajiban Moneter yang diperhitungkan dalam perhitungan Rasio Modal per tanggal 31 Desember 2010 masing-masing adalah Rp48.702.239 juta dan Rp1.054.271.839 juta. Modal, Kewajiban Moneter, dan Rasio Modal per tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

(uang cuti tahunan) for the Board of Governors for the period of January 1 up December 31, 2010 and 2009 amounted to IDR16,862 million and IDR15,991 million, respectively. Included in the Human Resources expense was Bank Indonesia's membership expenses for the Jamsostek program, in accordance with Act of The Republic of Indonesia Number 3 of 1992.

46. Capital Ratio

The ratio of Capital (Capital, General Reserves, and Current Year Deficit) to Monetary Liabilities as at December 31, 2010 was 4.62%. The Capital and Monetary Liabilities used in the Capital Ratio calculation at December 31, 2010 amounted to IDR48,702,239 million and IDR1,054,271,839 million, respectively. The Capital, Monetary Liabilities, and Capital Ratio as at December 31, 2010 were as follows:

31 Desember 2010 December 31, 2010

Rp juta

IDR millions

a. Modal		a. Capital
- Modal	7.610.885	- Capital
- Cadangan Umum	62.250.542	- General Reserves
- 100% Defisit Tahun Berjalan (setelah pajak)	(21.159.188)	- 100% of Current Year Deficit (after tax)
Jumlah	48.702.239	Total
b. Kewajiban Moneter		b. Monetary Liabilities
- Uang dalam Peredaran	318.585.280	- Currency in Circulation
- Giro Pemerintah	90.994.083	- Government Demand Deposits
- Giro Bank	166.163.309	- Bank Demand Deposits
- Giro Lainnya (kecuali Giro IMF, Bank Dunia,	484.315	- International Financial Institutions Demand
dan ADB)		Deposits
- Surat Berharga yang Diterbitkan (SBI, SBIS,	477.904.457	- Bank Indonesia Certificates
Penempatan Berjangka, Penempatan Dana,		
FASBIS, Surat Berharga yang Dijual dengan Janji		
Dibeli Kembali)		
- Pinjaman dari Pemerintah	140.395	- Loans from Government
Jumlah	1.054.271.839	Total
c. Rasio Modal		c. Capital Ratio
Modal + Cadangan Umum + 100% Defisit Tahun Berjalan	4,62%	Capital + General Reserves + 100% of Current Year Deficit
Kewajiban Moneter		Monetary Liabilities

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010

Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

D. PENJELASAN LAINNYA

1. Transaksi dengan Pihak yang Memiliki **Hubungan Istimewa**

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

> 31 Desember 2010 December 31, 2010

> > Rp juta IDR millions

Tagihan pada Indover Bank 498.368 Pinjaman karyawan

373.331

871.699

Disamping itu, terdapat Tanah/Bangunan yang digunakan oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI)/Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI)/Persatuan Pensiunan Bank Indonesia (PPBI)/Yayasan Perguruan KORPRI Unit Bank Indonesia (YASPORBI)/Persatuan Istri Pegawai Bank Indonesia (PIPEBI) dengan cara pinjam pakai/Sewa/Bangun Guna Serah.

2. Dana Kesejahteraan Pegawai

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968, pasal 47 ayat 6, Bank Indonesia diwajibkan mengalokasikan 7,5% dari laba bersih setelah pajak yang telah disahkan untuk Dana Kesejahteraan Pegawai (DKP). DKP digunakan sebagai sumber pinjaman pegawai dan selebihnya ditempatkan dalam bentuk deposito dan surat berharga Pemerintah. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 3/11/ KEP/GBI/INTERN/2001 tanggal 29 Juni 2001, pengelolaan DKP dilakukan oleh YKKBI.

Posisi DKP per 31 Desember 2010 adalah Rp875.773 juta terdiri dari pinjaman pegawai Bank Indonesia sebesar Rp373.331 juta, dana di Bank Indonesia namun belum disalurkan kepada pegawai sebesar Rp23.364 juta dan dana yang dikelola oleh YKKBI sebesar Rp479.077 juta.

D. OTHERS

Related Party Transactions

Related party transactions consisted of:

31 Desember 2009 December 31, 2009

> Rp juta IDR millions

1.113.576 386.069

1.499.645

Furthermore, there is Land/Building used by the Indonesia Banking Development Foundation (Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia - YPPI), Bank Indonesia's Employee Welfare Foundation (Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia - YKKBI), Bank Indonesia Retired Empoyees Association (Persatuan Pensiunan Bank Indonesia - PPBI), Bank Indonesia KORPRI Unit Foundation (Yayasan Perguruan KORPRI Unit Bank Indonesia - YASPORBI), Bank Indonesia Employee's Wives association (Persatuan Isteri Pegawai Bank Indonesia - PIPEBI) in the form of loan/rent/build, operate and transferred (BOT).

Claims on Indover Bank

Employee loans

2. Employee Welfare Funds

Based on Act of the Republic of Indonesia Number 13 of 1968, article 47 paragraph (6), Bank Indonesia is obliged to allocate 7.5% of its after-tax income that has been validated to employee welfare funds (Dana Kesejahteraan Pegawai - DKP). DKP is a source of employee loans. Meanwhile, the remainders of the idle funds are placed in time deposits and government bonds. Based on the Governor of Bank Indonesia Decree Number 3/11/KEP/GBI/INTERN/2001 dated June 29, 2001, YKK-BI was appointed as the fund manager of DKP.

As at December 31, 2010, the balance of DKP amounted to IDR875,773 million, which consisted of Bank Indonesia employee loans amounted to IDR373,331 million, undistributed funds for employees amounted to IDR23,364 million and funds managed by YKK-BI amounted to IDR479,077 million.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010

Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

3. Dana Tunjangan Hari Tua

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968, Pasal 43 ayat 1, Bank Indonesia mengadakan Tunjangan Hari Tua (THT) dengan maksud membantu peserta untuk memiliki rumah tempat tinggal. Program THT dikelola oleh YKKBI dan dikenal dengan program Bantuan Pemilikan Rumah (Baperum). Dalam rapat Pembina YKKBI tanggal 25 April 2011, telah ditetapkan pemisahan kekayaan pendanaan YKKBI untuk program THT (Baperum) dan program YKKBI lainnya (non Baperum) terhitung sejak 1 Januari 2011 dengan komposisi untuk Baperum sebesar 32,5% dan untuk non Baperum sebesar 67,5%. Pemisahan kekayaan ini untuk sementara waktu masih secara administratif yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pemisahan kekayaan secara fisik.

E. KOMITMEN DAN KONTIJENSI

1. Pinjaman Dua Tahap (Two Step Loans)

Merupakan pinjaman dari lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, Japan Bank for International Cooperation dan ADB kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk diteruspinjamkan kepada bank melalui Bank Indonesia. Peran Bank Indonesia dalam skim kredit ini adalah sebagai pemegang kas Pemerintah, untuk memberikan dan menagih kembali pinjaman yang diteruskan kepada bank-bank nasional. Bank-bank nasional ini seterusnya akan mengambil alih risiko kredit dan menyalurkan kredit tersebut kepada pemakai akhir yang memenuhi syarat.

Surat Menteri Keuangan Nomor S-2147/LK/2000 tanggal 16 Mei 2000 menyatakan bahwa Bank Indonesia hanya bertindak sebagai agen pelaksana dari skim-skim ini dan oleh karena itu tidak akan menanggung risiko kredit.

Peminjam (borrower) dalam penerusan TSL adalah Pemerintah Republik Indonesia, kecuali untuk fasilitas dari EXIM Taiwan, yang bertindak sebagai peminjam adalah Bank Indonesia dan diteruspinjamkan kepada Bank Bukopin.

Pinjaman TSL diteruskan kepada bank dalam valuta Rupiah, USD, dan EUR dengan posisi saldo pinjaman per 31 Desember 2010 setara dengan Rp687.948 juta.

3. Retirement Benefit Fund

Based on Act of the Republic of Indonesia Number 13 of 1968, article 43 paragraph (1), Bank Indonesia provides Retirement Benefit (Tunjangan Hari Tua – THT) program to support employees to acquire house. THT program is managed by YKKBI and known as House Ownership Fund (Bantuan Pemilikan Rumah – Baperum) program. YKKBI board of advisor meeting dated April 25, 2011 has decided to separate the YKKBI fund composition for THT program of 32.5% and other YKKBI program (non Baperum) of 67.5% starting from January 1, 2011. This separation temporarily administered, thus will be followed by physical separation.

E. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

1. Two Step Loans

Two Step Loans (TSL) are loans from financial foreign institutions, such as World Bank, Japan Bank for International Cooperation and Asian Development Bank, for the Government of the Republic of Indonesia to be channeled to banks through Bank Indonesia. The role of Bank Indonesia in these credit schemes is as the account holder of the Government, to distribute the loans and to collect payments from the national banks. Thus, these national banks bear the credit risk and distribute the loans to qualified debtors.

The letter of the Minister of Finance Number S-2147/LK/2000 dated May 16, 2000 stated that Bank Indonesia only acts as the executing agent of these schemes and therefore bear no credit risk.

The borrower of TSL is the Government of Republic of Indonesia, except for the borrower of loans from EXIM Taiwan, which is Bank Indonesia and in turn channeled to Bank Bukopin.

TSL is distributed to recipient banks in IDR, USD and EUR with balance as at December 31, 2010 equaled to IDR687,948 million.

Bank Indonesia 2010 Annual Report 195 194 Bank Indonesia Laporan Tahunan 2010

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010 Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

Disamping itu terdapat tagihan Pemerintah kepada BUMN/BUMD/Pemda dengan *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) yang ditandatangani oleh Bank Indonesia atas dasar Surat Kuasa dari Menteri Keuangan dalam rangka *Project Aid* yang sumber dananya berasal dari *Foreign Exchange Loan* dan Rekening Dana Investasi dengan nilai *outstanding* per 31 Desember 2010 setara dengan Rp334.014 juta.

2. Transaksi Valuta Asing

Pada tanggal 31 Desember 2010, jumlah komitmen tagihan dan komitmen kewajiban surat-surat berharga, deposito, dan *swap* Bank Indonesia setara dengan Rp12.600.905 juta dan Rp11.402.639 juta.

3. Perlindungan Hukum bagi Pelaksana Tugas Kedinasan (PTK)

Bank Indonesia atas dasar Peraturan Dewan Gubernur (PDG) Nomor 4/13/PDG/2002 tanggal 22 Oktober 2002 tentang "Perlindungan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bank Indonesia" telah memberikan perlindungan hukum kepada tiga mantan anggota Direksi Bank Indonesia terkait dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Selanjutnya, berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juni 2005, tiga mantan anggota direksi Bank Indonesia tersebut telah dinyatakan terbukti bersalah.

Sejalan dengan PDG Nomor 4/13/PDG/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Dewan Gubernur (DG) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) tanggal 20 Juni 2005 telah menyetujui agar seluruh biaya penanganan perkara yang telah diterima oleh tiga mantan anggota Direksi Bank Indonesia untuk dikembalikan kepada Bank Indonesia. Selanjutnya dalam RDG tanggal 11 April 2006 telah disetujui secara prinsip bagi tiga mantan anggota Direksi Bank Indonesia untuk melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) dan penundaan kewajiban mengembalikan seluruh biaya penanganan perkara sampai adanya putusan PK.

There were also Government claims to State-owned Enterprises (Badan Usaha Milik Negara - BUMN)/Region-owned Enterprises (Badan Usaha Milik Daerah - BUMD)/Regional Government (Pemerintah Daerah – Pemda), where the Subsidiary Loan Agreements (SLA) were signed by Bank Indonesia based on authorization from Minister of Finance for the purpose of Project Aid. The fund was originated from Foreign Exchange Loan (FEL) and Investment Fund Account (Rekening Dana Investasi - RDI) with outstanding value as at December 31, 2010 equal to IDR334,014 million.

2. Foreign Currency Transactions

As at December 31, 2010, commitment receivables and commitment payables of marketable securities, time deposits, and swaps were equal to IDR12,600,905 million and IDR11,402,639 million, respectively.

3. Legal Protection for Persons Performing Official Duties

In accordance with the Board of Governors
Regulation (PDG) Number 4/13/PDG/2002 dated
October 22, 2002 concerning "Bank Indonesia
Legal Protection for Persons Performing Legal
Duties" Bank Indonesia provides legal protection
for three ex-members of Bank Indonesia's Board
Directors concerning the BLBI case. Therefore,
with the cassation decision in The Republic of
Indonesia's Supreme Court (Mahkamah Agung
Republik Indonesia – MA RI) dated June 10, 2005
they was stated guilty.

Based on PDG Number 4/13/PDG/2002 dated October 22, 2002 Bank Indonesia's Board of Governors in the Board of Governors Meeting dated June 20, 2005 has approved that the court expenses received by the three persons performing official duties must be returned. Furthermore, the Board of Governors in Meeting dated April 11, 2006 principally has approved for the three ex members to perform extraordinary legal efforts in the form of Judicial Review (Peninjauan Kembali - PK) and suspending the obligation to return all court expenses until the process of Judicial Review is due.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010

Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

Upaya hukum PK dimaksud hingga saat ini belum dapat dilaksanakan mengingat tiga mantan anggota Direksi Bank Indonesia tersebut mengajukan permohonan penundaan pengajuan upaya hukum PK, yang terakhir sampai dengan akhir bulan Desember 2011. Permohonan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa situasi dan kondisi Bank Indonesia saat ini dirasakan belum mendukung upaya hukum PK dimaksud. Dalam rangka menyelesaikan masalah ini, Bank Indonesia telah meminta opini hukum kepada beberapa pakar Hukum Tata Usaha Negara.

N.V. De Indonesische Overseeze Bank (Indover Bank)

Sejak tanggal 6 Oktober 2008, Indover Bank dikenakan tindakan darurat (emergency measures) karena adanya kesulitan likuiditas yang dialaminya. Pada tanggal 1 Desember 2008, Indover Bank telah dinyatakan pailit/bangkrut oleh pengadilan Amsterdam dan berstatus dilikuidasi dalam wilayah kedaulatan Belanda. Alasan dilikuidasinya Indover Bank adalah ekuitas yang telah negatif, dan tidak ada tambahan modal yang dapat diharapkan untuk menutup ekuitas negatif tersebut, baik melalui tambahan modal dari Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal Indover Bank maupun dari investor lainnya.

Dengan telah dipailitkannya Indover Bank oleh Pengadilan Belanda, maka Indover Bank berada di bawah pengelolaan dan pengawasan kurator yang ditunjuk oleh pengadilan Amsterdam Belanda.

Sampai dengan saat ini masih terdapat dispute antara Bank Indonesia dan kurator mengenai hak dan kewajiban Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal dan kreditur terkait dengan pelaksanaan likuidasi Indover Bank. Pada bulan Maret 2010, Bank Indonesia sebagai kreditur telah mengajukan statement of claim atas deposito dan giro Bank Indonesia di Indover Bank ke Pengadilan Amsterdam. Atas klaim Bank Indonesia tersebut di atas, pada bulan April 2010 Kurator menyampaikan statement of counterclaim di Pengadilan Belanda mendalilkan bahwa Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal Indover Bank berkewajiban untuk menanggung defisit Indover Bank dan men-set off tagihan Bank Indonesia yang ada di Indover Bank. Dalam hal ini, Bank Indonesia tetap berpendirian bahwa sesuai hukum perusahaan, tanggung jawab Bank

Until now the process of Judicial Review has not been performed considering the three ex members of Bank Indonesia's Directors pleaded for Judicial Review suspension, at the latest by the end of December 2011. Pleading was based on consideration of Bank Indonesia's circumstances that could not support the Judicial Review. In order to settle the case, Bank Indonesia has asked opinion to several expertise of State Administrative Law.

4. N.V. De Indonesische Overseeze Bank (Indover Bank)

Since October 6, 2008, emergency measures have been applied to Indover Bank due to the shortage of liquidity. On December 1, 2008, Indover Bank was declared bankrupt by the Amsterdam District Courts and its status was being liquidated in the Netherlands. The reason for Indover Bank's liquidation was its negative equity and the lack of additional capital that could be expected to cover that negative equity, by way of additional capital from Bank Indonesia as the sole shareholder of Indover Bank or from other investors.

With the declaration of bankruptcy of Indover Bank by the Amsterdam District Courts, Indover bank is under the control and monitoring of the Trustees appointed by the Amsterdam District Courts.

Currently, there is still a dispute between Bank *Indonesia and the Trustees concerning the rights* and liabilities of Bank Indonesia as the sole shareholder and the creditors in the liquidation of Indover Bank. On March 2010, Bank Indonesia as a creditor has filed a statement of claim of its time and demand deposits with Indover Bank to the Amsterdam District Courts. Related to that claim, on April 2010 the Trustees filed statement of counterclaim to the Amsterdam District Court claiming that Bank Indonesia as the sole shareholder is responsible to the deficit of Indover Bank and setting off Bank Indonesia's claims in Indover Bank. Upon this regards, Bank Indonesia is of the opinion that based on the the company law, Bank Indonesia's responsibility as the sole shareholder of Indover Bank is limited to Bank Indonesia's equity participation in Indover Bank.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010 Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

Indonesia sebagai pemegang saham tunggal pada Indover Bank hanya sebatas penyertaan Bank Indonesia pada Indover Bank.

5. Bantuan Tambahan Modal Kepada YPPI

Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) tanggal 3 Juni 2003 memutuskan dan memberikan persetujuan kepada Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI-sekarang bernama Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia/ YPPI) guna menyediakan sejumlah dana sesuai dengan yang diperlukan Bank Indonesia. Untuk tahap pertama, LPPI diminta untuk menyisihkan dana sebesar Rp100.000 juta. Selanjutnya dalam RDG tanggal 22 Juli 2003, Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan dan memberikan persetujuan bahwa apabila diperlukan Bank Indonesia akan memberikan bantuan peningkatan modal kepada LPPI sebesar Rp100.000 juta yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap untuk menggantikan penyisihan dana LPPI.

Keputusan RDG tanggal 3 Juni 2003 kemudian dipermasalahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena dianggap telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Saat ini perkara YPPI telah mendapat putusan yang bersifat tetap dari Mahkamah Agung RI dengan putusan No. 897 K/Pid.Sus/2009 tanggal 18 Agustus 2009 dan No.1047 K/Pid.Sus/2009 tanggal 18 Agustus 2009 dan No.2582 K/PID.SUS/2009 tanggal 15 Maret 2010 yang menyatakan bahwa RDG tanggal 3 Juni 2003 dianggap telah menimbulkan kerugian negara.

Dalam RDG tanggal 22 Maret 2011, Dewan Gubernur memutuskan untuk tidak lagi meminta penyisihan kepada Dewan Pengawas LPPI (sekarang YPPI) dan tidak akan memberikan bantuan peningkatan modal kepada YPPI sebesar Rp100 miliar untuk menggantikan penyisihan dana YPPI.

6. Perkara Hukum yang Ditangani Bank Indonesia

Bank Indonesia menangani empat perkara (namun dalam dua nomor perkara hukum) yang berada di luar negeri terkait penyelesaian Indover Bank di Belanda dan 50 (lima puluh) perkara perdata dan tata usaha Negara. Saat ini terdapat 1 (satu)

5. Payment of Additional Capital to YPPI

The Board of Governors of Bank Indonesia in the Board of Governors Meeting dated June 3, 2003 has come to a decision to ask LPPI (currently named YPPI) to provide a certain amount of funds needed by Bank Indonesia. For the first phase, LPPI was asked to provide funds amounting to IDR100,000 million. In the Board of Governors Meeting (RDG) dated July 22, 2003, The Board of Governors of Bank Indonesia has decided that, if necessary, Bank Indonesia will provide additional capital for LPPI amounting to IDR100,000 million. The execution of this will be done in several phases to return LPPI's funds.

RDG decision dated June 3, 2003 then questioned by the Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi – KPK) through Corruption Court because it had caused financial loss to the State. Currently, the YPPI case has received fixed decision of the Supreme Court by decision Number 897K/Pid.Sus/2009 dated August 18, 2009, Number 1047K/Pid.Sus/2009 dated August 18, 2009 and Number 2582K/Pid.Sus/2009 dated March 15, 2010 which states that the RDG on June 3, 2003 deemed to have caused losses to the State.

In the RDG dated March 22, 2011, the Board of Governors decided to no longer ask for the allowance to the LPPI (now YPPI) Board of Trustees and will not provide assistance to YPPI capital increase amounting to IDR100 billion to replace the YPPI fund.

6. Legal Matters

Bank Indonesia was dealing with four overseas legal cases (in two numbers of lawsuits) regarding Indover Bank bankrupcy settlement in the Netherland and 50 civil and state administration cases. At the moment, there

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010

Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

perkara perdata yang sedang dalam proses Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung.

7. Aset Bank Indonesia yang Diperoleh Dari Putusan Pengadilan

Terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi terpidana Lee Darmawan alias Lee Chin Kiat, telah ada Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor 1662K/Pid/1991 tanggal 21 Maret 1992 yang menetapkan sebagai berikut:

a. Eksekusi pembayaran uang pengganti sebesar Rp85.000 juta

Sesuai keputusan MA tersebut ditetapkan bahwa terdakwa Lee Dharmawan Kertaraharja Haryanto alias Lee Chin Kiat harus membayar uang pengganti kepada negara c/q Bank Indonesia Rp85.000 juta.

Sejak putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Maret 1992 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap hingga April 2011, Bank Indonesia belum menerima hasil eksekusi uang pengganti. Bank Indonesia telah mengajukan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan No.12/193/ DHk tanggal 24 Mei 2010 dan No.12/400/ DHk tanggal 6 Oktober 2010 yang isinya menanyakan pelaksanaan eksekusi uang pengganti tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan surat No.B-4383/O.1.12/Fu.1/10/2010 tanggal 20 Oktober 2010 menyatakan bahwa terkait eksekusi pembayaran uang pengganti sebesar Rp85.000 juta dalam perkara Tindak Pidana Korupsi terpidana Lee Darmawan alias Lee Chin Kiat telah dilakukan pembayaran kepada kas negara sejumlah Rp1.384 juta. Pembayaran tersebut masih kurang sebesar Rp83.616 juta dari putusan uang pengganti yang ditetapkan Mahkamah Agung.

Dengan adanya penyetoran uang pengganti oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ke Kas Negara, Bank Indonesia mengirimkan surat No.13/95/DHk tanggal 4 Maret 2011 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk menegaskan kembali bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI seharusnya dibayarkan kepada Bank Indonesia. was one civil case still in Judicial Review by the Supreme Court.

7. Bank Indonesia Assets Acquired Through Court Decisions

On the corruption case of convicted Lee Darmawan alias Lee Chin Kiat, there have been Supreme Court (MA) of the Republic of Indonesia Number 1662K/Pid/1991 dated March 21, 1992 were set as follows:

a. Execution of Payment of Compensation amounted IDR85,000 million

Accordance with the decision, the Supreme Court stated that defendant Lee Dharmawan Kertaraharja Haryanto aka Lee Chin Kiat should pay compensation to the state c/q Bank Indonesia IDR85,000 million.

Since the decision of the Supreme Court March 21, 1992 which has had permanent legal force until April 2011, Bank Indonesia has not received the results of execution of compensation. Therefore, Bank Indonesia has submitted a letter to the Head of the West Jakarta District Court Number 12/193/DHk dated May 24, 2010 and No.12/400/DHk October 6, 2010 that asked the execution of payment compensation.

Head of the West Jakarta District Court with letter Number B-4383/O.1.12/Fu.1/10/2010 dated October 20, 2010 stated that payment of compensation related to the execution of IDR85,000 million in corruption case, convict Lee Darmawan alias Lee Chin Kiat has made cash payments to the State Cash Account amounted IDR1,384 million. Payment is still less IDR83,616 million of cash replacement as specified in the decision of the Supreme Court.

With the payment of compensation by the West Jakarta District Court to the State Cash Account, Bank Indonesia sent a letter Number 13/95/DHk dated March 4, 2011 to the Head of the West Jakarta District Court to reaffirm that on the basis of the Appeal Decision of the Supreme Court, the payment should be paid to Bank Indonesia.

b. Rampasan Barang Bukti Berupa Tanah

Sesuai keputusan MA tersebut di atas,

mencapai ±1.193 Ha. Selanjutnya pada

tanggal 30 Maret 1993, Kejaksaan Negeri

sebagian barang bukti rampasan kepada

Negara c.q. Bank Indonesia yang berupa

dokumen-dokumen untuk bidang tanah

bekerja sama dengan Yayasan Tridaya.

tersebut masih dalam proses penyelesaian,

Pada tanggal 22 November 2010, Kejari

F.1/11/2010 tanggal 22 November 2010

yang ditujukan kepada Bank Indonesia dan

ditembuskan antara lain kepada Kejaksaan

dan Eksaminasi (UHEKSI) pada Jaksa Agung

Perkara Lee Darmawan a.n Entong Nawawi

dan Anema Modile di Cengkareng bukan

termasuk sebagai barang rampasan untuk

Negara c.q. Bank Indonesia sebagaimana

Pid/1991 tanggal 21 Maret 1992 melainkan

sebagai obyek pasal 34 C Undang-Undang

yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh

Kejari Jakbar. Atas dasar surat tersebut, Bank

Indonesia akan menyerahkan aset dimaksud

Pada tanggal 26 Januari 2011, dengan Surat

No. 13/6/UKPA, Bank Indonesia menyerahkan

dokumen tanah-tanah perkara Lee Darmawan

a.n. Entong Nawawi dan Anema Modile

kepada Kejari Jakbar sebagaimana yang

pernah diserahkan kepada Bank Indonesia melalui Berita Acara Pelaksanaan Putusan

Pengadilan/Penyerahan Barang Bukti tanggal

Nomor 3 tahun 1971 (Uang pengganti)

dalam Putusan MA RI Nomor1622 K/

Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus)

Kejagung RI menegaskan bahwa tanah

Tinggi DKI Jakarta dan Upaya Hukum Eksekusi

Jakbar melalui surat Nomor B-4800/O.1.12/

ditetapkan bahwa barang bukti berupa tanah

dan/atau bangunan dirampas untuk Negara

c.q. Bank Indonesia yang apabila dijumlahkan

Jakarta Barat (Kejari Jakbar) telah menyerahkan

seluas ±1.001 Ha. Pada saat ini, aset rampasan

dan/atau Bangunan

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010

Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

b. Deprivation of Evidence in form of Land

According to the Supreme Court decision above, it was determined that the evidence in the form of land and/or buildings confiscated to the State c.g. Bank Indonesia which when added together reached ± 1193 hectares. Subsequently on March 30, 1993, the West Jakarta District Court had handed over some of the deprivated evidence to the State c.q. Bank Indonesia in the form of land documents of \pm 1001 hectares. At the time, those assets were still in settlement process

Through letter Number B-4800/O.1.12/ F.1/11/2010 dated November 22, 2010 addressed to Bank Indonesia and the copies include the Jakarta High Court and the Legal Efforts and Examination Execution (UHEKSI) to the Deputy Attorney General for Special Crimes (Jampidsus) of Attorney General, West Jakarta District Court asserted that the land status of Lee Darmawan in the name of Entong Nawawi and Anema Modile in Cenakarena was not included as confiscated land for the Government c.g. Bank Indonesia as in Decision of the Supreme Court Number 1622K/Pid/1991 dated March 21, 1992, but as the object of Article 34 C of Act Number 3 of 1971 (Compensation) which execution will be done by the West Jakarta District Court. On the basis of the letter, Bank Indonesia would hand over intended assets to the West

On January 26, 2011 by Letter Number 13/6/UKPA, Bank Indonesia presented land documents of Lee Darmawan in the name of Entong Nawawi and Anema Modile to Kejari Jakbar that has ever been submitted to Bank Indonesia through the Official Report of Court Decision Execution/Submission of Evidence dated March 30, 1993.

8. Tagihan Kepada PT Bank IFI

30 Maret 1993.

kepada Kejari Jakbar.

Melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/19/KEP.GBI/2009 tanggal 17 April

and/or Building

in cooperation with Yayasan Tridaya.

Jakarta District Court.

8. Claim on PT Bank IFI

Through the Governor of Bank Indonesia decision letter Number 11/19/KEP.GBI/2009 dated April 17,

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010

Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

2009, Bank Indonesia mencabut izin usaha PT Bank IFI terhitung sejak tanggal 17 April 2009. Berdasarkan keputusan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tagihan atas kewajiban PT Bank IFI berupa Subordinated Loan (SOL) sebesar Rp50.000 juta dan tagihan atas dana kelolaan PT Ustraindo yang ada di PT Bank IFI sebesar Rp50.817 juta yang terdiri dari pokok sebesar Rp38.850 juta dan bunga sebesar Rp11.967 juta.

9. Tagihan Restrukturisasi Utang Swasta kepada Pemerintah

Tagihan ini merupakan tagihan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang. Tagihan ini adalah tagihan kepada Pemerintah dalam rangka restrukturisasi utang swasta sebesar Rp9.582 juta dan sebesar USD2,917,495.37 atau setara dengan Rp31.947 juta pada tanggal 31 Desember 2008.

Menanggapi Surat Bank Indonesia Nomor 9/5/DGS/DInt tanggal 14 Desember 2007, Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Nomor S-47/MK.02/2008 tanggal 1 Februari 2008 menyatakan bahwa mengingat keputusan pembebanan dana talangan program Restrukturisasi Pinjaman Luar Negeri Swasta dibuat saat status Bank Indonesia masih dalam lingkup pemerintah dan memperhatikan rekomendasi hasil audit BPKP Nomor LAP-169/D1.01/2003 tanggal 5 Mei 2003 yang ditegaskan kembali dengan Surat Nomor S-291/D1/01/2005 tanggal 20 Juli 2005, dana talangan sebesar Rp39.691 juta tidak dibebankan pada APBN namun menjadi beban Bank Indonesia.

Bank Indonesia dengan Surat Nomor 13/GBI/ DInt tanggal 7 Januari 2011 perihal Penyelesaian Talangan Program Restrukturisasi Pinjaman Luar Negeri Swasta, meminta kembali penegasan dan tanggapan dari Kementerian Keuangan mengenai penyelesaian dana talangan dimaksud.

2009, Bank Indonesia has revoked the license of PT Bank IFI starting on April 17, 2009. Based on that decision, Bank Indonesia had a claim on PT Bank IFI's liabilities in the form of Subordinated Loan (SOL) amounted to IDR50,000 million and claim on managed funds by PT Ustraindo from PT Bank IFI amounted to IDR50,817 million that consists of the pricipal amount of IDR38,850 million and interest of IDR11,967 million.

9. Claim to the Government of Private Debt Restructuring

This claim occured before enactment of the Act of the Republic of Indonesia Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia as amended by Act of Republic of Indonesia Number 6 of 2009 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Act of the Republic of Indonesia Number 2 of 2008 regarding the Second Amendment to Act Number 23 of 1999 on Bank Indonesia as a Act. It is a claim to the government in restructuring of private debt amounted to IDR9,582 million and USD2,917,495.37 or equivalent to IDR31,947 million as at December 21, 2008.

Responding to the Letter of Bank Indonesia Number 9/5/DGS/Dint dated December 14, 2007, the Minister of Finance by letter Number S-47/ MK.02/2008 dated February 1, 2008 stated that the decision considering the imposition of the Private External Debt Restructuring bailout program was made while the status of Bank Indonesia was still within the scope of government and considered the recommendation from the Government Audit Agency (BPKP) audit results Number LAP-169/ D1.01/2003 dated May 5, 2003 which was reaffirmed by Letter Number S-291/D1/01/2005 dated July 20, 2005, bailout of IDR39,691 million was not charged to the government budget, but the burden of Bank Indonesia.

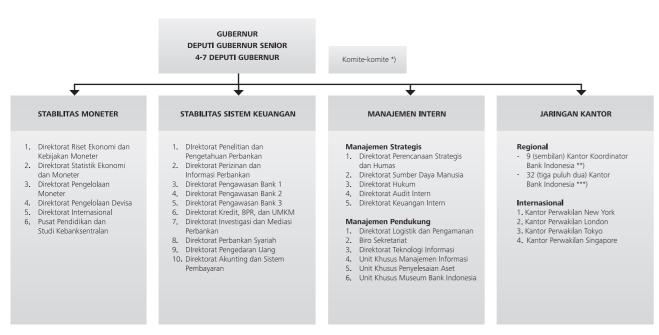
By Letter Number 13/GBI/DInt dated January 7, 2011 regarding the Completion of Private External Debt Restructuring Bailout Program, Bank Indonesia asked for re-confirmation and response from the Ministry of Finance regarding the settlement of the intended bailout.

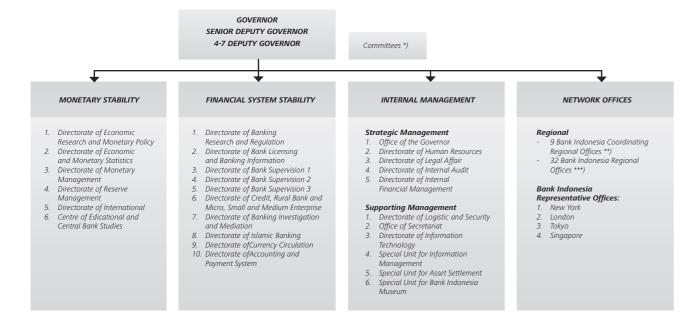
Bank Indonesia 2010 Annual Report 201 200 Bank Indonesia Laporan Tahunan 2010

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010 Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

STRUKTUR ORGANISASI BANK INDONESIA

ORGANIZATION STRUCTURE OF BANK INDONESIA





*) KOMITE DI BANK INDONESIA

1) Komite Stabilitas Moneter, 2) Komite Stabilitas Sistem Keuangan, 3) Komite Pengaturan dan Pengawasan Perbankan, 4) Komite Internasional, 5) Komite Perencanaan Anggaran dan Manajemen Kinerja (PAMK), 6) Komite Sumber Daya Manusia.

*) COMMITTEES OF BANK INDONESIA

1) Moneter Stability, 2) Financial System Stability, 3) Banking Managing and Controlling, 4) International, 5) Budget Planning and Performance Management (PAMK), 6) Human Resources.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2010 Notes to Financial Statements As at December 31, 2010

**) 9 KANTOR KOORDINATOR BANK INDONESIA

1) KKBI Surabaya; 2) KKBI Bandung, 3) KKBI Semarang, 4) KKBI Medan, 5) KKBI Denpasar, 6) KKBI Makassar, 7) KKBI Palembang, 8), KKBI Padang, 9) KKBI Banjarmasin.

***) 32 KANTOR BANK INDONESIA

1) KBI Solo, 2) KBI Pekanbaru, 3) KBI Yogyakarta, 4) KBI Cirebon, 5) KBI Malang, 6) KBI Manado, 7) KBI Bandar Lampung, 8) KBI Samarinda, 9) KBI Mataram, 10) KBI Tasikmalaya, 11) KBI Pontianak, 12) KBI Kediri, 13) KBI Jayapura, 14) KBI Purwokerto, 15) KBI Jambi, 16) KBI Jember, 17) KBI Banda Aceh, 18) KBI Bengkulu, 19) KBI Batam, 20) KBI Ambon, 21) KBI Kupang, 22) KBI Palu, 23) KBI Kendari, 24) KBI Palangkaraya, 25) KBI Balikpapan, 26) KBI Lhokseumawe, 27) KBI Ternate, 28) KBI Sibolga, 29) KBI Serang, 30) KBI Gorontalo, 31) KBI Tegal, 32) KBI Pematang Siantar.

**) 9 COORDINATING REGIONAL OFFICES OF BANK INDONESIA

1) KKBI Surabaya; 2) KKBI Bandung, 3) KKBI Semarang, 4) KKBI Medan, 5) KKBI Denpasar, 6) KKBI Makassar, 7) KKBI Palembang, 8), KKBI Padang, 9) KKBI Banjarmasin.

***) 32 OFFICE REGIONAL OFFICES OF BANK INDONESIA

1) KBI Solo, 2) KBI Pekanbaru, 3) KBI Yogyakarta, 4) KBI Cirebon, 5) KBI Malang, 6) KBI Manado, 7) KBI Bandar Lampung, 8) KBI Samarinda, 9) KBI Mataram, 10) KBI Tasikmalaya, 11) KBI Pontianak, 12) KBI Kediri, 13) KBI Jayapura, 14) KBI Purwokerto, 15) KBI Jambi, 16) KBI Jember, 17) KBI Banda Aceh, 18) KBI Bengkulu, 19) KBI Batam, 20) KBI Ambon, 21) KBI Kupang, 22) KBI Palu, 23) KBI Kendari, 24) KBI Palangkaraya, 25) KBI Balikpapan, 26) KBI Lhokseumawe, 27) KBI Ternate, 28) KBI Sibolga, 29) KBI Serang, 30) KBI Gorontalo, 31) KBI Tegal, 32) KBI Pematang Siantar.

APENDIKS 2 DAFTAR SINGKATAN APENDIX 2
ABBREVIATIONS

APENDIKS 2 DAFTAR SINGKATAN APENDIX 2
ABBREVIATIONS

ADB Asian Development Bank

AFS Available For Sale

AJDF ASEAN Japan Development Fund for Indonesia

AUD Australian Dollar

Baperum Bantuan Pemilikan Rumah (Housing Loan)

BBKU Bank Beku Kegiatan Usaha (*Business-Activity-Suspended Bank*)

BBO Bank Beku Operasi (Operation-Suspended Bank)

BKP Bantuan Kesehatan Pensiunan (Pension Health Facilities)

BI Bank Indonesia

BIS Bank for International Settlements

BLBI Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Bank Indonesia Liquidity Support)

BPK Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Supreme Audit Board)

BPM6 Balance of Payment Manual 6
BTO Bank Take Over (Taken Over Bank)

BUMD

Badan Usaha Milik Daerah (Region-Owned Enterprises)

BUMN

Badan Usaha Milik Negara (State-Owned Enterprises)

BUN

Bendaharawan Umum Negara (State General Treasury)

DAPENBI

Dana Pensiun Bank Indonesia (Bank Indonesia Pension Fund)

DKBU Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM (Directorate of Credit, Rural Bank and Micro, Small and

Medium Enterprise)

DKP Dana Kesejahteraan Pegawai (Employee Welfare Fund)

DPK Deputi Gubernur (*Deputy Governor*) **DPK** Dana Pihak Ketiga (*Third Party Deposits*)

DPM Direktorat Pengelolaan Moneter (Directorate of Monetary Management)

DPNPDirektorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (*Directorate of Banking Research and Regulation*) **DPR RI**Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (*House of Representatives of the Republic of Indonesia*)

EFF Extended Fund Facilities

EUR Euro

FASBI Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (Bank Indonesia Deposit Facilities)

FASBIS Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities)

FCL Flexible Credit Line
FPN Floating Principal Notes

FSD Fasilitas Saldo Debet (*Debit Balance Facilities*)

FTE Fine Tune Ekspansion

GBI Gubernur Bank Indonesia (Governor of Bank Indonesia)

GBP Great Britain Poundsterling

GWM Giro Wajib Minimum (*Minimum Reserve Requirement*)

HIPC Heavily Indebted Poor Countries

HTM Held To Maturity

IAS Indover Asia Limited Hongkong
International Accounting Standard

IBA Indover Bank Amsterdam

IBRD International Bank for Reconstruction and Development

IMF International Monetary Fund

Indover Bank N.V. De Indonesische Overseeze Bank

IPBV Indo Plus BV

Jamkrindo Jaminan Kredit Indonesia (*Credit Insurance Indonesia*)

JPY Japanese Yen

KBI Kantor Bank Indonesia (Bank Indonesia Regional Offices)

Kejari Jakbar Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (West Jakarta District Court)

Kemenkeu Kementerian Keuangan (*Ministry of Finance*)

KKBI Kantor Koordinator Bank Indonesia (Bank Indonesia Coordinating Regional Offices)

KLBI Kredit Likuiditas Bank Indonesia (Bank Indonesia Liquidity Credit)

KMK Keputusan Menteri Keuangan (Minister of Finance Decree)

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi (*Corruption Eradication Commission*) **KPMM** Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (*Capital Adequacy Ratio*)

KUT Kredit Usaha Tani
L/C Letter of Credit
LDR Loan to Deposit ratio

LIBOR London Inter-Bank Offered Rate

LPPI Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (Indonesia Banking Development Foundation)

LPS Lembaga Penjamin Simpanan (Saving Guarantee Institution)

MA Mahkamah Agung (Supreme Court)

MLAMaster Loan AgreementNCPNet Currency PositionNPLNon Performing LoanNZDNew Zealand Dollar

ON Obligasi Negara (*Treasury Bond*)

OPT Operasi Pasar Terbuka (*Open Market Operation*)

PAKBI Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (Bank Indonesia Financial Accounting Guidance)

PBI Peraturan Bank Indonesia (Bank Indonesia Regulation)

PBSN Perkebunan Besar Swasta Nasional (Major Commercial Field)

PDG Peraturan Dewan Gubernur (Board of Governors Regulation)

Persero
Perum
Persero
Perum
Perum
Perum
Pemerintah Daerah (Regional Government)
Perusahaan Perseroan (Limited Company)
Perum

Peruri Percetakan Uang Republik Indonesia (Money Printing Publick Company of the Republic of

Indonesia)

Persatuan Istri Pegawai Bank Indonesia (Union of Bank Indonesia Employees Wife)

PK Peninjauan Kembali (Judicial Review)

PMN Penyertaan Modal Negara (State Equity Participation)

PPBI Persatuan Pensiunan Bank Indonesia (Bank Indonesia Retired Employees Association)

PPh Pajak Penghasilan (*Income Tax*)

PPN Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax)
PRGF Poverty Reduction and Growth Facilities

PSAK Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Financial Accounting Standards Statement)

Perseroan Terbatas (Limited Liability Business Entity)

PT Askrindo PT Asuransi Kredit Indonesia

APENDIKS 2 DAFTAR SINGKATAN

APENDIX 2 **ABBREVIATIONS**

PT BEII PT Bank Ekspor Impor Indonesia

PT BPUI PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia PT IFI PT Indonesia Finance and Investment

PTK Pelaksana Tugas Kedinasan (Persons Performing Official Duties)

PUAB Pasar Uang Antar Bank (Inter-Bank Money Market) **RDG** Rapat Dewan Gubernur (Board of Governor's Meeting)

Repurchase Agreement Repo Republik Indonesia RI

RKUN Rekening Kas Umum Negara (General State Cash Account)

Rupiah Rp

RUPS Rapat Umum Pemegang Saham (General Meeting of Shareholders) **SAK** Standar Akuntansi Keuangan (Financial Accounting Standards)

SAL Sisa Anggaran Lebih (Budget Surplus)

SBA Stand-By Arrangement

SBI Sertifikat Bank Indonesia (Bank Indonesia Certificate)

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (Bank Indonesia Sharia Certificate) **SBIS** Surat Berharga Syariah Negara (State Sharia Marketable Securities) **SBSN**

SDM Sumber Daya Manusia (Human Resources)

Special Drawing Rights **SDR** SE Surat Edaran (Circular Letter)

SGD Singapore Dollar

SLA Subsidiary Loan Agreement

SOL Subordinated Loan

SPN Surat Perbendaharaan Negara (Treasury Bills)

SRBI Special Rate Bank Indonesia

SSB Surat-Surat Berharga (Marketable Securities)

SU Surat Utang (Treasury Bonds)

SUN Surat Utang Negara (Marketable Treasury Bonds) **SUP** Surat Utang Pemerintah (Government Bond) THT Tunjangan Hari Tua (Retirement Benefit Program)

TIBOR Tokyo Inter-Bank Offered Rate

TOZ Troy Ounce

TPSL Third-Party Securities Lending

TSL Two Step Loan

UFJ United Financial of Japan

Unit Khusus Penyelesaian Aset (Special Unit for Asset Settlement **UKPA UMKM** Usaha Menengah Kredit Mikro (Micro Credit Medium Enterprises)

USD United States Dollar UU Undang-Undang (Acts)

Valuta Asing (Foreign Exchange) **Valas**

YASPORBI Yayasan Perguruan KORPRI Unit Bank Indonesia (Bank Indonesia KORPRI Unit Foundation)

YKKBI Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (Bank Indonesia's Employee Welfare Foundation) **YPPI** Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (Indonesian Banking Development Foundation)